



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI TENTANG SUBSIDI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DAN IMPLEMENTASINYA
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**Aris Roosnila Dewi
0806440955**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

**JAKARTA
FEBRUARI 2010**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aris Roosnita Dewi

NPM : 0806440955

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Februari 2010

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINSTRASI DAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Aris Roosnila Dewi
NPM : 0806440955
JUDUL TESIS : Studi Tentang Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Implementasinya di Kota Tangerang Selatan

Telah Disetujui
Pembimbing



(Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Aris Roosnila Dewi
NPM : 0806440955
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Studi Tentang Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Implementasinya di Kota Tangerang Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Amy Sri Rahayu, M.Si (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA (.....)
Penguji : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (.....)
Sekretaris : Dra. Retno Kusumastuti, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Februari 2010

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahNya, tesis yang berjudul : *Studi tentang Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Implementasinya di Kota Tangerang Selatan Banten* , dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa moril maupun materiil, oleh karenanya pada ruang ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Gumilar Rusliwa Sumantri selaku Rektor Universitas Indonesia , yang telah memberi ijin untuk penelitian.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono.
3. Bapak Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.Publ. sebagai Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kuliah ini.
4. Bapak Prof. Dr. Azhar Kasim, M.PA, sebagai pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan tesis ini sampai selesai.
5. Bapak/Ibu Tim Pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik yang senantiasa mencurahkan ilmunya dengan kecintaannya pada para mahasiswa.
6. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional atas kesempatan dan biaya yang diberikan untuk memperoleh pendidikan magister.
7. Bapak Dadang Sofyan, selaku Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tangerang Selatan yang telah mengijinkan penulis mengadakan penelitian di sekolah-sekolah jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan.

8. Bapak Ngatimin, Drs.M.Pd, selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP Kota Tangerang Selatan yang telah membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Bapak /Ibu Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru, dan Bapak/Ibu Bendahara/ Tata Usaha di SMP-SMP di Kota Tangerang Selatan yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Suami dan anak tercinta Zainal Arifin dan Muhammad Naufal Abdillah dan keluarga yang memberikan dukungan serta doa.
11. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang senantiasa belajar, berdiskusi, saling memberi dan menerima dengan rasa tulus dan penuh keakraban.
12. Mas Pri perpustakaan PSIA Cikini atas bantuannya menemukan literatur-literatur; serta mbak Ana di sekretariat PSIA Salemba.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis yang menyangkut pengetahuan, waktu dan biaya. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan pada khususnya.

Jakarta, 15 Februari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aris Roosnila Dewi
NPM : 0806440955
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Ilmu Adminstrasi dan Kebijakan Pendidikan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

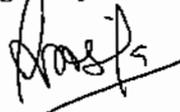
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Studi Tentang Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Implementasinya di Kota Tangerang Selatan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royati Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama ini tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2010
Yang menyatakan



(Aris Roosnila Dewi)

ABSTRAK

Nama : Aris Roosnila Dewi
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : **Studi Tentang Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Implementasinya Di Kota Tangerang Selatan**

(xx , 118 halaman, 29 tabel, 6 gambar, 91 halaman lampiran, referensi 62 buku, 1 peraturan perundangan, tahun buku 1964-2009)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan program subsidi BOS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan implementasinya kebijakan di Kota Tangerang Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol.

Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan . Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan

Subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang juga disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOP) merupakan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Tujuan diberikannya subsidi BOS ini adalah : meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta menuju Kota tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan.

Subsidi BOS diprogramkan untuk seluruh SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Pada periode Juli-Desember 2009 ini merupakan periode I (semester I). Sekolah yang menerima subsidi BOS masih terbatas pada SD dan SMP Negeri saja. Jumlah keseluruhan SD yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah dengan jumlah siswa 85.730 anak, dan 17 SMP Negeri dengan jumlah siswa 15.509 siswa . Subsidi diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa. Untuk SD Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan SMP Rp 17.650,00 per siswa per bulan.

Penerimaan rutin setiap SMP di Kota Tangerang Selatan setelah diberlakukannya Subsidi BOS dapat dihitung sebagai berikut : BOS Rp 47.900 + Subsidi BOS Rp 17.650 + SPP (rata-rata) Rp 40.000 + rata-rata angsuran uang sumbangan siswa baru Rp = Rp 144.550 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu :

Pertama, meskipun telah mendapatkan Subsidi BOS, komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan.

Kedua, implementasi Subsidi BOS untuk sekolah negeri dari SD dan SMP ini, dalam laporan dinas pendidikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kegiatan, fasilitas belajar dan terpenuhinya kebutuhan operasional yang lain. Disamping itu implementasi Subsidi BOS juga mendapat tanggapan positif dari stakeholder pendidikan seperti masyarakat, LSM, pengamat pendidikan dan para orang tua siswa.

Ketiga, dampak yang dapat dilaporkan dari adanya Subsidi BOS ini belum secara komprehensif, karena realisasi pemberian subsidi BOS baru berlangsung satu semester (periode Juli-Desember 2009). Belum dapat disimpulkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Namun hal-hal positif yang dapat dicatat antara lain : terpenuhinya minimal biaya operasional pendidikan, tertanggulangnya anggaran untuk alat tulis kantor (30%), belanja modal (50%) dan ekstrakurikuler (20%).

Untuk memaksimalkan pemanfaatan Subsidi BOS bagi kepentingan pembelajaran disarankan :

Pertama, pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mencover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif.

Kedua, implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya.

Kata kunci: Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

ABSTRACT

Name : Aris Roosnila Dewi
Study Program : Administration Study
Title : **Study on School Operational Fund Subsidy Policy and Its Implementation in Junior High School in Southern Tangerang**

(xx, 135 pages, 28 tables, 6 pictures, 60 attachment pages, 56 reference books, 1 law, years 1964-2007)

This research aims to find out School Operational fund subsidy policy and its implementation in Southern Tangerang.

This is a qualitative research that tries to expose relevant thorough symptoms through data collection and the researcher becomes the key instrument . This research is descriptive and it applies analysis in inductive approach.

The scope of this research is only limited to junior high schools in Southern Tangerang. There are two schools that become sample, one is state junior high school in Serpong District, one state junior high school in Pondok Aren district, Southern Tangerang. This research is to find out the implementation of school operational fund in state junior high schools in Southern Tangerang.

School Operational fund is Southern Tangerang City Government stipulated in Mayor Regulation Number 466/Kep/127 Huk/2009. the fund is to lift parent's burden in providing their student's school fee, and to complete 9 year education compulsory program, and towards Southern Tangerang as a City of Education.

School Operational Fund Subsidy is focused on all state and private elementary and junior high schools. This July-December 2009 period was its first semester and schools receiving the subsidy were still limited only to state elementary and junior high schools. 285 state elementary school have received the subsidy, with 85.730 students, and 17 junior high schools have received the subsidy with 15.509 students. Subsidy given was based on the number of students. Each elementary student received Rp 10.000 per month, while each junior high school student received Rp 17.650 per month.

Routine income in every junior high school after the subsidy policy implementation can be calculated as follows:: School Operational Fund Rp 47.900 + Subsidy Rp 17.650 + School tuition around Rp 40.000 + new student's average donation = Rp 144.550 or Rp 1.734.600 per student per year.

This research produces several findings :

First, despite receiving school operational subsidy , parents still have to pay a lot, and this payment includes school fee and development donation with percentage 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. There will be growing number of drop-out students. The amount of subsidy must be increased significantly, if South Tangerang local government want the city to be City of Education.

Second, Scording to the national education office, the subsidy policy implementation has positive impact on learning activities, prvision of learning

facilities. The subsidy also won positive responses from education stakeholder, students, non-government organization, and so on.

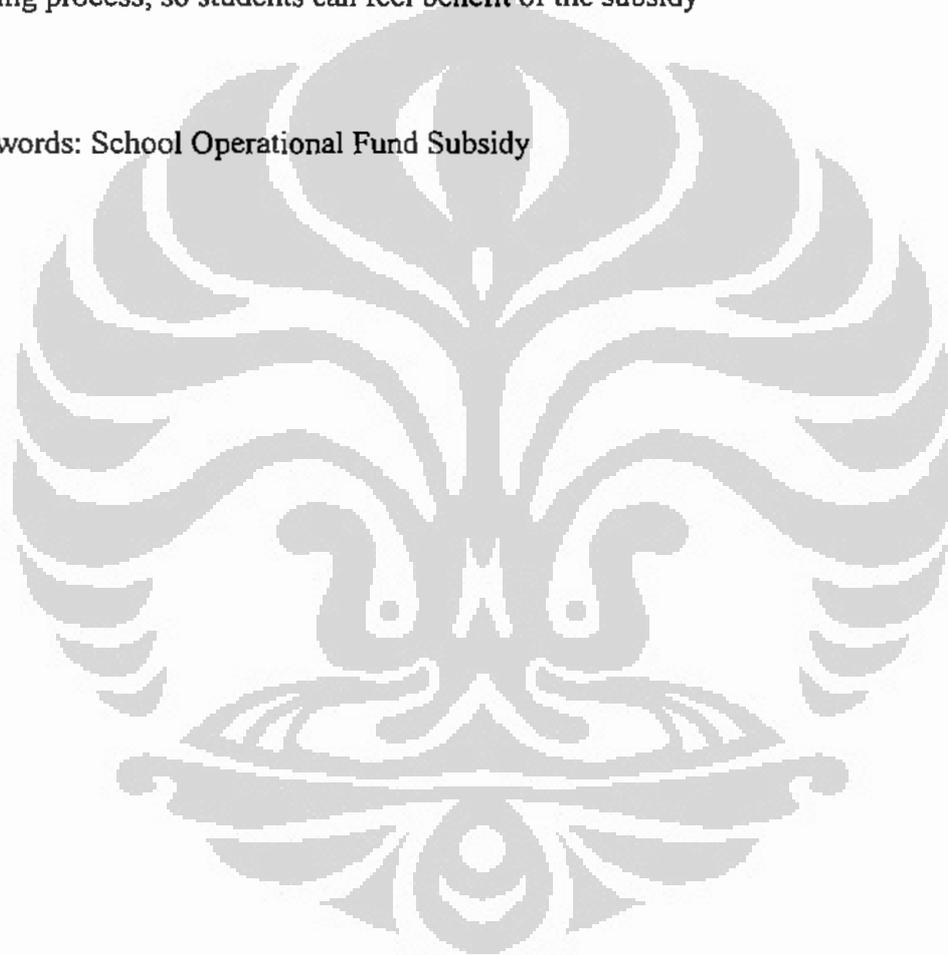
Third, there is no report yet on the subsidy policy impact on learning activity, as the implementation was only for one semester. However, there are some positive impacts, like the fulfilled education operational fund, budget for stationery (30%), capital spending (50%) and extracurricular (20%).

To maximize the fund usage, these are some suggestions below :

First, the subsidy should be disbursed monthly, so schools can allocate the fund.

Second, the subsidy policy should be used for activities related to their learning process, so students can feel benefit of the subsidy

Key words: School Operational Fund Subsidy



Motto :

Orang yang baik adalah mereka yang membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain

Orang yang sukses adalah mereka yang selalu berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangannya

Barang siapa senang membantu orang lain dalam kesulitan, sebenarnya ia telah membebaskan dirinya dari sebagian masalah



Persembahan :

*Tesis ini kupersembahkan untuk :
Bapak dan Ibu tercinta
Suami dan anakku tersayang
Rekan sejawat yang baik hati*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinilitas.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	x
Halaman Motto dan Persembahan.....	xii
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xviii
Daftar Gambar.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan penelitian.....	8
F. Model Operasional Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konteks Penelitian.....	13
B. Konsep BOS dan Subsidi BOS.....	17
1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	17
2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	17
3. Sasaran Program BOS.....	18
4. Subsidi BOS.....	19
C. Konsep Kebijakan Publik.....	21
D. Implementasi Kebijakan.....	24
1. Proses Perumusan Kebijakan.....	24

1.1 . Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan.....	25
1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perumusan Kebijakan.....	27
2. Implementasi Kebijakan.....	27
2.1 Communication (Komunikasi)	28
2.2 Resources (Sumber-sumber)	30
2.3 Dispositions (Kepribadian/pandangan).....	31
2.4 Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).....	32
3. Evaluasi Kebijakan.....	34
E. Hakikat Pembiayaan Pendidikan.....	34
F. Mutu Pendidikan.....	40
G. Penelitian Terdahulu.....	42
1. Efektivitas Program BOS untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Dasar 9 tahun (Tesis, Sukardi Wedo, Universitas Indonesia, 2006).....	42
2. Konsistensi Alokasi Anggaran Sekolah Terhadap Kebutuhan Riil dan Komitmen Arah Pendidikan (Tesis, Rian Ardiwibowo, Universitas Indonesia, 2005).....	44
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Akses terhadap Pendidikan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Lembaga Penelitian SEMERU,2006).....	47
H. Operasionalisasi Konsep.....	48
BAB III: METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis, Metode dan Strategi Penelitian.....	51
B. Teknik Pengumpulan Data.....	52
C. Instrumen Penelitian.....	55
D. Teknik Analisa Data.....	55
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI BOS DI KOTA TANGERANG.....	58
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Kota Tangerang.....	58

1.1 Kondisi Geografis dan Demografis.....	58
1.2 Pemerintahan Kota Tangerang	59
1.3 Perekonomian Daerah.....	61
1.4 Kondisi Sosial dan Pendidikan.....	63
2. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Bidang Pendidikan	65
2.1 Sasaran.....	65
2.2 Arah Kebijakan.....	66
3. Program-program Peningkatan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.....	66
3.1 Pendidikan Anak Usia Dini.....	66
3.2 Program Wajib Belajar 9 tahun.....	67
3.3 Pendidikan Menengah.....	68
3.4 Pembinaan Tenaga Kependidikan.....	69
3.5 Penataan Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan.....	70
3.6 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.....	72
4. Implementasi Subsidi BOS pada Jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan.....	72
4.1 Implementasi Subsidi BOS pada Jenjang SMP SSN.....	75
4.2 Implementasi Subsidi BOS pada Jenjang SMP Reguler.....	76
4.3 Implementasi Subsidi BOS pada SMP Terbuka/TKBM.....	77
5. Pengawasan terhadap Implementasi Subsidi BOS.....	82
6. Dampak Subsidi BOS.....	84
7. Evaluasi dan Monitoring terhadap Implementasi Subsidi BOS.....	86
B. Pembahasan Terhadap Subsidi BOS dan Implementasinya.....	87
1. Formulasi Kebijakan Susidi BOS.....	87

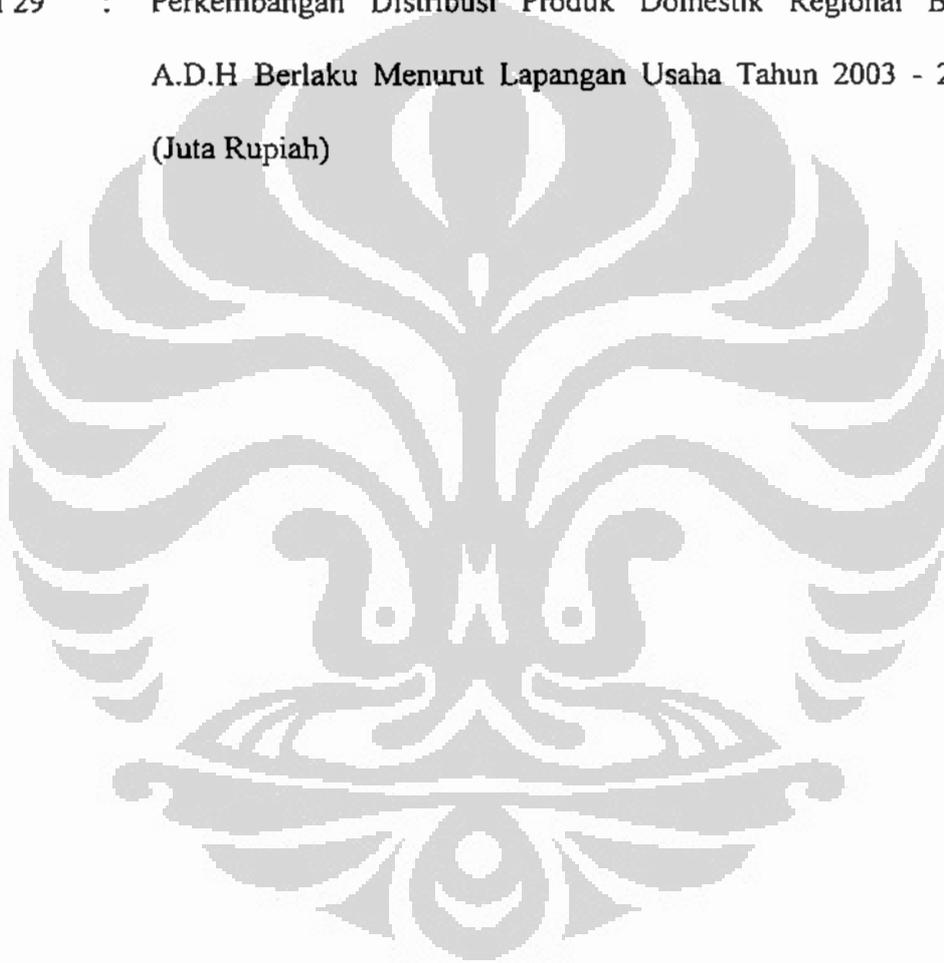
1.1. Proses dan Dinamika Kebijakan Subsidi BOS.....	87
1.2. Konteks Implementasi Subsidi BOS.....	90
2. Aktor-aktor dalam Perumusan Subsidi BOS.....	94
2.1 Peranan Walikota.....	94
2.2 Peranan Dinas Pendidikan.....	95
2.3 Peranan DPRD.....	96
2.4 Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	97
3. Nilai-nilai yang Mempengaruhi Implementasi.....	97
4. Implementasi Subsidi BOS.....	99
4.1. Tujuan.....	99
4.2. Implementasi.....	100
4.2.1. Communication.....	101
4.2.2. Resources (Sumber-sumber).....	105
4.2.2.1. Staff.....	106
4.2.2.2. Informasi.....	106
4.2.2.3. Authority.....	107
4.2.2.4. Facilities (Fasilitas-fasilitas).....	108
4.2.3. Dispositions.....	109
4.2.4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)...	110
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	117
DAFTAR REFERENSI.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125-216

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Operasionalisasi Konsep
- Tabel 2 : Perubahan Nama SMP di Kota Tangerang Selatan
- Tabel 3 : Perincian Jumlah Siswa dan Besarnya Subsidi BOS pada SMP
SSN
- Tabel 4 : Perincian Jumlah Siswa dan Besarnya Subsidi BOS pada SMP
Reguler
- Tabel 5 : Keadaan Siswa SMP Terbuka Kota Tangerang Selatan
- Tabel 6 : Penerimaan Masing-masing sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010
- Tabel 7 : Persentase Subsidi BOS terhadap Biaya Operasional Sekolah
- Tabel 8 : Realisasi Pemanfaatan Subsidi BOS
- Tabel 9 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008
- Tabel 10 : Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Ruang Kelas Rusak Kota
Tangerang Selatan Tahun 2008
- Tabel 11 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Menurut Kecamatan Kota
Tangerang Selatan 2008
- Tabel 12 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan
- Tabel 13 : Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan
- Tabel 14 : Sekolah Jenjang Smp Di Kota Tangerang Selatan
- Tabel 15 : Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut
Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008

- Tabel 16 : Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Ruang Kelas Rusak Kota Tangerang Selatan Tahun 2008
- Tabel 17 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008
- Tabel 18 : Jumlah dan Presentase Keadaan Gizi Balita Yang Ditimbang Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2007
- Tabel 19 : Data Terkait Kesehatan Ibu Pada 10 (Sepuluh) Pukesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
- Tabel 20 : Data Terkait Kesehatan Keluarga Miskin 10 (Sepuluh) Pukesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
- Tabel 21 : Jumlah Lansia Sasaran di Wilayah Pukesmas dan Panti Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
- Tabel 22 : Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
- Tabel 23 : Jumlah Tenaga Kesehatan Pada 10 (Sepuluh) Pukesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
- Tabel 24 : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Di Wilayah 10 (Sepuluh) Pukesmas Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
- Tabel 25 : Distribusi Produk Domestik Regional Bruto A.D.H Berlaku Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Tahun 2007 (Juta Rupiah)
- Tabel 26 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto A.D.H Konstan 2000 Menurut Kecamatan Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah)

- Tabel 27 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita A.D.H Berlaku Menurut Kecamatan Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah)
- Tabel 28 : Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto A.D.H Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 - 2007 (Juta Rupiah)
- Tabel 29 : Perkembangan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto A.D.H Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 - 2007 (Juta Rupiah)



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Alur Pembuatan Kebijakan Subsidi BOS Pemerintah Kota Tangerang
- Gambar 2 : Pengaruh Elemen-Elemen Dalam Implementasi
- Gambar 3 : Proses Analisis Data
- Gambar 4 : Persentase Keadaan Gizi Balita Yang Ditimbang Pada Tahun 2007
- Gambar 5 : Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007
- Gambar 6 : Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2004 - 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang. Namun sampai saat ini masih banyak penduduk miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan.

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti kebijakan kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu berdampak besar pada sektor pendidikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka peserta didik putus sekolah karena menurunnya kemampuan untuk membeli alat tulis, membayar sekolah dan mengikuti kegiatan sekolah lainnya.

Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM, maka pemerintah mulai bulan Juli 2005 mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Besar biaya satuan BOS pada periode tahun 2005-2008 yang diterima oleh sekolah belum termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan SD/SDLB Rp252.000/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT Rp. 330.000/siswa/tahun. Sedangkan BOS buku diberikan sejak tahun 2006, untuk SD/SDLB Rp 20.000 untuk satu judul buku dan SMP/SMPLB/SMPT besarnya Rp 30.000 setiap judul buku. Diharapkan dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, seluruh kebutuhan buku siswa telah dapat disediakan oleh perpustakaan sekolah.

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 mengalami perubahan bahwa biaya satuan BOS (termasuk BOS Buku) , untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus

membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI)

Pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Sekolah tidak dibenarkan untuk mengalokasikan bagi kebutuhan-kebutuhan selain yang tercantum dalam petunjuk teknis yang ada. Adapun penggunaan dana BOS yang dibenarkan adalah meliputi : kegiatan pengelolaan kurikulum, kegiatan pengelolaan belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan penilaian, kegiatan kesiswaan /ekstrakurikuler, kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran, kegiatan pemeliharaan /perawatan dan pengadaan sarana , kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan pengelolaan perkantoran, kesejahteraan guru dan pegawai, kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, kegiatan pengembangan manajemen sekolah, kegiatan hubungan dengan masyarakat / pelayanan masyarakat, kegiatan supervisi, kegiatan monitoring dan evaluasi.

Implementasi pengelolaan BOS dan subsidi BOS di SMP lebih menarik untuk dikaji karena beberapa alasan antara lain : (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada jenjang SMP relatif kecil, yaitu hanya Rp 575.000 per siswa per tahun. Dengan demikian diperlukan subsidi terhadap BOS tersebut, sehingga tujuan pemberian dana yang terutama untuk membantu masyarakat (orang tua murid) akan berdampak secara signifikan. Dari asumsi ini peneliti (saya) tertarik untuk mengetahui bagaimana subsidi BOS tersebut diimplementasikan dan juga konsekuensi-konsekuensinya. (2) Kontribusi terhadap kendala yang dihadapi dalam program belajar pendidikan dasar 9 tahun lebih banyak berasal dari jenjang SMP atau yang sederajat. Dibandingkan dengan SD, angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SMP rata-rata lebih rendah, tingkat kelulusannya lebih rendah, rata-rata nilai ujian nasional (UN) lebih rendah. Padahal salah satu indikator keberhasilan program wajib belajar 9 tahun terletak pada tingginya APK dan APM. Oleh karena itu beberapa fakta di lapangan sangat menarik untuk diketahui dan diungkapkan. (3) Banyak kepala daerah yang mewacanakan maupun telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun (setingkat SLA). Hal ini

menimbulkan pertanyaan pada banyak kalangan (termasuk peneliti), apakah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (di daerah tersebut) sudah berhasil dengan baik? Dari wacana tersebut peneliti sangat tertarik memilih jenjang SMP (sebagai entri point) untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan pendidikan di daerah tersebut. (4) Secara praktis, jenjang SMP merupakan wilayah yang menjadi perhatian dan pembinaan dalam bidang tugas (departemen) saya di Departemen Pendidikan Nasional. Dengan demikian peneliti berharap dapat mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari penelitian ini untuk meningkatkan profesionalitas.

Adapun pemilihan Kota Tangerang Selatan sebagai tempat penelitian karena didorong oleh beberapa alasan sebagai berikut :

1. Wilayah Kota Tangerang Selatan secara geografis berbatasan dengan wilayah provinsi DKI Jakarta. Kedekatan tersebut memunculkan asumsi bahwa biaya operasional pendidikan di DKI Jakarta tidak jauh berbeda dengan pembiayaan operasional untuk wilayah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah DKI Jakarta memberikan Subsidi BOS sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jenjang SMP dihitung per siswa per bulan. Sedangkan di Kota Tangerang Selatan subsidi yang sama besarnya hanya Rp 17.650 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk jenjang yang sama dengan dasar perhitungan yang sama yaitu per siswa per bulan. Dengan demikian, peneliti mendiagnosa bahwa terdapat hal-hal yang menarik di dalam implementasi pemberian subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan ini sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan baik dan lancar.
2. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonomi baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Sebagai daerah otonom baru tentu memiliki spirit yang besar dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang pendidikan. Kiat-kiat dalam peningkatan pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan tersebut mendorong minat peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasinya di lapangan.

3. Kota Tangerang Selatan mencanangkan diri menjadi kota pendidikan, setidaknya untuk lingkup provinsi Banten. Konsekuensinya tentu banyak inovasi dalam membenahan sektor pendidikan agar harapan untuk menjadi kota pendidikan dapat tercapai. Inovasi-inovasi macam apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendorong peneliti untuk mendalami lebih jauh dan diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam menggeluti disiplin ilmu kebijakan publik serta bermanfaat secara praktis untuk meningkatkan profesionalitas dalam pekerjaan.

Bagi pada umumnya SMP di Kota Tangerang Selatan , besarnya dana BOS tersebut ternyata tidak memadai untuk menopang penyelenggaraan sekolah. Banyak komponen kegiatan maupun pengadaan sarana pembelajaran yang tidak dapat direalisasikan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya relatif sedikit. Berbeda dengan sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak.

Pada penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2007/2008 dimana belum diadakan peningkatan besarnya dana BOS , gambaran kebutuhan pembiayaan di beberapa SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan , setiap siswa harus membayar formulir pendaftaran sebesar Rp 50.000,00, biaya operasional antara Rp 90.000,00 sampai Rp 160.000,00 dan Sumbangan Anggaran Pendidikan (SAP) antara 1.200.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 (PSB di beberapa SMPN Ciputat dan Serpong tahun pelajaran 2007/2008). Ditambah dana BOS yang besarnya Rp 575.000 per siswa per tahun yang berasal dari pemerintah pusat.

Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik dirasakan masih cukup memberatkan. Keluhan ini mendapatkan respon yang positif dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sejak awal tahun 2009 digulirkan kebijakan yang disebut *subsidi dana BOS* atau *pendamping dana BOS* atau *Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)*

Setelah diberlakukannya kebijakan subsidi dana BOS, maka beban biaya operasional pendidikan sebagian ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini belum sepenuhnya mengatasi masalah pendanaan pendidikan di sekolah. Meskipun demikian beberapa kegiatan ekstrakurikuler terpaksa harus ditiadakan karena keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini

dengan sangat sederhana dapat didiskripsikan bahwa sebelum kebijakan subsidi dana BOS dicanangkan, setiap siswa SMP harus membayar lebih dari Rp 100.000 per bulan. Misalnya setiap anak membayar Rp 100.000 per bulan saja, maka dana yang bisa dikumpulkan oleh sekolah adalah Rp 1.200.000,00 per siswa per tahun. Belum lagi dana Sumbangan Anggaran Pendidikan (SAP) antara Rp 1.200.000,00 sampai Rp 3.000.000,00. Jika diambil rerata Rp 1.500.000,00, maka total dana yang diterima oleh sekolah per siswa per tahun mencapai $Rp\ 1.200.000,00\ (SPP) + Rp\ 2.062.000,00\ (SAP) + Rp\ 324.000\ (dana\ BOS) + Rp\ 50.000,00\ (pendaftaran) = Rp\ 3.636.000,00$ per siswa per tahun. Ini berarti dana BOS yang besarnya hanya Rp 575.000 per siswa per tahun tidak mencukupi untuk pembiayaan dan mempertahankan kualitas pendidikan yang telah dicapai sebelumnya. Akibatnya pendapatan guru menurun, pembayaran guru honor kurang memadai dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan non akademik ditiadakan. Pendapatan tambahan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap/tidak tetap yayasan (yang mengajar di sekolah swasta) diperoleh dari keterlibatan mereka pada program pembinaan ekstrakurikuler dan kegiatan non akademis lainnya. Sedangkan bagi guru di sekolah negeri yang berstatus honorer, mereka menerima gaji (honor) dari sekolah yang bersangkutan yang dialokasikan dari dana BOS maupun dana Subsidi BOS.

Sebagian besar guru yang berstatus PNS, mereka telah memiliki pangkat Pembina dengan golongan ruang IVa. Mereka menerima gaji kotor antara Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000 per bulan. Jika mereka terlibat pada pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dengan intensitas 1 (satu) kali seminggu atau 4 (empat) kali sebulan, maka tambahan pendapatan yang diperoleh adalah sekitar Rp 200.000-Rp 300.000 per bulan. Dengan demikian mereka akan menurun pendapatannya sekitar 10% per bulan. Sedangkan bagi guru yang berstatus honorer, penurunan pendapatan disebabkan oleh ketidakmampuan finansial sekolah untuk membayar honorarium sebesar sama atau bahkan lebih besar dari honorarium yang dibayarkan ketika belum ada kebijakan BOS dan subsidi BOS. Penurunan ini bersifat kasuistik di beberapa sekolah, terutama SMP yang jumlah muridnya relatif sedikit dan banyak guru

di sekolah tersebut memasuki masa pensiun. Penurunan kesejahteraan guru yang terjadi adalah pada kisaran 5%-20% per bulan.

Tentu saja ketidakmampuan dana BOS dalam membiayai seluruh komponen maupun aktivitas pendidikan di SMP menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di wilayah tersebut. Pada sisi lain, kebijakan subsidi BOS tidak hanya meringankan beban peserta didik dari kewajiban membayar dana operasional maupun pungutan-pungutan lain, akan tetapi sekolah harus tetap berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sekolah harus membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang merupakan salah satu instrumen penting perkembangan dan kemajuan sekolah. Dengan Rencana Pengembangan Sekolah, maka sekolah dapat merencanakan program sekolah yang realistis dan terukur, baik untuk pengembangan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Beberapa aspek yang harus tercakup dalam rencana pengembangan sekolah antara lain :

- a. Pemerataan kesempatan : persamaan kesempatan, akses dan keadilan. Yang terkandung dalam aspek ini antara lain adalah kesempatan belajar untuk siswa miskin, peningkatan angka melanjutkan dan pengurangan angka putus sekolah.
- b. Peningkatan kualitas : kualitas pendidikan meliputi input, proses dan output. Perencanaan kualitas ini berkaitan erat dengan pengembangan input, kualitas pendidik, pengembangan sarana dan fasilitas sekolah, pengembangan bahan ajar, pengembangan model pembelajaran dan lain-lain.
- c. Peningkatan efisiensi : efisiensi merujuk pada hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan eksternal. Efisiensi internal berkaitan dengan input dan output. Sedangkan efisiensi eksternal berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif.

- d. Peningkatan relevansi : relevansi merujuk kepada kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan pembangunan yang meliputi berbagai sektor.
- e. Pengembangan kapasitas : pengembangan kapasitas sekolah adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menyiapkan kapasitas sumber daya sekolah agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka menghasilkan output yang diharapkan demi kemajuan bangsa dan negara.

Bagaimana bentuk kebijakan subsidi BOS dan efektifitas dalam implementasinya pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan menjadi sangat menarik untuk diteliti, apakah mampu meningkatkan kesejahteraan guru, meringankan beban orang tua peserta didik serta mendongkrak kualitas pendidikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat banyak aspek yang semestinya dijadikan sebagai rumusan masalah. Namun diperlukan fokus pada penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya satu permasalahan pokok, yaitu :

"Bagaimana implementasi kebijakan program subsidi BOS pada jenjang pendidikan SMP di Pemerintah Kota Tangerang Selatan?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
"Untuk menganalisis implementasi kebijakan program subsidi BOS pada jenjang SMP Pemerintah Kota Tangerang Selatan".

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi :

1. Masyarakat :

Masyarakat khususnya orang tua murid yang selama ini belum mengetahui secara mendalam terhadap kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan, diharapkan akan mendapat informasi dari hasil penelitian ini, sehingga mereka akan mengetahui bentuk program dan mampu menempatkan diri secara proporsional dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan kualitas pendidikan di sekolah.

2. Sekolah :

Sekolah diharapkan mendapatkan informasi dari hasil penelitian ini sehingga dapat belajar bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka program subsidi BOS tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah :

Dengan paparan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan yang digambarkan dalam laporan hasil penelitian ini diharapkan baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dapat terus memperbaiki dan meningkatkan subsidi BOS dan implementasinya, sehingga program ini benar-benar mampu mengurangi beban masyarakat, memperluas pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

E. Batasan Penelitian

Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di

wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sampel ditentukan secara terpilih terhadap 2 buah SMP yang memiliki beberapa perbedaan karakter, yang terdapat di wilayah Kota Tangerang Selatan, dengan perincian 1 (satu) SMP Negeri yang berada di wilayah kecamatan Pondok Aren dengan angka partisipasi kasar (APK) terendah (52,72%) dan 1 (satu) SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dengan APK tertinggi (120, 83%). Selain perbedaan APK di dua wilayah kecamatan tersebut, terdapat perbedaan lain yaitu perbedaan jumlah siswa dan perbedaan secara geografis (desa-kota).

Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian akan dapat diketahui besaran, luas cakupan, pemanfaatan subsidi BOS dan implementasinya di lapangan.

Untuk melengkapi data, peneliti juga berusaha mendapatkan informasi maupun masukan dari Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat serta pihak lain yang terkait dan relevan.

F. Model Operasional Penelitian

Berdasarkan karakteristik tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh paparan informasi tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian dan keadaan sebagaimana adanya. Dengan pendekatan tersebut, maka informasi maupun data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya.

Sesuai dengan rencana tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diarahkan untuk menggali informasi secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu : Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan dan Implementasi program subsidi BOS tersebut pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan.

Tahapan penelitian dimulai dengan pengkajian terhadap permasalahan, yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Setelah itu langkah selanjutnya adalah menyusun instrument, mengumpulkan, mentabulasi dan menganalisis data . Tahap terakhir adalah mendiskusikan dan menganalisa hasil penelitian, menarik kesimpulan dan saran.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan proram subsidi BOS dan implementasinya pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek perumusan kebijakan , indikatornya :
 - a. Perumusan kebijakan didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat
 - b. Rumusan kebijakan dilakukan oleh aktor-aktor yang kompeten kredibel dan professional
 - c. Kebijakan mendapatkan dukungan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesamaan dan keadilan.
2. Aspek implementasi kebijakan, indikatornya :
 - a. Kebijakan Subsidi BOS dapat dilaksanakan dan diukur tingkat keberhasilannya oleh pelaksana program.
 - b. Badan pelaksana program mampu melaksanakan program dalam tiap tahapan secara optimal.
 - c. Badan pelaksanaan kebijakan mampu mengkoordinasikan kebijakan dengan badan-badan lain secara baik.
3. Aspek evaluasi, indikatornya :
 - a. Evaluasi kebijakan memfokuskan pada bekerjanya kebijakan dan mampu membenahi kualitas kebijakan yang akan datang
 - b. Kebijakan mendapat respon dan reaksi positif dari masyarakat.

G. Definisi Istilah :

Untuk menghindari timbulnya salah interpretasi atau penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul tesis ini, maka dikemukakan definisi istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Studi :
Suatu kegiatan untuk mengetahui lebih jauh tentang sesuatu hal melalui kajian , pengamatan dan analisa yang mendalam.
2. Kebijakan :
Produk yang berupa keputusan untuk mengelola/menyelenggarakan suatu kegiatan dalam rangka mencapai sesuatu tujuan yang telah digariskan.
3. Sekolah :
Lembaga formal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran bagi peserta didik. Jenis sekolah ini adalah SD,SMP,SMK dan SMA
4. BOS :
BOS singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah pada jenjang SD dan SMP baik negeri maupun swasta untuk biaya operasional pendidikan di sekolah.
5. Subsidi BOS :
Dana yang berasal dari pemerintah daerah yang ditujukan untuk membantu/menambah besaran dana BOS bagi keperluan operasional pendidikan di sekolah. Istilah Subsidi BOS juga dikenal dengan sebutan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau BOS Daerah (BOSDA)
6. SMP :
Salah satu jenjang pendidikan formal, setelah Sekolah Dasar. Dalam konteks penelitian ini, SMP yang dimaksud adalah SMP Negeri maupun Swasta di Kota Tangerang Selatan.
7. Implementasi :
Penerapan di lapangan atas keputusan/kebijakan ataupun aturan tertentu yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, sebagai pendahuluan Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keterbatasan Penelitian, Model Operasional Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas tentang Konteks Penelitian, Konsep BOS dan Subsidi BOS, Konsep Kebijakan Publik, Definisi Implementasi Kebijakan dan Hakikat Pembiayaan Pendidikan.

Bab III Metode Penelitian, berisi Jenis, Metode dan Strategi Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Teknik Analisa Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Terhadap Subsidi BOS dan Implementasinya pada Jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan, pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan, Kondisi Geografis dan Demografis, Pemerintahan Kota Tangerang Selatan , Perekonomian Daerah, Kondisi Sosial dan Pendidikan, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan akhir dari rangkaian penulisan laporan penelitian yang akan berisi dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Halaman berikutnya berupa lampiran-lampiran sebagai pelengkap dari laporan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konteks Penelitian

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Mulai tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi BOS. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun harus juga berkontribusi penting untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan biaya satuan BOS yang telah dinaikkan secara signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Perubahan kebijakan berkaitan dengan dana BOS antara lain mencakup perubahan biaya satuan BOS, kebijakan buku murah, perubahan penggunaan dana BOS dan struktur organisasi pelaksanaan BOS.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Fattah Nanang, 2004, 32)

Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu (1). Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran (2). Pengeluaran untuk tata usaha sekolah (3). Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah (4). Kesejahteraan pegawai (5). Administrasi (6). Pembinaan teknis edukatif (7). Pendataan.

Sumber-sumber bantuan dana pendidikan antara lain meliputi : Anggaran rutin ; Anggaran pembangunan ; Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; pinjaman dan lain-lain yang dianggap sah oleh. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Pengertian bantuan pendidikan menurut Chamberlin, J. Gordon (1997) adalah sebagai berikut :

"Education Fund advocate for equal educational opportunity and support students in need to successfully access, pursue and complete education facility. Education Fund functions as an endowment, meaning that all loans made from interest, while the corpus (or body of the fund) remains intact. All donations made to the fund go to the fund corpus. All administrative costs, such as time and expertise, are donated by volunteers"

(Bantuan pendidikan membantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan mendorong siswa dalam kebutuhan memperoleh akses , mengejar dan melengkapi fasilitas pendidikan. Fungsi dana

pendidikan sebagai suatu bantuan, yang berarti bahwa semua pinjaman terjadi dari adanya kepentingan dari badan atau orang untuk melengkapi kekurangan. Seluruh biaya administrasi, dan keahlian dibiayai oleh penyanggah dana)

Biaya pendidikan harus diperhitungkan pada setiap awal pelaksanaan pendidikan dalam satuan waktu tertentu. Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Cara yang pertama dilakukan dengan meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini dibedakan atas (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya. Pengeluaran menyeluruh terdiri atas (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri. Menurut statusnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMA dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya.

Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut.

Pemilihan unit-unit untuk penetapan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya : per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan, biaya unit per anak didik, rata-rata biaya kehadiran sehari-hari, biaya modal per tempat, biaya rata-rata per kelas, dan biaya berulang rata-rata per pendidik. Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu

perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan yang bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, kuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen itu pada akhirnya diharapkan mampu menghasilkan pendidikan bermutu (Wirakartakusumah, 1998). Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah usaha jasa yang memberikan pelayanan kepada para pelanggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut. (Karsidi, 2000)

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. Hallack J mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum. Akibatnya sulit mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain adalah tingkat ketidakkululusan sebesar 6,9%, kegiatan non akademik yang belum optimal, angka mengulang kelas yang tinggi, proses pembelajaran yang rendah, kurangnya fasilitas, serta dana operasional yang belum memadai (Diknas, 2005, 17-20) Kebijakan subsidi BOS Pemerintah Kota Tangerang Selatan digulirkan dalam rangka menekan beberapa permasalahan tersebut.

Pada tahun 2009 ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan memprioritaskan 6 sektor yang akan didahulukan dalam pembangunan. Keenam sektor tersebut adalah, bidang pemerintahan, infrastruktur, bidang kesehatan, bidang pendidikan, rehabilitasi dan normalisasi Situ Gintung, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini sedang menggalakkan program pada sektor pendidikan mengingat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar(SD dan SMP) di Kota Tangerang Selatan masih relatif rendah. Data Dinas pendidikan setempat pada tahun 2008 menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SD rata-rata 87,49 % dan APM 72,45%, untuk jenjang SMP dan sederajat APK 77,59% dan APM hanya 61,00%. Sedang APK dan APM untuk jenjang SMA masing masing 30,09% dan 21,94% serta APK dan APM untuk SMK masing-masing 33,85% dan 26,78%.

B. Konsep BOS dan Subsidi BOS

1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik yang lain. Dengan BOS diharapkan peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan dana subsidi BOS bagi masing-masing pelajar dari sejumlah sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Untuk setiap murid SD akan diberikan Rp 10.000, sementara untuk masing-masing pelajar tingkat menengah pertama dan sederajat diberikan Rp 20.000 persiswa per bulan. Dana tersebut sebagai dana pendamping BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencanangkan tahun 2009 ini program wajib belajar (wajar) 9 tahun telah tuntas.

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk:

menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan, pemberian BOS dan Subsidi BOS memiliki fungsi ganda, yaitu : meringankan beban masyarakat (orang tua siswa), mempercepat ketuntasan wajib belajar 9 tahun, melanjutkan pada tahapan wajib belajar 12 tahun dan mendukung Kota Tangerang Selatan menjadi kota pendidikan di provinsi Banten.

3. Sasaran Program BOS

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu. Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Departemen Pendidik Nasional belum mencukupi.

Program BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan adalah ditujukan pada 17 SMP Negeri dan 7 SMP Terbuka . Dengan BOS dari pemerintah pusat dan subsidi BOS dari pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan pada akhir tahun 2009, program wajib belajar 9 tahun dapat dituntaskan dan segera dilanjutkan program wajib belajar 12 tahun atau setingkat sekolah lanjutan atas.

4. Subsidi Bantuan Operasional Sekolah (Subsidi BOS)

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. (b) Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah. (c) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non personalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas: (a) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya. (2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Departemen Pendidikan Nasional belum mencukupi. Subsidi BOS adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mencukupi kekurangan biaya operasional setelah diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk lebih meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua peserta didik.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan dana subsidi BOS bagi masing-masing pelajar dari sejumlah sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Untuk setiap murid SD akan diberikan Rp 10.000, sementara untuk masing pelajar tingkat menengah dan sederajat diberikan Rp 20.000 persiswa per bulan. Dana tersebut sebagai dana pendamping BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan

mencanangkan tahun 2009 ini program wajib belajar (wajar) 9 tahun telah tuntas, dan tahun 2010 memulai program wajib belajar 12 tahun.

Kota Tangerang Selatan yang baru disahkan 29 Oktober 2008 ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi Kota Pendidikan karena adanya faktor pendukung antara lain : banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, Institut Teknologi Indonesia (ITI). Selain perguruan tinggi, di Kota Tangerang Selatan terdapat sekolah-sekolah negeri, swasta yang bertaraf internasional. Ada enam komponen yang dimiliki kota ini seperti sarana gedung atau kelas yang ideal seperti setiap kelas 20-25 orang, sarana buku pendidikan. SMA sudah mempunyai 50 persen dan di SMK sudah mempunyai 33 persen bengkel yang lengkap dan pendidikan pengajar minimal strata satu (S1) atau Diploma empat (D4) dan bersertifikasi pendidikan .

Subsidi berasal dari kata "*subsidy*" yang berarti tunjangan atau sokongan (bantuan). Bantuan mengandung unsur adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pemberi bantuan (donor) dan penerima bantuan (pengguna). Apabila dikaitkan pihak pemberi bantuan dengan pihak pengguna dalam suatu institusi, , dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

Subsidi dalam suatu institusi (intern) adalah peristiwa terjadinya aliran dana/biaya dari unit yang berkecukupan dana/biaya (kuat) ke unit yang kekurangan dana (lemah) dalam rangka mempertahankan pemerataan (*equity*) untuk kelangsungan kegiatan/usaha institusi tersebut.

Secara ekstern, subsidi adalah pemberian bantuan dana/biaya dari pihak luar kepada suatu institusi/lembaga atau pihak lain, baik karena suatu kepentingan secara langsung atau tidak, agar aktivitas institusi dapat berlanjut. Subsidi pemerintah kepada sekolah penyelenggara jenjang pendidikan dasar, dikategorikan sebagai subsidi ekstern.

Subsidy : "*money granted, especially by a government or society, to an industry or other course needing help to keep prices at adesired level*" (A.S Hornby, 1995) Subsidi: uang yang dihibahkan terutama oleh pemerintah atau

lembaga, kepada suatu industri atau pihak yang membutuhkan bantuan untuk mempertahankan harga dalam tingkat yang pantas.

Harvey S. Rosen membagi jenis-jenis subsidi ke dalam dua bagian besar yaitu *conditional grants* dan *unconditional grants* (Rosen, 1988: 524-530). Sedangkan Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave membaginya ke dalam *categorical grants*, *block grants* dan *general revenue sharing* atau ke dalam *matching* dan *non matching grant* serta *general* dan *selective grants* (Musgrave dan Musgrave, 1980:554-558). Kedua cara pengelompokan jenis bantuan tersebut pada hakekatnya sama.

J. B Kristiadi mengungkapkan bahwa grant dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yang berbeda yaitu: (1) *block grant*, (2) *conditional grant* dan (3) *matching grant*. *Block grant* merupakan subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya adalah bebas, tidak ada pengarahan dari pemerintah pusat. *Conditional grant* adalah subsidi-subsidi yang penggunaannya oleh pemerintah daerah dilakukan dengan pengarahan dari pemerintah pusat. *Conditional grant* diberikan karena ada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat selain ke dalam (intern) organisasi sendiri tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. *Matching grants* adalah kelanjutan dari *conditional grants*, yaitu bantuan/subsidi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang juga dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi di sini pemerintah pusat akan memberikan grants apabila pemerintah daerah juga menyediakan anggaran tertentu.

C. Konsep Kebijakan Publik

Kehidupan bernegara dalam suatu komunitas menghendaki adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau antara pemerintah dan rakyat. Pada dasarnya baik pemerintah maupun rakyat menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga terdapat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah merupakan wujud perwakilan rakyat, sehingga secara ideal keinginan pemerintah merupakan keinginan rakyat pula. Berpangkal dari perbedaan hak

dan kewajiban tersebut, pemerintah berhak mengatur serta rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut.

Aturan-aturan serta keinginan-keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan publik apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh pemerintah karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak sama besarnya.

Konsep kebijakan publik yang diberikan oleh Anderson (1979 : 46), yaitu "*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". ("Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah"). Jadi kebijakan publik timbul melalui serangkaian proses. Sedangkan pengertian proses adalah serangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan. Artinya, kebijakan publik tidak timbul secara mendadak, melainkan melalui suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan. Proses yang dilalui oleh 10 kebijakan publik merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan, yang setiap tahap dalam rangkaian prosesnya akan mempengaruhi tahap-tahap lainnya. Proses kebijakan publik melewati empat rangkaian tahap tindakan pemerintah. *Pertama*, tahap persepsi/definisi agregasi, organisasi, representasi, dan penyusunan agenda, yang merupakan tindakan membawa permasalahan pada pemerintah. *Kedua*, tahap formulasi, legitimasi, dan penganggaran, yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan langsung pemerintah untuk mengembangkan dan mendanai sebuah program. *Ketiga*, tahap implementasi atau pelaksanaan, adalah sebagai tindakan pemerintah untuk kembali pada permasalahan. *Keempat*, tahap evaluasi dan penyesuaian/terminasi, yang pada dasarnya adalah kembalinya program kepada pemerintah untuk dilakukan peninjauan kembali atau perubahan-perubahan bilamana diperlukan. Implementasi merupakan tahap terpenting karena sewaktu pelaksanaan kebijakan sering timbul masalah-masalah besar yang membatasi efektivitas kebijakan.

Secara harifah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata *policy science* (Dror, 1968: 6-8). Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah *public policy* dan *public policy analysis* dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Hal ini sejalan dengan pengertian "*public*" itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kata "*policy*" secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi *politia*, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (*Middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah (Dunn,1981:7). Dalam pengertian umum kata ini seterusnya diartikan sebagai, "...*a course of action intended to accomplish some end*" (Jones,1977:4) atau sebagai "...*whatever government chooses to do or not to do*" (Dye,1975:1).

Dunia pendidikan nasional sedang dihadapkan pada masalah yang sangat mendasar. Di satu sisi dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar menjadi wahana untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi manusia yang demokratis dan bertanggungjawab (**Buce J. Batjeran : 2005 : 202**). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kerja sama dari semua pihak.

D. Implementasi Kebijakan

1. Proses Perumusan Kebijakan

Menurut Linblom (1968) proses perumusan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Howlet dan Ramesh (1995 :11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*Policy Formulation*), yakni suatu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan (*Decesion Making*) yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan satu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) yakni suatu proses untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai hasil tertentu.
- e. Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*) yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil maupun kinerja kebijakan.

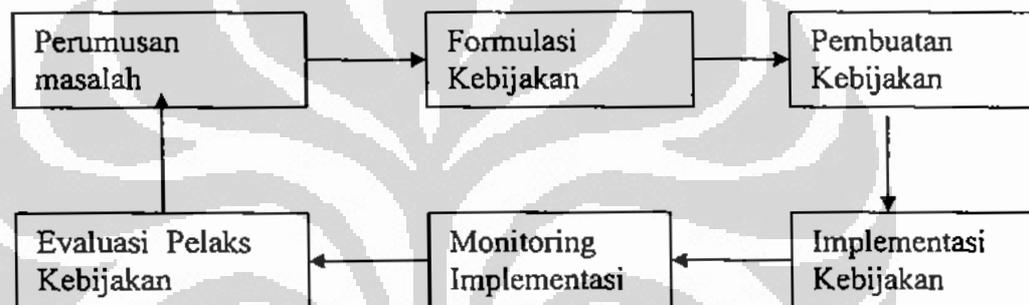
Don K Price menyebutkan bahwa proses perumusan kebijakan yang bertanggungjawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin- pemimpin organisasi , para administrator dan para politisi. Sedangkan Etzioni (1968) menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politikus) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan –tindakan dan tujuan-tujuan yang kongkrit.

Proses pembuatan kebijakan agar lebih mudah dipahami, para ahli mengembangkan model-model kebijakan publik. Paine dan Naumes menawarkan suatu model proses pembuatan kebijakan yang merujuk pada

model yang dikembangkan oleh David Easton. Model tersebut merupakan model deskriptif, karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan.

Adapun proses pembuatan kebijakan Subsidi BOS oleh Pemerintah Kota Tangerang dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 1
Alur Pembuatan Kebijakan Subsidi BOS
Pemerintah Kota Tangerang



Tahap perumusan masalah, adalah suatu tahapan yaitu mengidentifikasi dan menyerap tuntutan dan kebutuhan masyarakat umum, dalam hal ini mahalnnya biaya pendidikan. Selanjutnya melakukan pilihan-pilihan kebijakan (tahap formulasi kebijakan) yang sesuai dan realistis. Tahap pembuatan kebijakan adalah proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan. Tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaan tersebut dilakukan monitoring secara sistematis dan bertanggungjawab. Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika terdapat hal-hal yang menyimpang, maka dirumuskan kembali permasalahan untuk diadakan perbaikan.

1.1. Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan

Perihal aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat diikuti tulisan Anderson (1979), Charles Lindolom (1980) dan Lester dan Stewart, Jr (2000), adalah bahwa pemeran dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan

para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk dalam pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi) misalnya gubernur, bupati, legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi misalnya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, partai politik, dan warga negara secara individu.

Badan-badan administrasi sering terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini berkait erat dengan pemahaman kebijakan sebagai apa yang dilakukan pemerintah mengenai masalah tertentu. Dengan pemahaman yang demikian, maka keterlibatan badan-badan administrasi sebagai agen pemerintah dalam ikut menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka.

Aktor-aktor yang terkait dalam perumusan kebijakan publik terutama kebijakan pemberian subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan antara lain adalah : Walikota, anggota DPRD, Kepala-kepala Dinas, Para Pakar (Akademisi) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Walikota mendapat masukan dari para kepala dinas dan masyarakat kemudian memformulasikan dan menyusun rancangan kebijakan. Selanjutnya rancangan kebijakan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan. Dalam melakukan pembahasan DPRD mengundang para pakar dari perguruan tinggi maupun LSM untuk memberikan pandangan dan masukan.

Setelah melalui pembahasan yang panjang lebar di tingkat DPRD, rancangan kebijakan direkomendasikan kepada walikota untuk ditetapkan sebagai kebijakan Walikota Kota Tangerang Selatan. Sebelum secara divinitif ditetapkan sebagai suatu kebijakan pemerintah kota, rancangan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini untuk membuka ruang koreksi oleh masyarakat dan melihat dampak sosial yang akan ditimbulkan dengan adanya kebijakan Subsidi BOS tersebut. Setelah kebijakan ditetapkan maka disusunlah petunjuk-petunjuk teknis untuk kelancaran dalam implementasinya.

1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perumusan Kebijakan

Para pembuat kebijakan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi, seperti badan-badan administrasi, perusahaan-perusahaan, menggunakan banyak imbalan dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya untuk bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan. Keputusan bisa diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan misalnya keinginan agar organisasi tetap survival, memperluas program bahkan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa.

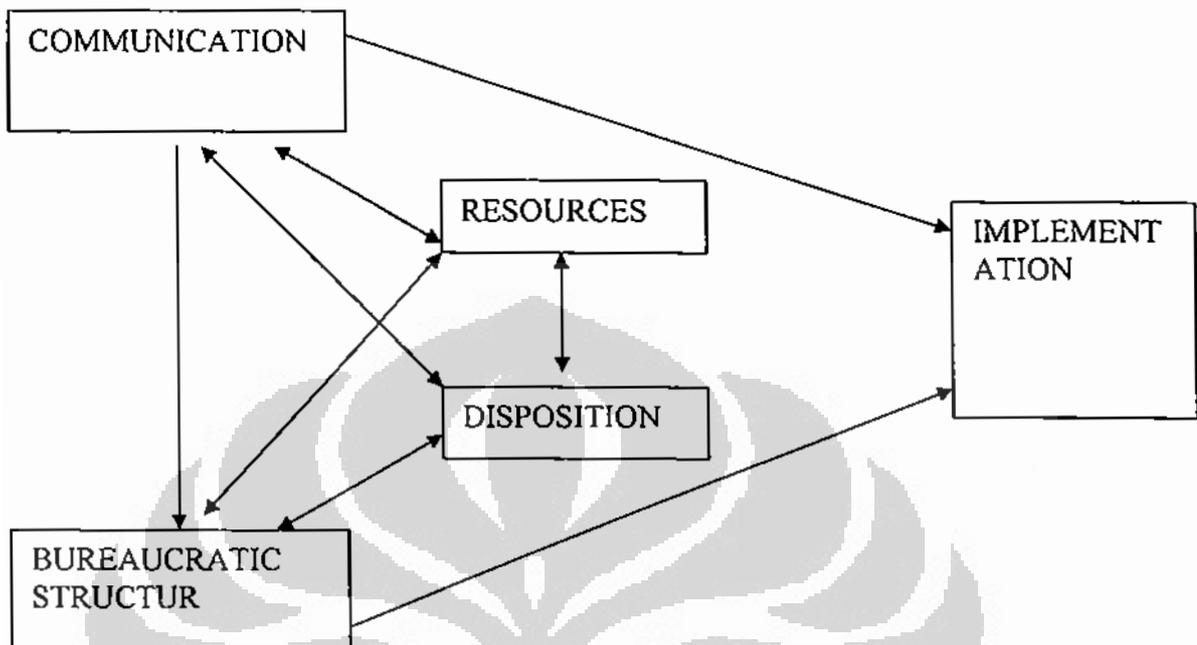
Faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan. Persepsi dasar akan adanya kepentingan masyarakat yang harus didahulukan akan membuat kebijakan publik lebih diterima oleh masyarakat (Dwijowijoto, 2003 : 159).

2. Implementasi Kebijakan

Edward III (1980: 1) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut sangat mungkin mengalami kegagalan walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Sebaliknya suatu kebijakan yang dianggap baik juga akan mengalami kegagalan jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Unsur yang harus diperhatikan atau dikaji dalam implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III diklasifikasikan menjadi empat, yaitu : *communication, resources, dispositions*, serta *bureaucratic structure* (Edwards III, 1980, hal.11). Secara operasional faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menurut Edwards III dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2
Pengaruh Elemen-elemen dalam Implementasi



2.1 Communication (Komunikasi)

Yang dimaksudkan komunikasi di sini adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut berisi tentang tujuan, hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Komunikasi harus terbangun dengan baik antara pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah *transmission* (cara penyampaian), informasi; *clarity* (kejelasan) informasi; serta *consistency* (konsistensi) dalam penyampaian informasi.

Jika suatu pesan atau informasi disampaikan dengan cara yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) yang berakibat pada kegagalan pelaksana dalam menterjemahkan kebijakan di lapangan. Atau dengan kata lain pesan yang dikirimkan oleh pembuat kebijakan dilaksanakan menyimpang dari yang diinginkan. Menurut Edwards III distorsi ini disebabkan oleh praktek komunikasi *indirect* (tidak langsung). Informasi yang melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi, dan keengganan

para pelaksana untuk mengetahui lebih lengkap pesan yang disampaikan dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi.

Jika komunikasi telah terbangun dengan baik, maka kejelasan pesan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Cara yang benar dan efisien dalam menyampaikan informasi bukan suatu garansi bahwa informasi akan dipahami dengan baik oleh si penerima pesan. Maka dari itu, pesan harus jelas (*clarity*), mudah dipahami dan diimplementasikan. Kejelasan tidak identik dengan informasi yang berlebihan. Justru informasi yang berlebihan kadang-kadang akan mengaburkan kejelasan. Informasi yang berlebihan, Edwards III menyebutnya *overly specific instructions*, menghilangkan fleksibilitas (kreativitas) yang akhirnya membuat kebijakan berjalan kaku.

Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan cara yang tepat, mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut tidak ada konsistensi antara butir perintah yang satu dengan yang lainnya, maka akan membuat bingung para pelaksana kebijakan. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan dengan penafsirannya sendiri-sendiri.

Komunikasi disini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja penyampaian program kerja kepada struktur organisasi pelaksana. Tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warga sekolah dan masyarakat. Hal ini lazimnya disebut sosialisasi.

Menurut Edwards III (1980:125), dalam hal komunikasi, para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Untuk dapat mengetahui dengan baik, maka perintah yang mereka terima (baik yang dituangkan dalam keputusan-keputusan maupun dasar hukum lainnya) haruslah jelas. Ketidakjelasan informasi tentu saja membawa akibat bagi hasil pelaksanaan kebijakan. Selain tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan informasi juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi (*unanticipated change*).

2.2. Resources (Sumber-sumber)

Sumber-sumber ini meliputi sumber – sumber yang dapat mendukung implementasi kebijakan dengan. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumber-sumber pendukung, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Yang termasuk sumber-sumber tersebut antara lain staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian serta keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan, adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana .

Edwards III (1980:53) mengemukakan bahwa implementasi akan dapat berjalan efektif, apabila aparat pelaksana mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan mengaktualisasikan rencana/program kedalam bentuk pelayanan publik. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Selain staf atau birokrat yang memiliki kualitas dan kuantitas memadai, informasi merupakan sumber daya yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi yang dimaksudkan adalah terutama tentang cara dan data yang dapat mendukung implementasi dengan baik. Kadang-kadang pelaksana tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang bagaimana suatu kebijakan harus diimplementasikan. Hal ini akan dapat mengakibatkan implementasi suatu kebijakan tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, karena pelaksanaan menafsirkan cara sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah. Masalah lain yang menghambat implementasi bisa juga disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai data pendukung yang valid. Jika hal ini berkaitan dengan pemberian subsidi berupa uang atau barang, maka jika data yang diperoleh terlalu banyak akan terjadi pemborosan, sebaliknya jika berdasarkan informasi data yang diperoleh terlalu jauh lebih sedikit, dapat menimbulkan kekacauan.

Sumber daya berikutnya adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan /mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Menurut Lindblom dalam (Winarno, 2004, hal.137), sebab-sebab kewenangan terdiri dari dua hal pokok, yakni: *pertama*, sebagian orang beranggapan bahwa mereka lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. *Kedua*, kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, terror, dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya.

Selain hal-hal tersebut di atas, sumberdaya lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Hampir tidak ada implementasi kebijakan yang tidak memerlukan sarana dan prasarana serta keuangan. Sumber daya keuangan (*financial*) merupakan faktor penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Semakin tinggi dukungan dana dari pemerintah, semakin baik implementasi kebijakan, demikian pula sebaliknya, semakin kecil dukungan financial bagi suatu kebijakan, akan dapat menjadi penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya ini bukan satu-satunya, akan tetapi hampir dipastikan kesulitan-kesulitan besar akan dihadapi jika dalam suatu implentasi kebijakan tidak disediakan sumber daya tersebut. Masalah-masalah yang ada pada akhirnya akan menghambat dan bahkan menjadi faktor dominal kegagalam dalam implementasi suatu kebijakan.

2.3 Dispositions (Kepribadian/pandangan)

Yang dimaksud *Dispositions* adalah kepribadian/ pandangan pelaksana dalam implementasi kebijakan publik. Maka itu, di sinilah manfaatnya jika dalam penerimaan pegawai iperlukan seleksi yang menyangkut kepribadian dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan-pandangan dari calon pegawai terhadap suatu kebijakan maupun tugas tertentu. Disposistion ini menjadi penting karena sangat berkaitan dengan bagaimana pelaksana menyikapi kebijakan dan kecenderungan apa yang akan terjadi dalam implementasinya.

Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan *dispositions*. Yaitu penempatan staff (pegawai) dan pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan. Pembuat kebijakan harus menyusun atau menempatkan staf-stafnya dalam organisasi pelaksana demi menjamin terlaksananya kebijakan. Mereka harus dipilih yang tepat, loyal dan berkepribadian baik. Sementara perlu diberikan insentif pada tingkat kecukupan/kepantasan yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan.

2.4 Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah keseluruhan jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai yang berstatus pegawai negeri maupun non pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya); serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya. Sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Bila dikaitkan dengan kompleksitas, semakin kompleks struktur pengambilan keputusan di dalam organisasi, semakin banyak perantara yang dilalui dalam melaksanakan kebijakan, akan semakin sulit implementasi dari suatu kebijakan.

Berkaitan dengan struktur birokrasi, menurut Edwards III, ada dua karakteristik utama birokrasi yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) atau prosedur standar pelaksanaan dan fragmentasi. SOP merupakan rutinitas-rutinitas yang memungkinkan para pejabat publik membuat sejumlah besar keputusan umum sehari-hari, dan SOP merupakan jawaban terhadap terbatasnya waktu dan sumber-sumber daya pelaksanaan organisasi yang kompleks dan beragam. Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu daerah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. SOP dan fragmentasi dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumbernya, meningkatkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan,

menghambat koordinasi, membingungkan para pejabat di tingkat bawah dan sebagainya.

Sedangkan menurut *Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier*, Definisi Implementasi Kebijakan adalah "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian"

Tentang model proses implementasi kebijakan, Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa model proses implementasi kebijakan menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasinya serta menghubungkannya dengan isu kebijakan melalui suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan performance kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Budi Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik (2002,67). Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tahap siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama-sama dan simultan untuk melaksanakan kebijakan agar dampak dan tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik.

Menurut Dwijowojoto (2003:158) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program maupun melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan praktis, sedangkan formulasi kebijakan bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai

tercapainya hasil kebijakan itu sendiri (Dunn, 1998). Dengan kata lain implementasi kebijakan merupakan tataran praktis dari sebuah kebijakan. Terdapat beberapa bagian yang dapat diajukan untuk dinilai dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan publik, yaitu output kebijakan, dampak nyata dari kebijakan, dan peraturan perundangan yang biasanya bersifat politis.

3. Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari proses kebijakan. Evaluasi dilakukan karena dirasakan bahwa tidak semua kebijakan dapat meraih hasil yang diinginkan. Oleh karena itu evaluasi bukan langkah terakhir dari proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan mencapai dampak yang diinginkan (James P Lester dan Joseph Stewart, 2000, 125). Oleh Jones (1984 : 199) pengertian evaluasi kebijakan disederhanakan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan menilai manfaat suatu kebijakan.

Agar evaluasi kebijakan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, maka suatu evaluasi kebijakan harus mencakup beberapa kegiatan yaitu pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis dan rekomendasi (Jones, 1984 : 199). Spesifikasi merupakan kegiatan yang meliputi identifikasi tujuan atau kriteria dari mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi. Pengukuran menyangkut aktivitas pengumpulan informasi yang relevan untuk obyek evaluasi, sedangkan analisis adalah penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun kesimpulan.

E. Hakikat Pembiayaan Pendidikan

Teori Taksonomi Pendidikan mengajarkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak terletak pada tiga pihak, yaitu pada pemerintah, sekolah dan masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan system pendidikan, sekolah secara

teknis mengajarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan kepada siswa, serta masyarakat sebagai lingkungan di mana anak didik tinggal, maka bertanggung jawab membentuk kepribadian yang diharapkan sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlaku (Ocih Setyasih : 2005: 5). Tanggung jawab ini tentu saja termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan – baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif – biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut Niron D (2000 : 10) yang dimaksud pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sedangkan Sudjud A (2002 : 36) mengartikan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan guna terselenggaranya proses pendidikan yang diinginkan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, yang dimaksud masyarakat adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua murid dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan

yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Nanang Fatah, 2004, 23)

Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut "Income Forgone" yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti study. Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMA, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah,gaji) selama tiga tahun belajar di SMA harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah, pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan. Semua pembiayaan diarahkan untuk kelancaran tugas dan memaksimalkan fungsi sekolah.

Pada paradigma lama , tugas dan fungsi sekolah hanya melaksanakan program dan bukan mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sedang dengan paradigma baru,

sekolah memiliki wewenang lebih besar mengelola lembaganya , mengutamakan basis profesionalisme dari pada basis birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh kemandirian dari pada diatur oleh pihak luar.

Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Perencanaan Program, yang meliputi :

a. Visi Sekolah

Sekolah/madrasah wajib merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.

b. Misi Sekolah

Misi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi harus mampu memberikan motivasi, inspirasi, dan kekuatan pada setiap warga sekolah.

c. Tujuan sekolah

Sekolah harus merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya. Tujuan sekolah antara lain berisi tentang gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam jangka waktu menengah dan panjang. Di samping itu harus relevan dengan visi dan misi serta kebutuhan masyarakat, mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, serta disosialisasikan pada masyarakat luas.

d. Rencana kerja sekolah

Rencana kerja sekolah adalah rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja jangka menengah.

Rencana kerja jangka menengah dan tahunan harus disetujui oleh dewan pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah.

2. Pelaksanaan rencana kerja sekolah, meliputi :

a. Pedoman sekolah

Sekolah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait. Perumusan pedoman yang dimaksud harus mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut.

Pedoman pengelolaan sekolah meliputi : kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender pendidikan, struktur organisasi, pembagian tugas guru dan karyawan, peraturan akademik, tata tertib sekolah, kode etik sekolah dan biaya operasional sekolah.

Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional dan harus dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

b. Struktur Organisasi sekolah

Struktur organisasi berisi tentang system penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Semua pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas

c. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

Kegiatan sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggungjawab kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapatkan persetujuan melalui dewan pendidik dan komite sekolah.

d. Bidang Kesiswaan

Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Bidang kesiswaan juga bertanggungjawab dalam pengorganisasian layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan prestasi unggulan dan kegiatan yang berhubungan dengan alumni.

e. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

Kurikulum yang diberlakukan di jenjang SMP sekarang ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum tersebut disusun oleh sekolah masing-masing dengan berpedoman pada standar isi dan standar proses yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Tugas bidang kurikulum adalah mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan KTSP antara lain : kalender pendidikan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, program kegiatan sekolah, evaluasi pembelajaran, peraturan akademik, dan lain-lain.

f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah harus menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan standar tenaga pendidik dan kependidikan, dan kondisi sekolah. Selain itu harus dilakukan pembagian tugas secara jelas, menentukan system penghargaan, pengembangan profesi, dan mengantisipasi jika terjadi kekurangan tenaga.

Beberapa bentuk kegiatan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan antara lain : promosi kenaikan pangkat maupun jabatan, pengembangan sesuai dengan kemampuannya, mutasi dan penempatan/pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuannya.

g. Bidang Sarana dan Prasarana

Sekolah menetapkan program secara mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Program tersebut harus mengacu pada standar sarana dan prasarana dalam hal : perencanaan, evaluasi, jumlah, skala prioritas, dan pemeliharaan.

Yang termasuk dalam sarana dan prasarana ini antara lain : gedung sekolah, tanah, perpustakaan, laboratorium, buku, alat peraga,

komputer dan lain-lain. Semua harus dimanfaatkan, dikelola dan dirawat secara sistematis, dituangkan dalam rencana pokok dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.

h. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi mengatur tentang : sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola.

i. Budaya dan Lingkungan Sekolah

Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan kondisi yang dimaksud tersebut maka sekolah harus membuat tata tertib, kode etik dan himbauan kepada pihak lain agar turut menghargai sekolah.

j. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

Sekolah melibatkan warga dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah baik dalam pendanaan, kelestarian lingkungan, bidang akademik maupun non akademik.

F. Mutu Pendidikan

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan (Arcaro, 2006: 57). Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Rohiat, 2009: 52). Mutu memiliki peranan yang sangat menentukan dalam hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan. Sama halnya dengan mutu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, mutu dalam bidang pendidikan juga penting untuk diperhatikan. Mutu pendidikan berupaya untuk memberikan kemudahan akses, keadilan dan pemerataan.

Sallis mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan, diantaranya adalah sarana dan prasarana, SDM, teknologi dan kepemimpinan.

“Ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif”.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Rohiat, bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, mulai dari kondisi awal, masukan (*input*), aktivitas (*process*), manfaat (*outcome*), keluaran (*output*) hingga pada dampak (*impact*), pendapat Danim (2006: 53) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi mutu pendidikan berikut:

“Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumberdaya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hasil pendidikan dikatakan bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu”

Masukan (*input*) pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumberdaya, harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, proses dimaksud adalah mengkoordinasikan dan menserasikan serta memaduan masukan (*input*) secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan

situasi pembelajaran yang menyenangkan. Keluaran (*output*) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan (Danim, 2006: 54).

Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa mutu pendidikan dapat diwakili melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut: (1) dari segi masukan (*input*), dapat dilihat dari kualitas penerimaan (*enrollment*) siswa baru, kompetensi guru, sarana prasarana/peralatan, metode pembelajaran/kurikulum, peraturan yang relevan sebagai acuan, dan harapan-harapan, (2) segi aktivitas (*process*) adalah motivasi dan minat belajar siswa, pemberdayaan (kemandirian) siswa, situasi belajar yang kondusif, dan (3) dari segi keluaran (*output*) adalah prestasi akademis dan non akademis siswa.

G. Penelitian Terdahulu

1. **Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun (Tesis, Sukardi Weda , Universitas Indonesia, 2006)**
(Studi Evaluasi Program BOS pada SDN 07 dan SDN 09 di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat)

Sebagai upaya menghindari terjadinya putus sekolah (*drop out*) sebagai fenomena sosial dan sulitnya memperoleh akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sebagai dampak kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) maka Pemerintah menggulirkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Program BOS telah memasuki tahun kedua dan untuk melihat tingkat efesiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka diadakanlah penelitian. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS ? (ii) bagaimana efesiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program ?, (iii) bagaimana efektifitas

program BOS terhadap keringan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa ?, (iv) bagaimana dampak program BOS terhadap peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar 9 tahun , dan (v) bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS ?

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui kondisi awal sebelum pelaksanaan program BOS , (ii) mengetahui efisiensi program BOS dalam pendayagunaan sumber daya program , (iii) mengetahui efektifitas program BOS terhadap keringanan dan pembebasan biaya operasional sekolah kepada siswa , (iv) mengetahui dampak program BOS terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun (v) mengetahui .Dampak program BOS untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun dan (iv) mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BOS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung oleh pendekatan kuantitatif .Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian evaluasi , dan jenis penelitian evaluasi yang digunakan adalah Analisis Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework Analysis/LFA*). Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah,guru,komite sekolah , dan respondennya adalah siswa mampu dan siswa tidak mampu , serta orang tua mampu dan orang tua tidak mampu. Pengambilan sample dilakukan dengan cara teknik penarikan sampel probabilitas yakni secara “ Teknik random atas dasar strata yang proposional” (*proportional stratified random sampling*) dan sensus. Teknik sampling digunakan untuk menarik sample dari populasi orang tua siswa dan siswa. Sedangkan sensus dilakukan untuk kepala sekolah , guru, komite sekolah , orang tua dan siswa tidak mampu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam observasi , dokumentasi dan audiovisual.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (i) sebelum ada program BOS, orang tua siswa cukup antusias untuk menyekolahkan anak-anak mereka , dan sebelum ada BOS siswa tidak mampu tetap dapat memperoleh akses pendidikan dasar melalui subsidi silang, orang tua mampu membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, (ii)

profesionalitas dan kualitas para staf yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS cukup baik, struktur organisasi dan manajemen BOS cukup baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai prinsip administrasi dan manajemen organisasi yang baik, (iii) manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui program BOS adalah adanya pembebasan biaya operasional kepada siswa tidak mampu. Keringanan biaya operasional sekolah kepada siswa yang lain dan tersedianya akses pendidikan dasar 9 tahun, (iv) Dampak positif yang dirasakan oleh siswa adalah peningkatan prestasi, motivasi dan kepercayaan siswa dan siswa dapat terhindar dari putus sekolah. Dampak negatif program adalah adanya ketergantungan sekolah terutama sekolah yang tergolong kaya dan percontohan, dana BOS yang jumlahnya relatif kecil dianggap tidak dapat mencukupi pembiayaan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan (v) Faktor-faktor pendukung program dari sisi internalnya adalah: SDM yang mengelola BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi internalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi eksternalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, alokasi dan BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dan BOS.

2. Konsistensi Alokasi Anggaran Sekolah Terhadap Kebutuhan Riil dan komitmen Arah Pendidikan (Tesis, Rian Ardiwibowo, Universitas Indonesia, 2005)

Kebijakan nasional di bidang pendidikan menengah adalah 1) Peningkatan Akses dan daya tampung, 2) Peningkatan mutu dan relevansi

pendidikan , serta 3) Peningkatan efisiensi dan manajemen pengelolaan pendidikan.

Sehubungan dengan diberikannya kewenangan sekolah dalam menentukan program kerja dan anggaran pelaksanaan tugas dibidang pendidikan maka perlu dilakukan kontrol terhadap implementasinya. Hal ini perlu untuk menghindari terjadinya ekkses yang tidak menunjang tercapainya pengembangan pendidikan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk : a) Memperoleh gambaran dan jawaban dari masing-masing sekolah sample, apakah terjadi konsistensi antara pola penganggaran yang disusun sekolah dengan komitmen arah pendidikan para stakeholders dan ekbutuhan riil sekolah dalam pelayanan masyarakat di bidang pendidikan , b) Menguji keterbacaan serta efektifitas instrumen, terhadap 4 sekolah sample , untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran , komitmen dan kebutuhan riil, serta c) Memformulasikan instrumen yang lebih efektif untuk membantu sekolah dalam menentukan konsistensi antara anggaran , komitmen dan kebutuhan riil.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1). Komitmen Program Pendidikan dari para stakeholder.

Dari tempat sekolah sample penelitian , semua memiliki komitmen yang sama , Berturut-turut adalah peningkatan akses dan daya tampung . Dalam program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efesiensi dan manajemen pengelolaan sekolah, pembenahan SDM sebagai alternatif kegiatan yang di prioritaskan . Sedangkan program peningkatan akses dan daya tampung, double shift merupakan alternatif kegiatan yang paling tidak dikehendaki.

2). Kebutuhan Riil Sekolah

Dari empat sekolah sample penelitian , tiga sekolah telah terpenuhi kebutuhan utamanya dalam proses pembelajaran maupun kebutuhan penunjang . Tetapi animo lulusan SLTP yang sangat besar tidak disikapi dengan program peningkatan akses dan daya tampung secara serius. Satu

sekolah kurang dapat konsisten dalam pemenuhan kebutuhan riil dan kimitmen dari para *stakeholders*.

3). **Konsisten Anggaran Sekolah**

Dari empat sekolah sample tiga sekolah mampu melakukan alokasi anggaran cukup konsisten dalam mendukung komitmen para *stakeholders*, maupun dalam pemenuhan kebutuhan riil .Satu sekolah kurang dapat mengalokasikan anggaran secara konsisten dalam pemenuhan kebutuhan riil, hal ini berkaitan dengan aliran dana ke pihak ketiga, sebagai suatu kewajiban yang cukup besar jumlahnya.

4). **Sumber Pendanaan**

Dari komitmen para *stakeholders* , dalam hal pencarian sumber dana untuk mebiayai pelaksanaan program kerja sekolah diperoleh kesimpulan: 3 sekolah (NE, NN dan SN) harapan utama sumber dana dari pemerintah , kemudian disusul dari siswa dan terakhir berharap dana donator. Sedangkan 1 sekolah (SE), harapan utama sumber dana dari siswa, disusul dari donator dan terakhir pemerintah.

Instrumen Penelitian:

Hasil utama dari penelitian ini berupa instrumen perencanaan program dan anggaran sekolah yang riil dan partisipatif, disertai dengan soft ware pengolahan data..Instrumen penelitian terdiri dari tiga jenis :1) Instrumen penjarangan komitmen para *stakeholders*, 2) Form pendataan profil dan kebutuhan riil sekolah , 3) Form posting alokasi anggaran sekolah.

Rekomendasi :

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :

1. Mengaplikasikan instrument dan software pendukungnya kepada sekolah agar diperoleh hasil berikut :
 - Bagi sekolah , untuk melakukan evaluasi sekaligus pedoman arah terhadap konsistensi antara komitmen arah program pendidikan , kebutuhan riil dan anggaran yang disusun sekolah.
 - Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam pembinaan sekolah yang bersumber dari para *stakeholders* dilingkungan sekolah (bottom up).

- Masyarakat, sebagai sarana ikut berpartisipasi dan control kepada sekolah dalam penentuan program pendidikan.
2. Dalam kapasitas sebagai pembuat standard dan norma, peran pemerintah dalam ikut mengontrol alokasi anggaran sekolah adalah dengan memberikan rambu-rambu terhadap standar pembiayaan yang harus dimunculkan dalam RAPBS.
 3. Sebagai pertimbangan pengalokasian bantuan (Block Grant) agar lebih tepat sasaran bagi sekolah.
 4. Diperlukan uji coba kepada lebih banyak lagi sekolah dengan memperhatikan berbagai keragaman.
 5. RAPBS diharapkan implementatif dalam pelaksanaan program tahunan sekolah beserta pembiayaannya.
- 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Akses Terhadap Pendidikan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Lembaga Penelitian SMERU: 2006)**

Sebagai salah satu lembaga penelitian, SMERU telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program BOS kaitannya dengan akses terhadap pendidikan dasar bagi masyarakat miskin. Pada awalnya sebelum program BOS diselenggarakan, pemerintah telah melaksanakan program Bantuan Khusus Murid (BKM). Menyusul pengurangan bantuan subsidi secara drastis pada bulan Maret dan Oktober tahun 2005, maka pemerintah melakukan perubahan konsep dan rancangan PKPS-BBM bidang pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun dengan mengubah BKM menjadi BOS.

Salah satu hasil penelitian, dari 32 sekolah yang penerimaan dari iuran bulanan siswanya (tidak termasuk penerimaan dari siswa baru) sebelumnya lebih kecil dari BOS, hanya enam sekolah (20%) yang memberikan bantuan biaya transport kepada siswa miskin. Bahkan, satu sekolah diantaranya menyediakan biaya transport untuk semua siswa – tidak hanya siswa miskin- yang rumahnya agak jauh dari sekolah dan membutuhkan biaya transportasi. Sementara itu, dari 11 sekolah lain yang penerimaannya dari iuran sekolah lebih besar dari BOS dan seharusnya

membebaskan siswa miskin dari iuran sekolah. hanya lima sekolah (45%) yang melakukannya.

Meskipun hanya sebagian kecil siswa miskin yang mendapat bantuan khusus dari sekolah dengan adanya BOS, bisa dikatakan semua siswa, termasuk siswa miskin, mendapat manfaat dari program ini, di antaranya berupa pengurangan atau bahkan pembebasan iuran sekolah. Dari 43 sekolah penerima BOS yang menjadi sampel kajian ini, setidaknya 22 sekolah telah membebaskan iuran siswa, selebihnya ada yang mengurangi iuran siswa, dan ada sejumlah kecil sekolah lainnya yang belum mengurangi iuran siswanya tetapi memberikan manfaat lain bagi siswa dalam bentuk penyediaan buku pelajaran pokok dan penunjang.

Dari uraian di atas terlihat adanya potensi BOS untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin atau bagi anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin. Namun dalam pelaksanaannya, hal tersebut belum dirumuskan secara tegas dalam tujuan program dan serta kurang ditekankan dalam sosialisasi. Demikian pula halnya dengan pencegahan putus sekolah karena alasan ekonomi, yang sama sekali tidak dicantumkan dalam juklak program. Meskipun demikian, seiring dengan pelaksanaan program, tampaknya pihak penyelenggara mulai membenahi hal tersebut seperti terlihat dalam perumusan tujuan program dalam juklak program BOS tahun 2006. Agar program BOS benar-benar mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar, perumusan tujuan yang lebih jelas ini, tentunya masih perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan pengawasan bagi sekolah dan masyarakat.

H. Operasionalisasi Konsep

Efektivitas program dan implementasinya dinilai tidak hanya dari keberhasilan program dan implementasi tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkannya. Akan tetapi juga adanya perubahan-perubahan pada kelompok sasaran yang mengiringinya. Meningkatnya mutu pendidikan merupakan salah satu perwujudan manfaat dari program Subsidi BOS. Dengan

demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka mengetahui efektivitas implementasi Subsidi BOS, maka dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) aspek substansi meliputi variabel yang menjadi target program salah satunya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dan (2) aspek manajerial yaitu sejauhmana program Subsidi BOS dikelola dan diimplementasikan.

Tabel 1.
OPERASIONALISASI KONSEP

No	Faktor-Faktor yang Diamati	Indikator	Komponen Indikator	Standar Pencapaian
1	Implementasi Program (Subsidi BOS) menurut Edward III	1.Communication (Komunikasi) 2.Resources (Sumber-sumber) 3.Dispositions (Kepribadian) 4.Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)	1.1 efektifitas dan efisiensi 2.1 staff, informasi, authority, fasilitas 3.1 nilai-nilai 4.1 struktur organisasi 4.2 karakteristik organisasi 4.3 SDM	- komunikasi yang cepat, akurat dan efisien - staf yang berkualitas -dikembangkannya nilai-nilai yang baik dan bertanggungjawab -struktur yang efisien -yang bekerja untuk kepentingan masyarakat -SDM yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya
2	MASUKAN (INPUT) PROGRAM SUBSIDI BOS	Sumber daya, yang termasuk di dalamnya adalah: - Staff (SDM) - Facility (Peralatan) - Informasi - Peraturan yang terkait - Harapan para pihak terkait	-tersedianya SDM yang memadai -tersedianya fasilitas pendidikan yang mendukung -peraturan dan informasi yang jelas dan dipahami	-SDM yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya -tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai di masing-masing sekolah -dipahami dan dilaksanakannya peraturan yang ditetapkan
3.	PROSES PROGRAM/IMPLEMENTASI	Indikatornya adalah : kesesuaian antara implementasi dengan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis program	-efektifitas dan efisiensi dalam implementasi subsidi BOS -penanggulangan hambatan yang dihadapi	-pengelolaan subsidi BOS yang efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan

				meringankan beban orang tua siswa
4.	KELUARAN (OUTPUT) PROGRAM	Indikatornya adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Dana - APK dan APM - Ketuntasan Wajar 9 th - Mutu Pendidikan - Tersedianya fasilitas - Meringankan beban pendidikan bagi orang tua siswa 	<ul style="list-style-type: none"> - input (kualitas siswa, kompetensi guru, metode pembelajaran /kurikulum, sarana prasarana/peralatan) - proses (kegiatan pembelajaran yang melibatkan kompetensi guru, sarana dan prasarana) - output (prestasi akademis dan non akademis siswa) - meningkatnya APK dan APM - tuntasnya Wajar 9 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - diperoleh input (kualitas siswa, kompetensi guru, metode pembelajaran /kurikulum, sarana prasarana/peralatan) yang menunjang - proses (kegiatan pembelajaran yang melibatkan kompetensi guru, sarana dan prasarana) yang berkualitas - output (prestasi akademis dan non akademis siswa) yang tinggi - meningkatnya APK dan APM - tuntasnya Wajar 9 tahun

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Metode dan Strategi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol.

Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah SMP di wilayah Kota Tangerang Banten. Berdasarkan variabel yang diteliti dan masalah yang dirumuskan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif.

Data yang dibutuhkan untuk dapat mendiskripsikan kebijakan dan implementasi subsidi BOS dikelompokkan menjadi dua varian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber di lapangan secara langsung melalui wawancara maupun angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan-catatan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pemilihan metode ini dilatarbelakangi beberapa alasan sebagai berikut : (1) Berdasarkan judul, permasalahan dan tujuan yang ingin penulis ketahui , kasus yang ada bersifat lokal, sehingga tidak bisa digeneralisir terhadap masalah yang sama di tempat/daerah lain. Maka metode yang tepat adalah metode kualitatif. (2) Judul pada penelitian ini tidak mengandung variabel bebas (*independen*) maupun variabel terikat (*dependen*), sehingga tidak diperlukan pengujian terhadap korelasi antar variabel. Dengan demikian metode yang relevan adalah metode kualitatif , yaitu mendiskripsikan hasil temuan apa adanya dan tidak memberikan justifikasi maupun menetapkan besarnya korelasi antar variabel. (3) Penelitian ini tidak menguji kebenaran hipotesis, maka metode yang sesuai adalah diskriptif kualitatif. Yaitu menjelaskan hasil

temuan apa adanya. (4) Penelitian ini mengacu pada *contexs of discovery*, dan bukan *contexs of justification*, sehingga tidak menguji teori yang berkaitan dengan masalah –masalah penelitian, melainkan mengharapkan penemuan sesuatu untuk menggambarkan keadaan, fakta-fakta sebagaimana adanya. (5) Secara praktis, baik judul maupun permasalahan dalam penelitian ini relevan dengan latar belakang pekerjaan saya. Sehingga temuan/fakta-fakta di lapangan , saya harapkan dapat membantu meningkatkan profesionalitas kerja.

B. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Studi literatur, yaitu mengkaji berbagai bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian ilmiah, formulasi kebijakan dan lain-lain.
2. Wawancara, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang diyakini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan program subsidi BOS. Misalnya kepala sekolah, guru, staf administrasi dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kantor Walikota, Kantor Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan terhadap beberapa tokoh serta anggota masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten.

Jumlah SMP yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah 124 buah, yang terdiri dari 17 SMP Negeri dan 107 SMP Swasta. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara yang mendalam terhadap kepala sekolah, guru dan staf administrasi. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan dana BOS, karena mereka adalah pihak yang menerima, mengelola dan bertanggungjawabkan dana subsidi BOS tersebut. Selain kepala sekolah, guru juga memiliki peranan yang relevan dengan implementasi subsidi BOS karena mereka mengelola kegiatan di lapangan, (terutama adalah guru yang membidangi kegiatan kesiswaan), dimana kegiatan tersebut dibiayai oleh dana BOS maupun dana subsidi BOS. Dengan

demikian minimal satu orang guru untuk setiap sekolah perlu didengar informasinya sebagai bahan pembandingan. Disamping kepala sekolah dan guru, staf administrasi yang secara teknis sebagai bendahara sekolah juga memiliki data yang berkaitan dengan arus pengeluaran dana BOS maupun subsidi BOS. Setidaknya satu orang staf administrasi perlu diberikan angket untuk menggali informasi yang terutama berkaitan dengan arus dana dan teknik pelaporan. Jadi setiap satu sekolah (SMP) terdapat 3 (tiga) orang responden, yaitu seorang kepala sekolah, seorang guru (pembina kegiatan kesiswaan) dan seorang staf administrasi/bendahara sekolah.

Selain terhadap Kepala Sekolah, Guru dan Bendahara/Staf tata usaha, wawancara secara mendalam juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang relevan dengan masalah subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan implementasinya. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah: tokoh/pengamat pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota DPRD, Kepala Dinas Pendidikan dan Walikota Tangerang Selatan, dan lain-lain.

Tokoh/pengamat pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dianggap relevan sebagai responden karena mereka memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Selain itu mereka sering mengkritisi kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan agar sesuai dengan tuntutan dan kemampuan masyarakat. Dengan demikian mereka memiliki data dan pengetahuan tentang perkembangan pendidikan di Kota Tangerang Selatan yang layak sebagai bahan pembandingan oleh peneliti untuk memperkaya perspektif dalam melihat subsidi BOS dan implementasinya pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan.

DPRD adalah lembaga formal yang memiliki peranan controlling, budgeting dan legislating, maka lembaga ini sangat relevan menjadi responden. Dalam fungsi legislasi, mereka bersama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan membahas setiap peraturan daerah dan kebijakan lain yang akan diberlakukan. Di samping itu banyak keputusan kepala daerah yang dikonsultasikan kepada DPRD. Dengan demikian banyak informasi yang berhubungan dengan subsidi BOS yang dapat diperoleh dari lembaga ini.

Kepala Dinas Pendidikan adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan, termasuk subsidi BOS ini. Oleh karena itu Kepala Dinas Pendidikan sangat relevan sebagai responden karena keberhasilan implementasi kebijakan subsidi BOS adalah menjadi tanggungjawabnya.

Wali Kota Tangerang Selatan adalah pihak yang mengeluarkan kebijakan tentang Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan. Latar belakang lahirnya kebijakan ini tentu Walikota yang paling memahami.

Sampel ditentukan secara terpilih terhadap 2 buah SMP yang memiliki beberapa perbedaan karakter, yang terdapat di wilayah Kota Tangerang Selatan, dengan perincian 1 (satu) SMP Negeri yang berada di wilayah kecamatan Pondok Aren dengan angka partisipasi kasar (APK) terendah (52,72%) dan 1 (satu) SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dengan APK tertinggi (120, 83%). Selain perbedaan APK di dua wilayah kecamatan tersebut, terdapat perbedaan lain yaitu perbedaan jumlah siswa dan perbedaan secara geografis (desa-kota).

Tinggi rendahnya APK mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan. Jika APK rendah dapat ditafsirkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pun rendah. Keadaan ini akibat pengaruh ekonomi, letak geografis, ketersediaan sekolah di tempat tersebut, daya tampung sekolah dan lain-lain. Sebaliknya yang memiliki APK tinggi dapat ditafsirkan bahwa tingkat kesadaran masyarakatnya lebih baik. Jika APK melebihi dari 100%, biasanya daerah tersebut memiliki sekolah-sekolah yang rata-rata kualitasnya baik, sehingga banyak siswa yang berasal dari luar wilayah tersebut ikut menikmati pendidikan.

Selain APK, perbedaan karakteristik lain adalah jumlah siswa pada kedua sekolah tersebut. Perbedaan jumlah siswa mengakibatkan perbedaan besarnya subsidi BOS yang diterima oleh sekolah. Hal ini dikarenakan perhitungan jumlah subsidi BOS didasarkan pada jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut. Akibatnya perbedaan jumlah dana yang diterima oleh sekolah akan menyebabkan perbedaan kemampuan implementasi / operasional.

Perbedaan geografis (desa-kota) sangat relevan menjadi dasar pemilihan sampel pada penelitian ini. Perbedaan tersebut akan memunculkan kendala-kendala bagi peserta didik, misalnya kendala yang berhubungan dengan transportasi, kendala yang berhubungan dengan budaya masyarakat (desa-kota), kendala yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan dan lain-lain. Kendala-kendala tersebut bisa mempengaruhi tinggi rendahnya APK.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berupa angket, lembar pertanyaan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket dalam bentuk tanggapan, komentar, dan saran serta penerapan suatu kebijakan. Data tersebut diharapkan dapat diperoleh dari para guru dan petugas administrasi di sekolah.

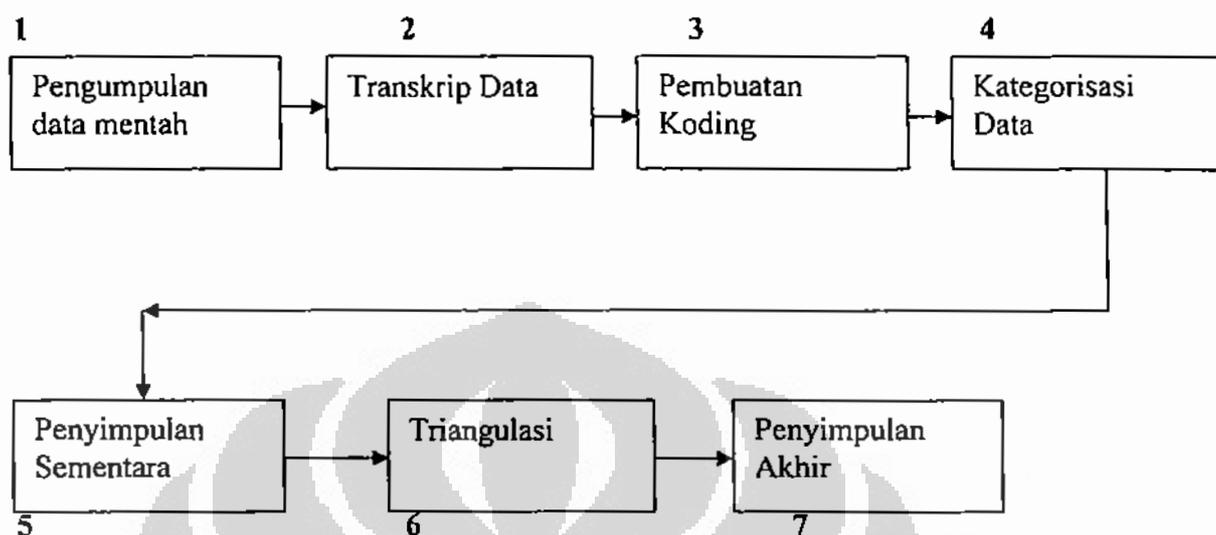
Sedangkan untuk mendapatkan data tentang pengelolaan keuangan, kegiatan pembelajaran, proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan lain-lain digunakan daftar pertanyaan. Peneliti melakukan tanya jawab dengan kepala sekolah, guru, staf tata usaha, kepala dinas pendidikan, anggota DPRD maupun pihak lain yang relevan yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan.

D. Teknik Analisa Data

Berdasarkan pendapat Bogdan dan Biklen (1982) dalam (Irawan, 2007, hal.70), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang semuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain. Analisis data terkait erat dengan pengumpulan data dan interpretasi data. Hal ini disebabkan analisis data dalam penelitian kualitatif seringkali bersamaan dengan interpretasi data.

Berdasarkan paparan tersebut, maka beberapa langkah yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif adalah seperti pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3
Proses Analisis Data



Sumber: Irawan (2007:73)

1. Pengumpulan Data Mentah

Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data mentah, baik melalui wawancara maupun kajian pustaka. Data yang dicatat adalah data apa adanya (*verbatim*) dan tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti. Tidak semua data yang dikumpulkan secara mutlak dilaporkan, melainkan melalui tahapan berikutnya, sehingga data yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan topik yang diajukan.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, dilakukan penulisan dari apa yang telah dicatat pada catatan tulisan tangan atau yang berasal dari tape recorder. Data yang diketik adalah data apa adanya (*verbatim*) dan tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Kemudian mencatat hal-hal yang penting untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting tersebut, diambil "kata kunci"nya yang akan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”. Pada tahap ini peneliti membuat kategori-kategori data yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan bahasan hasil penelitian.

5. Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sementara dengan berdasarkan data tanpa memasukkan pikiran maupun penafsiran peneliti. Jika peneliti ingin memasukkan pikiran dan penafsirannya dari sebuah data maka pikiran dan penafsiran tersebut ditulis pada bagian akhir kesimpulan sementara.

6. Triangulasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dengan demikian tidak terjadi kesimpangsiuran antara data tentang masalah yang sama yang berasal dari sumber yang berbeda. Tujuan dari triangulasi pada dasarnya adalah untuk mendapatkan validasi data.

7. Penyimpulan Akhir

Penyimpulan akhir dilakukan ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP SUBSIDI BOS
DAN IMPLEMENTASINYA PADA JENJANG SMP
DI KOTA TANGERANG SELATAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

Sebelum peneliti lebih jauh membahas tentang Subsidi BOS dan implementasinya, terlebih dahulu akan didiskripsikan tentang kondisi geografis, pemerintahan, perekonomian daerah, keadaan sosial dan pendidikan serta arah kebijakan pendidikan untuk memberi gambaran secara utuh tentang Kota Tangerang Selatan.

Data ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari Kantor Walikota Tangerang Selatan, Biro Hukum, Kantor Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah sampel dan website Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adapun data-data yang diperoleh dapat disarikan sebagai berikut :

1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Tangerang Selatan pada mulanya merupakan sebagian wilayah dari Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, atas perjuangan warga masyarakat yang dilakukannya sejak tahun 2000.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Propinsi Banten dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km². Ketujuh kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Serpong, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong Utara , Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan Setu. Adapun batas-batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut : (a) sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang, (b) sebelah timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta, (c) sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok serta (d) sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang.

Jumlah penduduk mencapai 1.042.682 jiwa, dengan penyebaran di Kecamatan Serpong terdiri dari 173.044 jiwa, Ciputat 257.320, Pamulang 162.229 jiwa, Pondok Aren 148.764 jiwa, Serpong Utara 127.597 jiwa, Ciputat Timur 102.725 jiwa dan di Kecamatan Setu 71.003 jiwa.

Luas wilayah adalah 14.719 ha, masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 1. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%. Luas wilayah masing-masing kelurahan/desa tertera dalam Tabel 2. Kelurahan/desa dengan wilayah di atas empat ratus hektar terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok Cabe Udik dan Pamulang Barat, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Paku Jaya. Kelurahan/desa dengan wilayah di bawah seratus lima puluh hektar terletak di Kecamatan Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang. Kelurahan/desa dengan luas wilayah paling besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483 Ha sedangkan kelurahan/desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang .

1. 2. Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dengan jumlah kelurahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan desa sebanyak 5 (lima). Rukun warga (RW) sebanyak 572 dan Rukun Tetangga sebanyak 2.996. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak adalah Pondok Aren, sedangkan kecamatan dengan RW dan RT terbanyak adalah Pamulang dengan 129 RW dan 69 RT. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan berjumlah 28 SKPD termasuk kecamatan, namun tidak termasuk institusi DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

Pemerintah Kota Tangerang selatan belum memiliki institusi DPRD. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang, yang baru terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2008. Sementara itu untuk membentuk institusi DPRD harus dilakukan melalui pemilihan umum. Sehingga, ketika pada bulan April 2009 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPD dan DPRD II, kota ini belum memiliki persiapan yang memadai.

Berdasarkan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, dijelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan terdiri dari : Walikota, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Umum. Dinas daerah meliputi : dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian dan perikanan, dinas kesehatan, dinas perindustrian, perdagangan , koperasi dan usaha kecil menengah, dinas perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika, dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial , ketenagakerjaan dan transmigrasi dan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan teknis daerah terdiri dari : badan perencanaan dan pembangunan daerah, inspektorat kota, badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, kantor lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta satuan polisi pamong praja.

Pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan adalah di Pamulang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2007. Meski daerahnya terbilang sudah mapan, namun Kota Tangerang Selatan sebagai kota otonom baru dikelilingi berbagai masalah yang begitu kompleks. Setidaknya, terdapat empat masalah yang berkaitan

dengan penataan wilayah. Yakni, pembenahan infrastruktur, drainase, pengelolaan air bersih, dan penanganan sampah.

1.3. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.2.768.787,17. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB per kapita adalah sebesar Rp.5,042 Juta. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per kapita. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51%. Pada tahun 2003, PDRB per kapita atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.863.517 sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.042.682. Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Ciputat Timur yaitu sebesar 31,93% dari total PDRB sedangkan yang terkecil adalah Setu dengan hanya 1,35%.

Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40%).

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tertier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tertier meningkat kontribusinya.

Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu seluas 9.941,41 Ha atau 67,54% dari 14.719 Ha. Sawah ladang dan kebun menempati posisi kedua terluas dengan 2.794,41 Ha atau 18,99%. Penggunaan lahan paling kecil adalah untuk pasir dan galian yaitu seluas 15,27 Ha atau 0,1%.

Jenis komoditas pertanian yang diproduksi antara lain adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, cabe rawit, bayam, terung, kangkung, sawi, dan cabe besar. Komoditas dengan luas panen terbesar, yaitu 121 Ha dengan produksi 725 Ton GKP, sedangkan komoditas dengan luas panen terkecil adalah cabe rawit yaitu 4 Ha dengan produksi 17 ton.

Berbagai jenis ternak terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan populasi yang beraneka ragam. Ternak besar yang terdiri dari sapi potong, kerbau dan kuda didominasi oleh sapi potong dengan populasi 5.073 ekor. Pada ternak kecil, dibandingkan dengan domba dan babi, kambing memiliki populasi terbesar yaitu 14.279 ekor. Unggas yang paling besar populasinya adalah ayam ras petelur dengan 1.244.888 ekor. Unggas-unggas lain adalah ayam ras petelur (populasi 490.100 ekor), ayam buras (214.946 ekor) dan itik (38.868 ekor).

Ada lima jenis industri kerajinan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan, yaitu kerajinan kayu berjumlah 165 unit, anyaman 28 unit, gerabah 1 unit, kain 293 unit dan makanan 164 unit. Selain itu industri kerajinan tersebut, juga terdapat 7 unit pabrik yang di dalamnya terdapat 1 kawasan industri.

Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yang terdapat di tanah milik pemerintah daerah adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong, dan Pasar Gedung Hijau. Seluruhnya berfungsi kecuali Pasar Gedung Hijau. Secara total, luas lahan yang ditempati oleh pasar-pasar tersebut adalah 25.721 m² dengan

1.966 kios, 865 los Berdasarkan tanda daftar perusahaan (TDP), terdapat perseroan terbatas (PT), comanditer venotschaap / perseroan komanditer (CV), perusahaan perorangan (PO), koperasi, firma, dan bentuk usaha lain yang keseluruhannya berjumlah 5.146 unit. Yang paling banyak adalah PT yaitu berjumlah 2.467 unit sedangkan yang paling sedikit adalah firma yang hanya berjumlah 2 unit.

Koperasi seluruhnya berjumlah 330 unit yang terdiri dari koperasi karyawan (Kopkar), koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), dan *Koperasi Pegawai Republik Indonesia* (KPRI). Namun, koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang baru sejumlah 81 unit. Secara keseluruhan, jumlah anggota mencapai 24.553 orang.

1. 4. Kondisi Sosial dan Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%. Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Setu masih ada dengan angka sebesar 0,52%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29% namun di Setu hanya sebesar 15,10% Jumlah total unit sekolah adalah sebesar 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Ruang kelas rusak SD negeri mencapai 213 ruang dari total ruang kelas SD negeri sebanyak 1.169 ruang atau 18,22%. Ruang kelas rusak SMP negeri mencapai 27 ruang dari total ruang kelas SMP negeri sebanyak 486 ruang atau 5,56%, sedangkan SMA negeri mencapai 17 ruang dari total 312 ruang atau 5,45%.

Jumlah Balita yang ditimbang adalah sebanyak 82.098 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 92,70% dalam keadaan gizi baik, 0,37% gizi buruk, 5,18% gizi kurang dan 1,74% gizi lebih. Jumlah rumah sakit yang berada di Kota Tangerang Selatan ada 9 unit yang seluruhnya milik swasta karena Kota belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) biasa berjumlah 10 unit, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) 1 unit, Puskesmas Pembantu 8 unit dan Puskesmas Keliling 10 unit. Selain itu juga terdapat Balai Pengobatan, Praktek Dokter dan Rumah Bersalin. Jumlah total pos pelayanan terpadu (Posyandu) berjumlah 771 unit yang terdiri dari Posyandu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri dengan 4.127 orang kader aktif. Selain itu juga terdapat 108 pos pembinaan terpadu (Posbindu) dengan 501 orang kader aktif.

Petugas Keluarga Berencana (KB) berjumlah 48 orang yang terdiri dari 24 orang dokter dan 24 orang bidan. Selain petugas KB, juga terdapat institusi masyarakat dalam kegiatan KB. Jumlah peserta KB baru adalah sebesar 10.522 peserta atau 56,52% dari total perkiraan permintaan masyarakat (PPM) sedangkan jumlah peserta KB aktif adalah sebesar 120.081 . Panti sosial yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah panti asuhan anak sejumlah 14 panti dan tresna werdha sejumlah 5 panti dan bina grahita sejumlah 1 panti. Potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di antaranya adalah tenaga kesejahteraan masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna .Berdasarkan tingkat kesejahteraan, jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan pra sejahtera adalah sebesar 8.789 keluarga atau 3,65% dari total 24.700 keluarga, sedangkan tingkat kesejahteraan KS I adalah sebesar 39.319 keluarga atau 16,34%. Sisanya, yaitu sebanyak 192.592 Keluarga atau 80,01% adalah Keluarga Sejahtera Tahap II, Tahap III Berdasarkan validasi data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008, jumlah rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 19.104 RT. Jumlah penerima paling banyak di Pamulang yaitu sebanyak 5.963 rumah tangga, sedangkan paling sedikit di Ciputat

Timur yaitu sebanyak 1.685 kk. Dapat terjadi perbedaan angka antara masyarakat miskin dalam BLT dengan masyarakat miskin berdasarkan tingkat kesejahteraan BKKBN karena terdapat perbedaan kriteria dan kategori dalam penentuan kelompok masyarakat miskin. Rumah tangga penerima BLT ditentukan berdasarkan 14 variabel dan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu Sangat Miskin, Miskin dan Mendekati Miskin. Tingkat kesejahteraan keluarga terbagi ke dalam 5 kategori yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera Tahap I, Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus.

Berdasarkan komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk, sebagian besar penduduk memeluk agama Islam yaitu sebanyak 90,98%. Penduduk selebihnya memeluk agama Protestan (4,07%), Kristen (3,14%), Buddha (1,21%) dan Hindu (0,60%). Sarana peribadatan yang tersedia untuk para pemeluk agama adalah mesjid sebanyak 436 buah, langgar/mushola 1.268 buah, gereja 42 buah, vihara/kuil 7 buah. Pondok pesantren berjumlah 24 buah.

2. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bidang Pendidikan

2.1 Sasaran

Sasaran kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam bidang bidang pendidikan :

- a. Meningkatnya secara nyata persentase angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni.
- b. Tersedianya standar pelayanan pendidikan minimal yang berupa sarana dan prasarana belajar yang memenuhi persyaratan.
- c. Meningkatnya kesejahteraan guru
- d. Terselenggaranya pendidikan dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

- e. Meningkatnya kualitas hasil belajar siswa yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.

2.2 Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengakomodasikan kepentingan pembangunan dengan cara meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Membuka seluas-luasnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dengan memberikan subsidi BOS untuk SD dan SMP, untuk meningkatkan APK dan APM.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana belajar melalui pola bantuan langsung ke sekolah untuk keperluan rehap ruang kelas maupun pembangunan ruang/fasilitas belajar yang baru.
- d. Peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan : pemberian kesempatan untuk menampung jenjang yang lebih tinggi, memberikan insentif mengajar, kompensasi lain non materiil.
- e. Melakukan penataan kelembagaan/organisasi dinas pendidikan maupun sekolah agar lebih efektif dan efisien.
- f. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu yang sesuai dengan dunia kerja

3. Program-program Peningkatam Pendidikan di Kota Tangerang Selatan

3.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatua Adhfal (RA), Kelompok Belajar, Kelompok Bermain dan lain-lain yang sederajat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan kualitas pendidikan anak usia dini antara lain :

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, membantu biaya operasional , pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini , memberi subsidi, imbal swadaya, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat termasuk lembaga keagamaan maupun organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini.
2. Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada orang tua melalui penyuluhan sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut untuk memasuki jenjang pendidikan formal di SD dan selanjutnya.
3. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini.

3.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2008 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah paling besar yaitu 29,22%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (sarjana muda dan sarjana) juga cukup tinggi, yaitu 29,05%. Profil penduduk berdasarkan tingkat pendidikan cenderung mirip antar kecamatan, kecuali Setu. Pada kecamatan lain, tidak tercatat penduduk yang tidak lulus SD atau penduduk buta huruf (belum melek aksara) namun di Setu masih ada dengan angka sebesar 0,52%. Penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain melebihi angka 29% namun di Setu hanya sebesar 15,10%

Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini sedang menggalakkan program pada sektor pendidikan mengingat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar (SD dan SMP)

di Kota Tangerang Selatan masih relatif rendah. Data Dinas pendidikan setempat pada tahun 2008 menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SD rata-rata 87,49 % dan APM 72,45%, untuk jenjang SMP dan sederajat APK 77,59% dan APM hanya 61,00%. Sedang APK dan APM untuk jenjang SMA masing masing 30,09% dan 21,94% serta APK dan APM untuk SMK masing-masing 33,85% dan 26,78%.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas melalui sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidayyah (MI) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat sehingga seluruh anak yang berusia 7 – 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan.

Penekanan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah :

1. Peningkatan partisipasi usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs
2. Penurunan angka putus sekolah pada usia 7-15 tahun.
3. Penyediaan bantuan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke SMP melalui program sekolah jauh, Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKBM) dan lain-lain.
4. Penyediaan sarana dan sarana pendidikan yang berkualitas
5. Perbaikan sarana pendidikan yang rusak

3.3 Pendidikan Menengah

Program pembinaan pendidikan menengah dibuat untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Program untuk pendidikan menengah meliputi pembinaan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA).

Berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pemberian bantuan untuk anak berprestasi

3. Penyelenggaraan sekolah unggulan dan peningkatan peran SMA dan SMK dalam peningkatan angka paetisipasi kasar.
4. Terselenggaranya kerjasama antara pendidikan dan dunia usaha,
5. Pengembangan manajemen berbasis sekolah

3.4. Pembinaan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan berlandasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan mencakup komponen input, proses dan output yang terdiri dari standar isi, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, proses pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan. Secara garis besar cakupan standar nasional pendidikan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut : (1) Standar kompetensi lulusan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal peserta didik, yang mencakup kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif, yang harus dimilikinya untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, (2) Standar isi pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi pelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (3) Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan,(5) Standar prasarana dan sarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, perabot, alat dan media pendidikan, buku, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, (6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat

satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, (7) Standar pembiayaan (biaya operasi satuan pendidikan) adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, (8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian prestasi belajar peserta didik.

Program peningkatan kualitas agar minimal mencapai standar sebagaimana tersebut diatas dimulai dari pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan dibuat untuk suatu tujuan meningkatkan kuantitas, kualitas, kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, administrasi, evaluasi dan pelayanan teknis dalam menunjang proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Memfasilitasi untuk peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pendidik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan melakukan pendidikan dan latihan, penataran, workshop dan lain-lain bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

3.5 Penataan Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan

Sebagai daerah otonom baru, tentu saja Kota Tangerang Selatan harus melakukan pembenahan organisasi di setiap dinas yang ada, termasuk dinas pendidikan. Susunan organisasi dinas pendidikan setelah mengalami penataan terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat yang membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan dan sub bagian program evaluasi dan pelaporan. Sedangkan kepala-kepala bidang berada di bawah koordinasi langsung kepala

dinas. Bidang-bidang tersebut adalah : bidang pendidikan dasar (TK, SD, SMP), bidang pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta bidang pendidikan nonformal, informal, pemuda dan olahraga.

Upaya lain penataan lembaga pendidikan adalah dengan mengganti nama-nama SMP Negeri, yang sebelumnya diberi nama berurutan dalam lingkup kecamatan, sekarang nama mereka berurutan dalam lingkup wilayah Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian 17 SMP yang ada diurutkan namanya mulai dari nama SMP 1 sampai dengan SMP 17 Kota Tangerang Selatan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Perubahan Nama SMP di Kota Tangerang Selatan

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU
1	SMP Negeri 1 Serpong	SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan
2	SMP Negeri 1 Ciputat	SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan
3	SMP Negeri 2 Ciputat	SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan
4	SMP Negeri 1 Pamulang	SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan
5	SMP Negeri 1 Pondok Aren	SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan
6	SMP Negeri 3 Ciputat	SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan
7	SMP Negeri 2 Serpong	SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan
8	SMP Negeri 2 Cisauk	SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan
9	SMP Negeri 2 Pamulang	SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan
10	SMP Negeri 4 Ciputat	SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan
11	SMP Negeri 3 Serpong	SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan
12	SMP Negeri 2 Pondok Aren	SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan
13	SMP Negeri 5 Ciputat	SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan
14	SMP Negeri 3 Pondok Aren	SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan
15	SMP Negeri 4 Serpong	SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan
16	SMP Negeri 5 Serpong	SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan
17	SMP Negeri 3 Pamulang	SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, 2009

Penataan lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan sehingga diperoleh kelembagaan pendidikan yang padat namun kaya fungsi.

3.6 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Jumlah total unit sekolah adalah sebesar 667 unit dengan rincian 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134 madrasah swasta. Ruang kelas rusak SD negeri mencapai 213 ruang dari total ruang kelas SD negeri sebanyak 1.169 ruang atau 18,22%. Ruang kelas rusak SMP negeri mencapai 27 ruang dari total ruang kelas SMP negeri sebanyak 486 ruang atau 5,56%, sedangkan SMA negeri mencapai 17 ruang dari total 312 ruang atau sebesar 5,45%.

Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21 miliar pada tahun 2009. Anggaran tersebut antara lain untuk rehabilitasi dan penambahan ruang-ruang kelas sekolah- sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri yang masih mengalami kekurangan ruang kelas itu di antaranya SMAN 3 Ciputat yang masih membutuhkan 3 lokal, SMAN 6 Ciputat kekurangan 6 lokal, dan SMAN 2 Pamulang juga 6 lokal. Sedangkan untuk SMP dan SD negeri yang ada di Tangsel akan dilakukan rehab bangunan. Disamping untuk rehabilitasi dan pemangunan ruang kelas baru, anggaran tersebut juga untuk keperluan alat tulis kantor dan mebeler .

4. Implementasi Subsidi BOS pada Jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan.

Subsidi BOS merupakan kebijakan Walikota Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan ini lebih populer disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOP) atau Bantuan Operasional Daerah (BOSDA). Kebijakan ini merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang lebih maju sesuai dengan semangat pembentukan Kota Otonomi Tangerang Selatan.

Dalam perumusan kebijakan subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta semangat yang mendorong pemisahan diri Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang.

Mengingat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk sekolah – sekolah pada jenjang SMP masih relatif kecil, maka perlu ada tambahan dari pemerintah daerah sehingga dapat lebih mengurangi beban masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan pada jenjang SMP. Oleh karenanya dibuatlah kebijakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan subsidi BOS baik pada jenjang SD maupun SMP.

Implementasi subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan pada satuan pendidikan dilakukan melalui Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS), sebagai gambaran umum dari program dan sumber dana yang diperoleh dan akan dikelola oleh sekolah pada tahun tersebut. Subsidi BOS dikelola sebagai suplemen dari BOS yang berasal dari APBN.

RAPBS merupakan dokumen sekolah yang direncanakan dan digunakan oleh sekolah sebagai pedoman untuk melaksanakan program-program sekolah. Penyusunan APBS dilakukan oleh sekolah bersama dengan komite sekolah. Apabila dalam pelaksanaan terdapat perbedaan atau pergeseran dengan yang tertera pada APBS, maka harus didiskusikan dengan komite sekolah terlebih dahulu. Kemudian dilakukan perubahan APBS yang dituangkan dalam berita acara perubahan APBS.

Langkah –langkah penyusunan APBS dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Mengadakan perencanaan kegiatan. Yaitu menentukan dan menginventarisir semua kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun yang akan datang. Perencanaan kegiatan pada umumnya dibuat sebelum akhir tahun pelajaran, sehingga pada awal tahun pelajaran sekolah telah memiliki pedoman untuk pelaksanaan kegiatan sekolah.

- b. Menentukan biaya untuk masing-masing item kegiatan. Total biaya yang dibutuhkan diklasifikasikan untuk tiap-tiap semester.
- c. Menentukan sumber dana. Sumber dana bagi SMP negeri dan swasta pada umumnya berbeda. Bagi sekolah negeri, sumber dana yang dominan berasal dari BOS dan subsidi BOS. Sedangkan bagi SMP swasta, sumber dana yang diandalkan berasal dari pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari siswa/orang tua dan BOS dari pemerintah pusat.

Mekanisme penetapan alokasi dan pencairan dana Subsidi BOS untuk SMP di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tim Subsidi BOS Kota Tangerang Selatan mensosialisasikan program bantuan kepada sekolah-sekolah negeri calon penerima bantuan. Pesan dalam sosialisasi antara lain agar sekolah mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota, Up. Kepala Dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan subsidi BOS atau BOP. Dalam proposal yang diajukan oleh setiap SMP memuat antara lain : Surat permohonan, profil sekolah, data guru dan murid, rencana kegiatan, rencana penggunaan BOP, prestasi sekolah dan nomor rekening sekolah.
2. Tim Subsidi BOS melakukan verifikasi ulang data sebagai dasar pengajuan alokasi tiap sekolah. Dasar penghitungan subsidi adalah jumlah siswa.
3. Tim Subsidi BOS mengajukan usulan lokasi dan alokasi subsidi kepada Pemerintah Kota /Walikota Tangerang Selatan.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang lokasi dan alokasi subsidi BOS, dan Surat Permintaan Pembayaran dari Sekolah, Tim Subsidi BOS mengajukan Permohonan Pembayaran ke Sekretariat Daerah.
5. Selanjutnya Sekretariat Daerah mengajukan permintaan pembayaran ke Keuangan Daerah untuk diterbitkan rekening Surat Perintah Menerima Uang (SPMU) atas nama rekening sekolah penerima Subsidi BOS.

6. Penyaluran dana dilakukan tiap triwulan ke rekening SMP Negeri penerima Subsidi BOS.
7. Pihak sekolah sebagai penerima Subsidi BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.

Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan diadakan mulai bulan Juli 2009. Besarnya Rp 17.650,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan. Untuk periode Juli-Desember 2009, dana yang dipergunakan sebagai Subsidi BOS merupakan hibah dari Kabupaten Tangerang, mengingat Kota Tangerang baru dalam proses penataan organisasi, administrasi, anggaran dan lain-lain setelah mendapat persetujuan sebagai daerah otonom sejak tahun 2008.

Sekolah penerima Subsidi BOS adalah seluruh SMP Negeri baik yang berstatus reguler maupun SMP Terbuka (TKB/TKBM) di Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 17 sekolah dan SMP Terbuka yang berjumlah 7 sekolah, dengan total siswa 15.509 siswa. Dengan demikian besarnya Subsidi BOS/BOSDA yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada periode bulan Juli-Desember 2009 adalah $Rp\ 17.650 \times 15.509\ siswa \times 6\ bulan = Rp\ 1.642.403.100$ (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus rupiah).

4.1. Implementasi Subsidi BOS pada SMP Standar Nasional (SSN)

Sekolah standar nasional, memiliki sumber pendanaan sekolah setidaknya berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu block grant dana Sekolah Standar Nasional (SSN), BOS, dan Subsidi BOS . Meskipun demikian, bukan berarti sekolah standar nasional tidak mengalami hambatan dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini dikarenakan dana bantuan SSN peruntukannya adalah hanya untuk delapan standar nasional yang antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana prasarana, pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan dan standar penilaian pendidikan. Dengan demikian bagi sekolah, Subsidi BOS bukan untuk meringankan beban orang tua siswa akan tetapi untuk meningkatkan layanan mutu sekolah.

Kendala yang muncul dari implementasi Subsidi BOS di sekolah standar nasional adalah terbatasnya ruang gerak sekolah dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu. Sebagai contoh ketika dana Subsidi BOS terlambat, pihak sekolah kesulitan untuk mendapatkan dana talangan. Hal ini menyebabkan kebutuhan operasional sekolah terhambat, seperti untuk pembayaran listrik, air, internet, gaji guru honorer dan lain-lain.

Dampak yang lebih jauh dari terlambatnya dana Subsidi BOS terkait dengan pemberian gaji guru adalah pada tingkat disiplin guru, khususnya guru honorer. Misalnya para guru honorer terlambat menerima gaji, maka dengan sangat mudah mereka tidak masuk sekolah, dengan alasan tidak punya transport. Jika sering terjadi kelas kosong, maka sekolah akan potensial gagal dalam meningkatkan pelayanan kepada siswa. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada penurunan prestasi belajar siswa.

Tabel 3

Perincian Jumlah Siswa dan Besarnya Subsidi BOS pada SMP SSN

NO	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	JUMLAH SISWA	Subsidi BOS Rp
1	SMP Negeri 2	30 Kelas	600 Siswa	Rp 18.426.600
4	SMP Negeri 4	24 Kelas	480 Siswa	Rp 8.472.000
	Jumlah	54 Kelas	1080 siswa	Rp 26.898.600

Sumber : dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan , diolah.

4.2. Implementasi Subsidi BOS pada SMP Reguler

Jumlah siswa dan besarnya Subsidi BOS yang diterima oleh setiap sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 4
Perincian Jumlah Siswa dan Besarnya Subsidi BOS pada SMP Reguler

NO	SEKOLAH	JUMLAH KELAS	JUMLAH SISWA	Subsidi BOS Rp
1	SMP Negeri 1	21 Kelas	1068 Siswa	Rp 18.850.000
2	SMP Negeri 3	24 Kelas	900 Siswa	Rp 15.885.000
3	SMP Negeri 5	27 Kelas	1065 Siswa	Rp 18.797.250
4	SMP Negeri 6	30 Kelas	1070 Siswa	Rp 18.888.550
5	SMP Negeri 7	21 Kelas	840 Siswa	Rp 14.826.000
6	SMP Negeri 8	18 Kelas	576 Siswa	Rp 10.166.400
7	SMP Negeri 9	24 Kelas	960 Siswa	Rp 16.944.000
8	SMP Negeri 10	27 Kelas	912 Siswa	Rp 16.096.800
9	SMP Negeri 11	24 Kelas	936 Siswa	Rp 16.520.400
10	SMP Negeri 12	27 Kelas	1060 Siswa	Rp 18.709.000
11	SMP Negeri 13	30 Kelas	1180 Siswa	Rp 20.827.000
12	SMP Negeri 14	12 Kelas	480 Siswa	Rp 8.472.000
13	SMP Negeri 15	27 Kelas	756 Siswa	Rp 13.343.400
14	SMP Negeri 16	18 Kelas	720 Siswa	Rp 12.708.000
15	SMP Negeri 17	24 Kelas	960 Siswa	Rp 16.944.000
16	SMP Terbuka	14 Kelas (7 lokasi)	496 Siswa	Rp 8.754.400
	JUMLAH	407 kelas	14.429 Siswa	Rp 273.630.400

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, diolah.

4.3 Implementasi Subsidi BOS pada SMP Terbuka /TKBM

SMP Terbuka yang ada di Kota Tangerang Selatan tersebar di 7 (lokasi) Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dan Tempat Kegiatan Belajar Masyarakat (TKBM) dengan SMP 1 Kota Tangerang Selatan sebagai SMP Induk. Jumlah siswa keseluruhan (dari 7 lokasi) tersebut adalah 496 anak.

Perincian keadaan siswa di SMP Terbuka dapat dilaporkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Keadaan Siswa SMP Terbuka Kota Tangerang Selatan

NO	NAMA TBK/TKBM	ALAMAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Diponegoro	SMP 1 (induk)	34	23	57
2	Cut Nyak Dien	Momonggor	27	14	41
3	RA Kartini	Cisauk Girang	35	31	66
4	Dewantara	Cibogo	40	48	88
5	Baitul Maal	Pondok Aren	44	48	92
6	Al Munasharoh	Pondok Cabe	63	52	115
7	Ibnu Sina	Bintaro	18	19	37
	Jumlah		261	235	496

Sumber : SMP Negeri 1 Tangsel, diolah.

TKBM Diponegoro merupakan sekolah induk yang bertempat di SMP Negeri 1 Tangerang Selatan. Kepala SMP Negeri 1 ini merangkap sebagai koordinator TKBM tersebut. Menurutnya, dengan adanya Subsidi BOS, pembayaran tenaga pendidik untuk lembaga ini menjadi lebih lancar dan terjaga. Komponen pembayaran gaji ini merupakan komponen utama dari TKBM. Sedangkan fasilitas dan sarana-prasarana lain relatif tidak ada masalah yang berarti karena lembaga-lembaga ini pada umumnya menumpang di sekolah – sekolah negeri.

Meskipun setiap SMP Negeri telah menerima BOS dan Subsidi BOS dengan total Rp 47.900 + Rp 17.650 = Rp 65.550 per siswa per bulan, akan tetapi untuk biaya operasional sekolah, rata-rata tiap SMP masih memungut dana dari orang tua siswa yang besarnya bervariasi dalam kisaran antara Rp 20.000 sampai Rp 60.000 per siswa per bulan. Disamping itu setiap siswa baru juga dikenai iuran pengembangan sekolah dengan kisaran antara Rp 800.000 sampai Rp 2.000.000. Dengan demikian besarnya penerimaan oleh masing-masing sekolah jika dihitung atas dasar besarnya dana BOS, Subsidi BOS, SPP Siswa (dihitung rata-rata Rp 40.000) dan iuran pengembangan (dihitung rata-rata Rp 1.400.000)

diperoleh jumlah Rp 144.550 per siswa per bulan atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMP Terbuka tidak ada lagi beban biaya yang harus ditanggung oleh siswa/orang tua siswa. Perincian penerimaan rutin sekolah dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Penerimaan Masing-masing sekolah
Tahun Pelajaran 2009/2010

NO	SUMBER DANA	KISARAN	BIAYA RIIL	Pemasukan per siswa per bulan	Pendapatan sekolah per siswa per tahun
1	BOS	-	Rp 47.900	Rp 47.900	Rp 574.800
2	Subsidi BOS	-	Rp 17.650	Rp 17.650	Rp 211.800
3	SPP Siswa	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 480.000
4	DSP	Rp 800.000 - Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Rp 39.000	Rp 460.000
	Jumlah			Rp 144. 550	Rp 1.734. 600

Sumber : SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 dll yang telah diolah

Dari tabel di atas dapat dihitung persentase Subsidi BOS terhadap keseluruhan biaya operasional sekolah yang dibutuhkan, yaitu $\frac{17.650}{144.550} \times 100\% = 12,210\%$.

Pada tabel di atas tergambar bahwa biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan sebesar $Rp\ 40.000 + Rp\ 39.000 = Rp\ 79.000$ per siswa per bulan. Sementara peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP ini masih terbilang kecil. Besarnya Subsidi BOS jika dikomparasikan dengan biaya operasional yang riil, BOS dan biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Persentase Subsidi BOS terhadap Biaya Operasional Sekolah

NO	SUMBER DANA	JUMLAH	PERSENTASE
1	BOS	Rp 47.900	33,137 %
2	Subsidi BOS	Rp 17.500	12,210 %
3	SPP Siswa	Rp 40.000	27,673 %
4	Dana Sumbangan Pend (DSP)	Rp 39.000	26,980 %
	Jumlah	Rp 144.550	100 %

Sumber : SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 dll yang telah diolah

Komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase $27,673 \% + 26,980 \% = 54,653 \%$. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan.

Menurut para kepala sekolah, besarnya dana yang diterima dari berbagai sumber tersebut di atas sebenarnya tidak mencukupi untuk keseluruhan pembiayaan operasional. Apalagi jika terdapat kegiatan non budgeter antara lain yang berupa lomba-lomba, upacara dan lain-lain yang bersifat mendadak. Namun untuk menyikapi kekurangan tersebut, sekolah pada umumnya mengurangi bahkan meniadakan pembiayaan untuk beberapa kegiatan antara lain perawatan sarana dan prasarana, pengadaan fasilitas, media pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain.

Pemanfaatan Subsidi BOS pada jenjang SMP didasarkan pada APBS yang telah dibuat yang merupakan kesepakatan bersama antara sekolah dan komite sekolah. Selain itu harus mematuhi rambu-rambu yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, bahwa Subsidi BOS harus dikelola untuk :

1. Seluruh kegiatan yang pembiayaannya menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetapi masih mengalami kekurangan/tidak mencukupi maka kekurangan tersebut dapat diambil/dibiayai oleh Subsidi BOS.

2. Pembiayaan kebutuhan pembelajaran tiap-tiap kelas, seperti alat peraga, penggandaan soal, praktikum dan lain-lain.
3. Pembiayaan Kebutuhan rumah tangga sekolah
4. Biaya pendalaman materi ujian nasional, ekstrakurikuler, pengayaan.
5. Pembiayaan transportasi bagi guru PNS dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain jam mengajar.
6. Biaya perjalanan dinas kepala sekolah, dalam satu daerah/ luar daerah.
7. Jika seluruh komponen tersebut telah dibiayai dengan baik dan ternyata masih ada sisa dana, maka dapat dipergunakan untuk pembelian alat peraga, media pembelajaran maupun mebeler sekolah.

Realisasi pemanfaatan Subsidi BOS dari beberapa sekolah responden dapat dilaporkan secara garis besar sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 8
Realisasi Pemanfaatan Subsidi BOS

NO	URAIAN KEGIATAN	PERSENTASE
1	Belanja bahan habis pakai : a. Alat tulis kantor : tinta white board, spidol, kertas, tinta printer, pensil, bolpoin, lakban, amplop, pisau dll b. Alat kebersihan : sapu, pengki, tempat sampah, kemoceng, kain pel, sikat WC, parfum dll Belanja Pemeliharaan : a. listrik, PAM, telepon b. air mineral, gula, kopi, teh, gas, gelas, cangkir dll	30%
2	Belanja Modal : a. komputer, laptop, rak, printer, stabiliser b. biaya cetak, buku dll	50%
3	Kegiatan Ekstrakurikuler	20%

Sumber : SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 dll yang telah diolah

Dari tabel di atas terlihat uraian pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler relatif kecil, karena kegiatan ini disamping dibiayai oleh Subsidi BOS namun juga dibiayai dengan menggunakan dana BOS dan dana yang diperoleh dari siswa (SPP). Alasannya karena Subsidi BOS merupakan program baru, sedangkan kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, pembayaran honor guru yang berstatus honorer, kegiatan non akademik siswa telah dialokasikan sebelumnya.

Subsidi BOS tidak boleh dipergunakan untuk :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan ke pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karyawisata) dan sejenisnya.
4. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
5. Membangun gedung/ruangan baru.
6. Membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
7. Menanamkan saham.
8. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai secara penuh/mencukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak / guru bantu dan kelebihan jam mengajar. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti peraturan tentang penetapan batas kewajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, geografis dan faktor lainnya.

5. Pengawasan Terhadap Implementasi Subsidi BOS

Pengawasan, monitoring dan supervisi terhadap implementasi Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Badan

Pengawas Keuangan Kota (Bawasko) dan Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur masyarakat, Dewan Pendidikan Kota dan Tim Subsidi BOS.

Bentuk-bentuk pengawasan terhadap pengelolaan Subsidi BOS adalah melalui :

1. Monitoring/Supervisi pelaksanaan program : (a). Ditujukan untuk memantau penyaluran, penyerapan serta penggunaan dana Subsidi BOS pada jenjang SMP. (b) Pemantauan ditujukan kepada Kepala Sekolah, Bendahara sekolah, guru, karyawan dan para siswa.(c) Monitoring dilakukan pada waktu penyaluran subsidi BOS dan pasca penyaluran subsidi BOS.
2. Monitoring / supervisi penanganan pengaduan : (a) Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran, pengelolaan dan penyerapan subsidi BOS (b) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka menangani pengaduan dan penyimpangan pengelolaan subsidi BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
3. Supervisi oleh Tim Subsidi BOS dari inspektorat : (a) Statistik penerima subsidi BOS yaitu data tentang laporan penerima subsidi BOS setiap sekolah (b) Laporan hasil penyerapan subsidi BOS (c). Laporan hasil monitoring dan evaluasi (d) Laporan penanganan pengaduan masyarakat
4. Sekolah : (a) Nama siswa penerima subsidi BOS sesuai dengan format yang ditentukan. (b) Mengadministrasikan dan melaporkan pengelolaan subsidi BOS secara reguler setiap bulan. (c) Laporan dibuat rangkap 4 (empat) asli untuk pemerintah kota, 1 untuk Tim Subsidi BOS, 1 untuk Dinas Pendidikan Kota, 1 untuk arsip sekolah.

Sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang sengaja/tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian, hambatan implementasi adalah sebagai berikut : (1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2). Penerapan tuntutan perdata dan ganti rugi, (3). Penerapan proses hukum (4). Pemblokiran subsidi BOS untuk periode berikutnya sampai diperoleh kepastian atas kesalahan/penyelewengan yang terjadi.

Pertanggungjawaban keuangan sekolah yang harus dikelola sekolah yang terutama berasal dari pemerintah pusat maupun daerah sepenuhnya menjadi

tanggung jawab kepala sekolah, yang kegiatannya meliputi : pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang, pelaporan keuangan. Setiap sekolah penerima harus membuat pembukuan atas transaksi subsidi BOS yang mereka terima.

Pelaporan harus dibuat sedemikian jelas, dengan bukti fisik yang mendukung, sehingga memudahkan tugas-tugas monitoring. Setiap lembar pada laporan harus dibubuhi tanda tangan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Penulisan transaksi harus menunjukkan penerima, kegunaan dan uraian singkat dengan jelas. Apabila transaksi tersebut melibatkan lebih dari satu sumber dana, maka harus dibuat bukti transaksi secara terpisah, sehingga pengelolaan subsidi BOS menjadi jelas dan mudah untuk dievaluasi.

Ketentuan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan subsidi BOS diberikan rambu-rambu sebagai berikut :

1. Laporan harus disajikan secara singkat, jelas dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Namun demikian tidak boleh menghilangkan arti penting pelaporan yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Laporan keuangan harus memuat data yang lengkap dan disajikan secara sistematis untuk periode laporan yang bersangkutan.
3. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun bukti fisik pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal transaksi.
4. Laporan keuangan /pertanggungjawaban pengelolaan subsidi BO disampaikan pada pihak yang berkepentingan.
5. Kewajiban sekolah penerima subsidi BOS untuk melaporkan APBS pada awal tahun anggaran.
6. Penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

6. Dampak Subsidi BOS

Suatu hal yang wajar jika suatu kebijakan memiliki dampak negatif dan positif setelah diimplementasikan. Seperti halnya Subsidi BOS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk jenjang SMP pun memiliki dampak yang

bermacam-macam. Diantara beberapa dampak yang timbul setelah diimplementasikannya subsidi BOS antara lain sebagai berikut :

A. Dampak Positif.

1. Siswa dan orang tua siswa merasa terbantu / diringankan beban biaya pendidikan yang harus mereka tanggung pada jenjang SMP. Para siswa pada umumnya berharap agar program ini dilanjutkan, dan jika perlu ditingkatkan besarnya sehingga sekolah mampu merencanakan lebih banyak kegiatan untuk siswa.
2. Sekolah tidak lagi disibukkan dengan kegiatan pembayaran, penagihan, pemanggilan orang tua siswa berkaitan dengan biaya pendidikan. Mereka bisa lebih fokus untuk meningkatkan pelayanan terhadap siswa dalam proses pembelajaran.
3. Bagi sekolah yang memiliki siswa yang relatif banyak, subsidi BOS yang diterima akan lebih besar, sehingga dapat membiayai operasional pendidikan dengan tepat waktu, seperti pembayaran listrik, telepon, internet dan lain-lain.
4. Subsidi BOS/BOSDA/BOP membuat siswa lebih tenang dalam belajar. Mereka tidak terbebani oleh pikiran skorsis, teguran, panggilan pada orang tua dan lain-lain akibat keterlambatan maupun kekurangan membayar biaya pendidikan.

B. Dampak Negatif

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua murid dan siswa , dampak negatif dirasakan oleh murid antara lain : kurangnya motivasi belajar, mengingat biaya sekolah telah ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah, mereka merasa tidak kehilangan sesuatu (nothing to lost) jika belajar seadanya dan bahkan jika tidak naik kelas/lulus sekalipun ; tidak mendapatkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Kasus ini pada umumnya dialami oleh siswa dari sekolah yang jumlah muridnya relatif sedikit, ada biaya tetap yang harus dibayar oleh setiap sekolah dan ada biaya yang relatif yang

besarnya bergantung pada jumlah siswa ; Kurangnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

2. Hasil wawancara dengan guru yang mengelola kegiatan kesiswaan dapat diperoleh keterangan bahwa dampak negatif yang dialami oleh guru antara lain : kurangnya kesejahteraan mereka akibat beberapa kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Bagi sekolah yang memiliki beban pembayaran gaji pada guru honor yang lebih banyak/besar, telah mengakibatkan penyerapan subsidi BOS lebih banyak pada item pembayaran honorarium. Penurunan kesejahteraan yang dialami guru yang berstatus PNS antara 5 – 20 persen, tergantung dari banyaknya / intensitas kegiatan ekstrakurikuler yang ditiadakan.

7. Evaluasi dan Monitoring terhadap Implementasi Subsidi BOS

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui / menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari implementasi subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan. Evaluasi baru dapat dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan cukup waktu. Akan tetapi monitoring dan evaluasi dapat dilakukan selama proses pengelolaan subsidi BOS tersebut sedang berlangsung. Artinya tidak harus menunggu berakhirnya waktu periode tertentu, melainkan bisa dilakukan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan.

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Implementasi Subsidi BOS dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan inspektorat ditujukan untuk : (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan evaluasi diharapkan dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran implementasi. Disamping itu juga untuk mengukur tingkat efisiensi, manfaat dan biaya yang diperlukan. (2) Mengukur berapa besar kualitas pengeluaran, kemampuan pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan program yang telah diimplementasikan. (3) Untuk melihat seberapa besar pengaruh positif dan negatifnya. (4) Untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dalam implementasinya. (5) Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan pada

waktu yang akan datang. (6) Untuk mendapatkan masukan bagi pengambilan kebijakan yang akan datang. (7) Agar terimplementasi kebijakan subsidi BOS dengan sebaik-baiknya.

Sampai saat ini, untuk pengelolaan subsidi semester Juli- Desember 2009 belum secara keseluruhan dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan yang dilakukan baru pada tahapan pengawasan terhadap proses, kendala yang dihadapi dan penyerapan oleh sekolah –sekolah sasaran. Ini belum menjangkau seluruh sekolah penerima subsidi BOS. Dilaporkan, dalam hubungannya dengan penyerapan, proses/realisasi pencairan, dan penggunaan, Dinas Pendidikan menerima laporan secara lisan dari tim penilai dan inspektorat, bahwa pada aspek-aspek tersebut dinilai baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekolah-sekolah sasaran, bahwa pengawasan dilakukan oleh sebuah tim yang datang ke sekolah untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan Subsidi BOS yang diterima oleh sekolah. Pengawasan secara menyeluruh akan dilakukan sebagaimana model pengawasan penggunaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu para kepala sekolah dikumpulkan di suatu sekolah yang ditunjuk, dan mempresentasikan penggunaan dana yang diterima. Ini belum dilakukan, tetapi sudah disosialisasikan.

B. PEMBAHASAN TERHADAP SUBSIDI BOS DAN IMPLEMENTASINYA

1. Formulasi Kebijakan Subsidi BOS

1.1. Proses dan Dinamika Kebijakan Subsidi BOS

Sektor pendidikan merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selain infrastruktur dan kesehatan. Salah satu kebijakan yang cukup populer adalah tentang Subsidi BOS yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal). Inti dari kebijakan ini adalah bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan bantuan untuk operasional pendidikan sebesar Rp 17.650 per siswa per bulan untuk SMP Negeri dan SMP Terbuka di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan.

Subsidi BOS atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kota Tangerang Selatan merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sekadar untuk diketahui, bahwa Kota Tangerang Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang. Setelah masyarakat memperjuangkan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai kota mandiri, maka pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang No 51 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan, kota ini secara resmi memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 disebutkan mengenai sumber pendapatan daerah otonom yaitu dari :

- a. Pendapatan asli daerah yang terdiri atas : hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, lain-lain usaha daerah yang sah.
- b. Pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari : sumbangan dari pemerintah pusat, sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti sumbangan pihak ketiga, hibah dan sebagainya.
- d. Pembiayaan sektoral. Alokasi dana sektoral digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dibiayai oleh dinas-dinas propinsi di bawah pengawasan pemerintah pusat. Alokasi dana sektoral ini tidak termasuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam konteks APBD Kota Tangerang Selatan, di sini besarnya harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Hal tersebut mengingat Kota Tangerang Selatan belum memiliki lembaga DPRD. Di samping itu, kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Dinamika penyusunan APBD sedemikian ini, dimana di dalamnya terdapat alokasi anggaran untuk pembiayaan dan peningkatan akan berlangsung sampai suatu saat Kota Tangerang Selatan memiliki lembaga DPRD sendiri.

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat umum yang mendesak dan prioritas, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan hibah kepada Kota otonom Tangerang Selatan. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127- Huk/ 2009 sebagai Subsidi BOS atau BOP. Realisasi pemberian Subsidi BOS ini dimulai sejak tahun pelajaran baru 2009/2010, yaitu awal bulan Juli 2009. Untuk periode semester pertama (Juli-Desember 2009), besarnya dana yang tersedia baru bisa dialokasikan untuk 17 SMP Negeri dan 7 SMP Terbuka dengan jumlah siswa 15.509 anak, dan untuk SD masing-masing Rp 10.000, untuk 285 sekolah dengan total siswa 85.730 anak.

Don K. Price menyebutkan bahwa proses perumusan kebijakan yang bertanggungjawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin - pemimpin organisasi , para administrator dan para politisi. Sesuai dengan konsep di atas, perumusan kebijakan Subsidi BOS untuk SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan juga melibatkan berbagai pihak antara lain walikota, kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga, tokoh masyarakat , DPRD Kabupaten Tangerang serta lembaga swadaya masyarakat. Peranan dari masing-masing lembaga yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut kan dijelaskan pada bagian aktor-aktor yang terlibat , sehingga tidak dijelaskan di sini untuk menghindari penjelasan yang berulang-ulang.

Dalam proses perumusan kebijakan Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan diawali dengan pemetaan kebutuhan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang prioritas untuk meningkatkan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, guna menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kebijakan ini didorong oleh disetujuinya APBD Kota Tangerang Selatan oleh DPRD Kabupaten Tangerang dan pemberian dana hibah.

Hasil mapping menempatkan permasalahan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP adalah sebagai akibat rendahnya

kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan APK ini, maka masyarakat perlu dibantu agar beban pembiayaan pendidikan pada jenjang SMP menjadi lebih ringan dan terjangkau. Maka perlu diberikan bantuan untuk operasional pendidikan. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan diwujudkan dalam bentuk Subsidi BOS atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Sebelum kebijakan pemberian Subsidi ini digulirkan, Walikota melakukan konsultasi dengan DPRD (Kabupaten Tangerang) yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dari hasil konsultasi diperoleh kesimpulan bahwa para wakil rakyat tersebut mendukung sepenuhnya untuk memberikan subsidi pada dana BOS karena dipandang dapat membantu meringankan beban masyarakat.

1.2. Konteks Implementasi Subsidi BOS

Arah kebijakan dalam bidang pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam bidang pendidikan. Sebagai wilayah Kotamadya yang baru dibentuk pada tahun 2008, Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih banyak menghadapi masalah dalam bidang pendidikan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

- a. Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas. APK dan APM tersebut dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

Tabel 10

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan 2008

NO	KECAMATAN	SD		SMP		SMA		SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	SERPONG	118,40	98,6	120,83	83,62	38,17	28,94	41,84	32,85
2	PAMULANG	80,17	66,9	58,96	36,46	18,97	13,33	43,43	36,92
3	CIPUTAT	109,45	91,2	109,42	82,47	39,32	27,90	40,43	26,11
4	PONDOK AREN	71,62	59,2	52,72	36,41	20,52	14,46	10,73	7,75

5	SERPONG UTARA	88,51	71,1	80,31	70,17	24,96	20,43	35,60	29,48
6	CIPUTAT TIMUR	58,44	49,1	60,69	58,84	35,47	25,48	44,18	36,42
7	SETU	85,85	71,1	60,17	59,05	33,24	23,16	20,76	17,91
	RATA-RATA	87,49	72,5	77,59	61,00	21,94	21,94	33,85	26,78

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan (2009)

- b. Masih banyaknya sarana sarana dan prasarana belajar yang rusak. Kondisi gedung dan sarana belajar yang rusak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Ruang Kelas Rusak
Kota Tangerang Selatan Tahun 2008

No	Uraian	Tangsel		Serpong		Serpong Utr		Pamulang		Ciputat		Ciputat Tmr		Pondok Aren		Setu	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	Jml SD	198	100	24	17	17	12	42	21	41	11	21	1	47	24	12	12
	Jml Ruang Kls SD	1160	1000	130	122	122	144	242	111	170	170	121	42	212	200	96	84
	Jml ruang yg rsk	212	21	-	13	13	-	48	11	30	1	11	1	1	-	-	-
2	Jml MI	2	31	12	-	-	3	-	11	2	1	-	1	21	-	1	6
	Jml Ruang Kls MI	12	190	50	-	-	1	-	1	-	-	11	132	-	7	46	
	Jml ruang yg rsk	4	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
3	Jml SMP	17	107	3	15	2	12	3	13	3	18	2	12	3	20	1	17
	Jml Ruang KlsSMP	430	1232	80	180	50	120	70	150	80	210	52	122	70	230	24	310
	Jml ruang yg rsk	27	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
3	Jml MTs	2	4	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	11	-	4	-
	Jml Ruang Kls MTs	24	48	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jml ruang yg rsk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jml SMA	1	22	5	-	-	3	-	-	-	-	3	1	1	4	-	-
	Jml Ruang KlsSMA	8	216	64	-	-	22	-	-	12	12	11	11	17	-	-	-
	Jml ruang yg rsk	-	12	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	-	-
5	Jml SMK	1	13	11	-	-	3	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
	Jml Ruang Kelas SMK	8	124	123	-	-	28	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
	Jumlah ruang yg rusak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan ,2008

- c. Tingginya biaya pendidikan

Pada penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2007/2008 di mana belum diadakan peningkatan besarnya dana BOS , di beberapa SMP Negeri di Kota Tangerang, setiap siswa harus membayar formulir pendaftaran sebesar Rp

50.000,00, biaya operasional antara Rp 90.000,00 sampai Rp 160.000,00 dan sumbangan anggaran pendidikan (SAP) antara 1.200.000,00 sampai Rp.3.000.000,00 (PSB di beberapa SMPN Ciputat dan Serpong tahun pelajaran 2007/2008).

d. Rendahnya gaji guru honorer sekolah , guru bantu dan guru swasta

Ada beberapa istilah untuk guru honorer antara lain guru bantu, yaitu guru honor yang gajinya dibayar melalui APBN. Besarnya gaji guru bantu adalah Rp 710.000. Istilah yang lain adalah guru honor sekolah, yaitu guru yang mengajar di sekolah negeri yang gajinya dibayar oleh sekolah. Gaji mereka relatif lebih kecil, yaitu antara Rp 200-Rp 400.000 per bulan. Istilah yang ketiga adalah guru honor yang mengajar di sekolah-sekolah swasta. Mereka digaji oleh yayasan penyelenggara pendidikan yang pada umumnya berdasarkan jumlah jam per minggu.

e. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Tingkat Pendidikan Masyarakat Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan 2008

N O	Pendidikan	Serpong	Serpong Utara	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Pondok Aren	Setu	Kota Tangsel
1	Sarjana	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,60%	7,06%	8,63%
2	Sarjana Muda	21,02%	21,02%	21,02%	21,02%	21,02%	20,97%	8,06%	20,42%
3	SLTA	29,03%	29,09%	29,03%	29,03%	29,03%	29,08%	32,85%	29,22%
4	SLTP	25,03%	25,03%	25,02%	25,03%	25,02%	25,43%	14,42%	24,64%
5	SD	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,23%	5,23%	23,08%	6,02%
6	TK	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	10,59%	3,06%	10,55%
7	Drop Out SD	0	0	0	0	0	0	8,35%	0,38%
8	Buta Huruf	0	0	0	0	0	0	3,13%	0,14%
	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan 2008

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat penduduk yang buta huruf serta drop out dari sekolah, terutama di kecamatan Setu. Di samping itu, penduduk yang hanya berpendidikan SD juga masih cukup besar (6,02%), sedangkan sarjana dalam persentase yang hampir sama dengan berpendidikan SD tersebut (8,63%).

Menurut Dunn, proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) pada dasarnya merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu yang saling bergantung, yaitu meliputi penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Masalah kebijakan saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh : masalah pendidikan sangat berkaitan dengan masalah kebudayaan, ekonomi dan perdagangan. Dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan unit yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem masalah, yaitu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara elemen-elemen masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu sangat jarang masalah yang dapat dipecahkan sendiri-sendiri tanpa mengaitkan dengan unsur lain.

Pembuatan kebijakan tentang Subsidi BOS untuk SD dan SMP di Kota Tangerang Selatan juga merupakan proses politik yang melibatkan lembaga politik antara lain DPRD Tangerang dan kantor Walikota Tangerang Selatan. Tahapan-tahapannya diawali dengan identifikasi masalah-masalah dalam bidang pendidikan. Setelah itu dibuat pemetaan terhadap masalah yang teridentifikasi untuk menentukan prioritas pemecahannya. Setelah disusun skala prioritas, maka dibuat agenda untuk untuk diformulasikan sebagai suatu kebijakan.

Formulasi kebijakan tersebut berupa Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127- Huk/ 2009 sebagai Subsidi BOS atau BOP. Kemudian diimplementasikan mulai awal tahun pelajaran baru 2009/2010. Besarnya subsidi adalah Rp 17.650 per anak per bulan untuk SMP dan Rp 10.000 per anak per bulan untuk SD. Tim pengawas pun kemudian ditentukan yaitu terdiri dari unsur dinas pendidikan dan unsur inspektorat

Masalah kebijakan itu memiliki ciri tertentu, yaitu : pertama bahwa ada dimensi subyektivitas dalam masalah kebijakan. Sebab masalah kebijakan

merupakan suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu. Masalah tersebut merupakan elemen dari situasi eksternal . Dengan demikian yang dialami pada dasarnya merupakan situasi masalah yang telah dikonstruksikan secara konseptual.

Dalam hal kebijakan Subsidi BOS oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat erat kaitannya dengan keinginan untuk menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota pendidikan. Hal ini didorong oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi, sekolah unggulan dan ekonomi Kota Tangerang Selatan yang memungkinkan untuk tujuan tersebut. Disamping itu juga desakan dari lembaga swadaya masyarakat yang konsern terhadap kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Meskipun dana yang dialokasikan pada tahap awal implementasi kebijakan ini merupakan hibah, akan tetapi Walikota Tangerang Selatan optimis bahwa pada tahun 2010 sumber dana untuk melanjutkan Subsidi BOS tidak ada masalah karena APBD yang dianggarkan adalah Rp 700 milyar, sedangkan besarnya Subsidi BOS hanya sekitar Rp 27 milyar, atau 3,9 % saja.

2. Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan Subsidi BOS

2.1. Peranan Walikota

Implementasi Subsidi BOS tidak bisa dipisahkan dari adanya kebijakan yang dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, Walikota sebagai kepala eksekutif Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan. Pada kebijakan Subsidi BOS, Walikota Tangerang Selatan memerankan sebaga aktor yang memberikan inisiator dengan menggerakkan lembaga struktural di bawahnya untuk merumuskan redaksi dan rencana aksi serta implementasinya. Selain sebagai inisiator kebijakan, Walikota juga membentuk kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari para praktisi hukum dan pendidikan.

Kebijakan subsidi BOS didorong oleh adanya permasalahan dalam bidang pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan, antara lain : Masih rendahnya angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah lanjutan

atas, Masih banyaknya sarana sarana dan prasarana belajar yang rusak, tingginya biaya pendidikan, rendahnya gaji guru honorer sekolah , guru bantu dan guru swasta, dan masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat

Dalam implementasi Subsidi BOS, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan untuk menjalankan kebijakan agar dampak dan tujuan kebijakan dapat diperoleh. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Aktor utama dalam penentuan kebijakan implementasi Subsidi BOS adalah Walikota Tangerang Selatan. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Meskipun demikian, di dalam pengambilan keputusan, didahului dengan pengumpulan laporan dan informasi tentang kebutuhan apa yang paling mendesak dan mampu untuk dipenuhi.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan merupakan pihak pertama yang dimintai masukannya berkaitan dengan pemberian Subsidi BOS untuk jenjang SD dan SMP. Sesuai dengan program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan setempat, pemberian subsidi BOS adalah salah satu dari program yang akan dikembangkan. Adapun lain selain subsidi BOS program-program tersebut meliputi : (1) pembelajaran berbasis teknologi informasi, (2) subsidi BOS, (3) peningkatan kualifikasi guru, (4) peningkatan standar proses dan kelulusan, (5) rehabilitasi gedung rusak, (6) pembangunan sekolah baru , (7) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan (8) peningkatan kesejahteraan guru.

2.2. Peranan Dinas Pendidikan

Di Kota Tangerang Selatan belum terbentuk lembaga DPRD. Rencananya pembentukan DPRD ini baru akan dilakukan bulan Januari 2010 berdasarkan hasil pemilu Kabupaten Tangerang. Oleh karena lembaga DPRD belum terbentuk, maka Dinas Pendidikan memikul peran sebagaimana DPRD dalam pembahasan kebijakan dan implementasi Subsidi BOS/BOP. Walikota banyak menyerap data dan informasi serta mendiskusikan rencana kebijakan dan implementasi kebijakan Subsidi BOS tersebut.

Dalam konteks implementasi, Dinas Pendidikan memiliki peran sebagai tulang punggung baik dalam realisasi Subsidi, sosialisasi pengelolaan dan

pengawasannya. Akan tetapi dalam hal ini, Dinas Pendidikan tidak berhubungan langsung dengan uang, karena perintah pembayaran dilakukan oleh asisten kesejahteraan daerah.

Dinas Pendidikan memiliki tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan sosialisasi pengajuan proposal, sosialisasi pengelolaan, pengawasan dan menerima pelaporan dari sekolah-sekolah, serta melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam implementasi subsidi BOS tersebut.

Dalam implementasi subsidi BOS ini, dinas pendidikan mengakui masih terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas di lingkungan dinas pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan realisasi dana subsidi yang seharusnya pada bulan Juli-Agustus 2009, baru bisa direalisasikan pada bulan Oktober-Nopember 2009. Pada realisasi subsidi tersebut terkesan dilakukan secara borongan. Yang seharusnya subsidi dicairkan setiap bulan, tetapi yang terjadi adalah pencairan dana periode Juli –Desember 2009 dilakukan sekaligus pada bulan Oktober-Nopember 2009. Alasan yang dikemukakan pihak dinas pendidikan adalah karena lambatnya proses verifikasi dan demi efisiensi, mengingat jumlah tenaga pengawas yang belum memadai.

2.3. Peranan DPRD

Telah dijelaskan di atas, bahwa lembaga DPRD belum dimiliki oleh daerah otonomi baru ini. Namun demikian, bukan berarti tidak ada peranan lembaga DPRD dalam konteks implementasi Subsidi BOS ini. Perlu disampaikan lagi bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, dalam masa transisi ini beberapa hal masih bergantung pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.

APBD Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2009 masih ditentukan oleh eksekutif dan legiaslatif di Kabupaten Tangerang. Termasuk juga APBD untuk tahun anggaran 2010. Dengan demikian, dapat diasumsikan apakah program Subsidi BOS ini masih berlanjut untuk tahun berikutnya (2010) sangat bergantung pada apakah usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota

Tangerang Selatan akan dikabulkan oleh pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tangerang.

Untuk tahun anggaran 2010, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengajukan APBD sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus milyar rupiah). Alasannya adalah bahwa pada tahun 2008 lalu (sebelum secara definitif sebagai daerah otonom) , dari tujuh kecamatan di Kota Tangsel, mereka bisa menyumbang Rp 500 miliar untuk APBD Kabupaten Tangerang.

Apabila jumlah itu terealisasi maka dampaknya pembangunan Kota Tangerang Selatan akan lebih pesat. Pasalnya, saat masih bergabung dengan Kabupaten Tangerang porsi anggaran yang diberikan ke tujuh kecamatan hanya Rp 121 miliar. Dengan demikian peranan DPRD (Kabupaten Tangerang) dalam mendorong kebijakan Subsidi BOS (Kota Tangerang Selatan) cukup besar, baik yang sekarang telah diimplementasikan maupun untuk selanjutnya pada tahun anggaran 2010.

2.4. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka mengontrol akurasi pembelanjaan subsidi BOS. Mereka dapat mengantisipasi terjadinya tindak manipulasi oleh sekolah penerima subsidi BOS tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa LSM harus bekerja secara profesional, tidak mencari-cari belaka atau justru melakukan persekongkolan dengan pihak sekolah.

LSM yang bertugas mengontrol kebijakan maupun implementasi kebijakan publik hendaknya diverifikasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak terkesan berkeliaran dimana-mana dan justru merugikan atau setidaknya mengganggu aktivitas di sekolah.

3. Nilai-nilai yang Mempengaruhi Implementasi

Ada beberapa nilai yang dapat mempengaruhi dalam perumusan kebijakan. Antara lain nilai-nilai organisasi. Para pembuat kebijakan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi, seperti badan-badan administrasi, perusahaan-perusahaan, menggunakan banyak imbalan dan sanksi dalam usahanya

untuk mempengaruhi anggota-anggotanya untuk bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan. Keputusan bisa diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan misalnya keinginan agar organisasi tetap survival, memperluas program bahkan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa.

Disamping nilai-nilai organisasi, perhitungan untung-rugi bagi diri sendiri, kelompok atau golongan namun ada juga yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat umum. Seperti pendapat Dwijowijoto (2003,159) bahwa faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan. Persepsi dasar akan adanya kepentingan masyarakat yang harus didahulukan akan membuat kebijakan publik lebih diterima oleh masyarakat.

Nilai pribadi untuk mempertahankan kekuasaan juga bisa mempengaruhi alasan mendapatkan dukungan masyarakat dengan mengimplementasikan kebijakan yang populis. Selain itu nilai ideologi merupakan seperangkat nilai dan kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran yang sederhana dan merupakan pedoman bagi masyarakat untuk melakukan tindakan. Atas nama kepentingan publik, seorang kepala daerah terdorong untuk mengimplementasikan kebijakan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Landasan kebijakan subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan adalah, pertama : kebijakan pembangunan pendidikan yang meliputi meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar (SD-SMP), meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009, menuju Kota Tangerang Selatan sebagai kota pendidikan. Kebijakan Subsidi BOS dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009 dan ditindaklanjuti dengan surat edaran dari kepala dinas pendidikan Nomor 07/E/081.2/VI/2009 sebagai implementasinya.

Landasan hukum Implementasi Subsidi BOS antara lain : (1) pasal 4 ayat 1 UUD 1945, (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (4) Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (5) Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 106 tahun

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembentukan, (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan (8) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009 tentang Bantuan Operasional Pendidikan.

4. Implementasi Subsidi BOS

4.1. Tujuan

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Edward III (1980: 1) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan tersebut sangat mungkin mengalami kegagalan walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Sebaliknya suatu kebijakan yang dianggap baik juga akan mengalami kegagalan jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Weissert dan Goggin yang mengkaji implementasi kebijakan publik ‘*Michigan Medicaid Managed Care Program*’ menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditunjang oleh 3 kondisi, yaitu : (1) dukungan politisi (*the support of politician*), (2) perubahan sistem dan personil dalam organisasi (*Organisational and personel change*), dan (3) situasi dan kondisi dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar birokrasi yang kondusif.

Seperti halnya yang dimaksud oleh Edward III, bahwa implementasi pemberian subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mengurangi masalah, yaitu beban biaya pendidikan yang relatif mahal yang harus ditanggung oleh setiap orang tua murid. Implementasi Subsidi BOS ini ditanggapi positif oleh masyarakat maupun pihak sekolah. Meskipun belum dapat

dievaluasi secara menyeluruh, akan tetapi dampak positifnya mulai terasa, antara lain beban biaya yang harus ditanggung orang tua siswa berkurang, sekolah dapat belanja modal seperti komputer, alat tulis kantor, dan memelihara survivalitas kegiatan ekstrakurikuler.

Keberhasilan dari implementasi Subsidi BOS yang dapat dilaporkan baru sebatas pada penyaluran serta pemanfaatan dan belum pada ada tidaknya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Seperti pendapat Weissert dan Goggin, implementasi Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan juga dipengaruhi oleh dukungan politisi, perubahan sistem dan personil serta situasi dan kondisi lingkungan. Sebagai kota otonom baru, tentu saja Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya memiliki struktur pemerintahan yang ideal. Terbukti bahwa kota ini belum memiliki anggota DPRD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk mempersiapkan pemilu terhitung dari berdirinya Kota Otonomi Tangerang Selatan pada Oktober 2008, sedangkan pemilu (pemilihan umum) untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan serentak seluruh Indonesia pada bulan April 2009. Oleh karena itu pengaruh politisi dari Kabupaten Tangerang (wilayah induk sebelumnya) sangat mewarnai dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya. Disamping itu, perubahan organisasi dan personil di pemerintah kota dan dinas pendidikan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam implementasi. Perubahan dari Seksi Dinas (tingkat kecamatan) menjadi Dinas (tingkat kabupaten/kota) membutuhkan perencanaan yang baik dan pemilihan personil yang tepat, sehingga hal ini sedikit menghambat realisasi Subsidi BOS yang sekaligus menunda pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditengarai oleh ketidaktepatan waktu pencairan Subsidi BOS, sehingga menjadikan beban bagi sekolah yang telah mengalokasikan subsidi tersebut untuk kegiatan maupun pembelanjaan tertentu.

4.2. Implementasi

Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III mengklasifikasikan dalam 4 (empat) komponen yang harus mendapatkan perhatian secara profesional dan proporsional yaitu *communication, resources, dispositions*, serta *bureaucratic structure* (Edward III, 1980).

Empat klasifikasi tersebut selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisa implementasi Subsidi BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang Selatan. Ada dua tujuan utama dalam melakukan analisa ini yaitu : *pertama* untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kesesuaian dengan konsep yang dikemukakan Edward III; *kedua*, berusaha membangun kritik bagi konsep Edward III demi mencapai implementasi kebijakan publik yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

4.2.1. *Communication*

Sebuah pertanyaan yang menjadi dorongan untuk melakukan analisa terhadap masalah implementasi dilihat dari sisi komunikasi adalah : Apakah implementasi Subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan ini sudah efektif dan efisien?

Kebijakan Subsidi BOS dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Walikota Tangerang Selatan. Sedangkan pelaksana kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dan SMP-SMP penerima subsidi.

Konsep komunikasi pada umumnya hanya menganalisa apakah pesan yang dikirimkan komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Jika pesan yang dikirimkan dapat diterima secara lengkap, maka komunikasi disebut efektif. Perkembangan ilmu komunikasi saat ini menyatakan bahwa komunikasi disebut efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja bisa diterima pembaca dengan jelas, melainkan juga mempengaruhi dan dilaksanakan komunikan (Simon, 2001).

Pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kebijakan Subsidi BOS antara lain adalah meringankan beban seluruh orang tua siswa SMP tanpa mengganggu usaha peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian akan membuka akses yang lebih luas bagi seluruh siswa lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP dan menekan angka siswa putus sekolah. Sudahkah pesan ini sampai dan dipahami oleh pihak penerima pesan, yaitu dinas pendidikan dan sekolah-sekolah penerima Subsidi BOS?

Dari sisi penyampaian , pesan mengenai kebijakan Subsidi BOS disampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah aparat pelaksana kebijakan dan pihak kedua adalah sekolah yang akan dikenai kebijakan. Pada kebijakan Subsidi BOS , pola penyampaian pesan ini dilakukan secara berjenjang. Dimulai dengan sosialisasi pada di tingkat Kota yang melibatkan tim Subsidi BOS yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, unsur inspektorat dan unsur dinas pendidikan , pemuda dan olahraga.

Tim Subsidi BOS yang berasal dari tiga unsur tersebut menerima pesan yang sama namun dalam tugas yang berbeda-beda. Unsur sistem pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bertugas dalam kaitannya dengan validasi data dan pengucuran dana subsidi BOS, unsur dari inspektorat bertugas dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan subsidi BOS sedangkan unsur dinas pendidikan dengan tugas dalam kaitannya dengan sosialisasi, manajemen, implementasi dan pelaporan pengelolaan subsidi. Dengan demikian yang bertugas mentransmisikan kembali pesan kepada sekolah-sekolah adalah dinas pendidikan.

Dinas Pendidikan membentuk Tim Subsidi BOS. Mereka mentransmisikan kembali pesan yang mereka terima ke ke sekolah-sekolah sasaran kebijakan yaitu sekolah SD dan SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan para Kepala SMP Negeri , peserta yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi adalah seluruh kepala SMP negeri dan SMP Terbuka, yang seluruhnya 17 SMP Negeri dan 7 SMP Terbuka/PKBM. Materi sosialisasi lebih menekankan pada tujuan Subsidi BOS, pengelolaan dana BOS, pelaporan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pertanyaannya adalah : Apakah pesan yang diterima pihak sekolah telah menerima dan memahami pesan dengan baik? Jika telah dipahami, apakah pesan tersebut dilaksanakan dengan sepuh dengan baik, tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan ? Berdasarkan hasil wawancara dapat dilaporkan bahwa pada umumnya para kepala sekolah memahami pesan dengan baik, akan tetapi merasa sangat berat untuk mengimplementasikan di lapangan. Sebagian Kepala Sekolah bahkan tidak dapat melaksanakan pesan secara utuh.

Terdapat pesan yang sangat sulit dijabarkan oleh sekolah, yaitu meringankan beban orang tua siswa dan tetap meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dianggap sebagai dua dimensi yang sangat kontradiktif manakala besarnya subsidi BOS tidak mencukupi sehingga membatasi ruang gerak dalam pengelolaannya.

Tidak dilaksanakannya pesan secara utuh dapat diartikan bahwa pesan tersebut telah mengalami kegagalan. Jika kegagalan tersebut diasumsikan sebagai ketidakjelasan informasi kebijakan, penting artinya untuk menelaahnya dari sudut pandang Edward III. Dia mengemukakan *lack of clarity* (ketidakjelasan) informasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain *complexity of policymaking* (kompleksitas pembuatan kebijakan publik); *public opposition* (penolakan masyarakat); *competing goals and the need for consensus* (tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan); *unfamiliarity of new programs* (sifat kebaruan program kebijakan); *avoiding accountability* (kebijakan yang tidak akuntabel); dan lain sebagainya (Edward III, 1980, hal.26).

Ternyata kebijakan Subsidi BOS tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua murid semata, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini tentu terjadi kompleksitas dalam membuat kebijakan. Subsidi yang besarnya 'hanya' Rp 17.650,00 dan BOS yang berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 47.000,00 per siswa per bulan ternyata masih jauh dari kecukupan untuk mengcover biaya operasional pendidikan di sekolah. Orang tua masih harus menanggung 54% untuk kecukupan minimal. Sementara peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan dana yang relatif besar. Menurut para kepala sekolah, besarnya subsidi BOS yang ideal adalah Rp 150.000,00 per siswa per bulan, agar bisa benar-benar menghapuskan beban orang tua siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pernyataan para kepala sekolah tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil kajian Balitbang Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional yang mengkalkulasi kebutuhan biaya operasional untuk membebaskan setiap siswa dari biaya pendidikan, untuk SD diperlukan minimal Rp 1.200.000,00 dan SMP butuh dana Rp 2.400.000,00 per siswa per tahun. Artinya jika dihitung per bulan, dibutuhkan Rp 100.000,00 dan SMP Rp 200.000,00 per siswa per bulan. Jika

sekarang BOS untuk SMP besarnya Rp 47.000,00 maka masih membutuhkan subsidi sebesar Rp 153.000. Angka tersebut tidak jauh dengan yang diprediksi oleh kepala SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan yang besarnya Rp 150.000,00.

Faktor lain yang menyebabkan ketidakjelasan informasi adalah adanya *public opposition* (penolakan masyarakat). Masyarakat dalam konteks ini dibagi dua, yaitu masyarakat yang menjadi obyek kebijakan karena secara langsung terkena dampak pelaksanaan kebijakan; dan masyarakat yang tidak secara langsung terkena dampak pelaksanaan kebijakan. Masyarakat yang terkena dampak langsung adalah sekolah.

Masyarakat pada umumnya tidak menolak Subsidi BOS ini . Bahkan mereka sangat mendukung kebijakan ini karena dapat meringankan tanggung jawab mereka dalam membayar biaya pendidikan dan mendorong terbukanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Namun bagi sekolah kebijakan Subsidi BOS terdapat sebagian yang menolaknya. Hal ini disebabkan oleh karena besarnya masih jauh dari kebutuhan, di samping itu mereka terikat oleh banyak aturan yang dapat membelenggu kreatif sekolah dalam mengupayakan tambahan dana baik untuk kebutuhan minimal maupun untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Faktor lain yang menjadi penyebab ketidakjelasan informasi adalah adanya kondisi *competing goals and the need for consensus* (tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan). Pemberian subsidi BOS sangat dilematis. Di satu pihak melihat dari sisi manfaat, bahwa berapapun besarnya tentu akan bernilai mengurangi beban orang tua siswa, tetapi di pihak lain melihat dari sisi dampak baik secara fisik maupun psikologis. Dampak secara fisik antara lain bahwa sekolah menjadi berada pada posisi sulit untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perawatan, perbaikan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Ketika pemerintah belum mengimplementasikan BOS dan Subsidi BOS, maka sekolah bisa mengkonsultasikan kepada pihak orang tua siswa dan komite untuk pemecahan suatu masalah. Namun kesulitan itu timbul sekarang ketika telah banyak pembatasan-pembatasan sehingga banyak kebutuhan untuk perawatan gedung, membangun kamar mandi dan lain-lain tidak bisa

tertanggulangi. Dampak yang lain adalah secara psikologis bahwa orang tua maupun siswa menjadi bersikap apatis terhadap dinamika kegiatan di sekolah. Jika sebelumnya mereka cukup besar partisipasinya, belakangan seolah-olah mereka menggantungkan semuanya pada BOS dan Subsidi BOS.

Faktor *unfamiliarity of new programs* (sifat kebaruan program kebijakan) juga turut mempengaruhi masalah komunikasi ini. Kebijakan yang baru perlu penyesuaian oleh para pihak pelaksana. Dalam serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut terkadang membuat para pelaksana di lapangan merasa kebingungan. Mereka harus memahami maksud, tujuan, cara, dampak dan lain-lain yang sama sekali baru. Dalam konteks Subsidi BOS, kebijakan ini sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali baru. Sebelumnya sudah terdapat model implementasi, yaitu ketika mengimplementasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian para pelaksana di lapangan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan. Namun demikian selain kurangnya SDM dari Dinas Pendidikan, SDM dari inspektoran untuk pengawasan dan faktor-faktor teknis yang lain masih harus dibenahi secepatnya.

Faktor penyebab ketidakjelasan informasi lainnya adalah *avoiding accountability* (kebijakan yang tidak akuntabel). Suatu kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan jika kebijakan bersangkutan tidak akuntabel, yaitu tidak adanya tolok ukur/parameter/standar keberhasilan dalam pencapaian. Subsidi BOS jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas pendidikan, tampak seperti gamang. Kegamangan tersebut karena sifatnya hanya sebagai subsidi terhadap sumber dana yang sudah ada, yaitu BOS. Dengan demikian parameter pencapaiannya menjadi tidak jelas. Subsidi ini juga tidak bisa mengklaim begitu saja keberhasilan pembelajaran, karena ada sumber pendanaan yang lain, yaitu BOS dan SPP dari siswa. Hal ini perlu dipikirkan kembali agar peruntukannya mudah diukur.

4.2.2 Resources (Sumber-sumber)

Seperti sudah dijelaskan di atas, sumber-sumber ini meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia seperti informasi, keuangan serta sarana dan prasarana. Menurut Edward III *Resources* memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4.2.2.1 Staff

Menurut Edward III pembahasan mengenai staff tidak hanya membicarakan besaran saja. Karena keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan (kualitas) staff pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, Edward III menyarankan dua besaran pokok dalam menganalisa Resources yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan publik, yaitu menganalisa *size* dan *skills*.

Seperti ungkapan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan terdapat kelemahan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan. Keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi pencapaian dalam implementasi ini menyangkut luasnya jangkauan sehingga tidak mampu dijangkau oleh tenaga dinas pendidikan. Tidak hanya Subsidi BOS untuk SMP saja (17 sekolah dan 7 SKBM) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan juga untuk SD yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 85 SD. Di samping itu, pada tahap penataan awal ini, banyak sekali pekerjaan Dinas Pendidikan yang harus segera diselesaikan, seperti misalnya reorganisasi, pendataan, penyusunan program, validasi siswa dan guru, renumerisasi dan implementasi subsidi-subsidi.

4.2.2.2 Informasi

Dua hal yang penting dibahas berkaitan dengan informasi sebagai faktor berpengaruh kedua dalam konteks sumber daya adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan harus dilakukan. Informasi selanjutnya berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang harus diketahui berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan.

Agar implementasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, maka informasi baik yang berhubungan dengan cara mengimplentasikan maupun aturan - aturan hukumnya harus jelas. Ketidaktepatan informasi akan menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga tujuan-tujuan yang dicanangkan bisa tidak tercapai dengan baik.

4.2.2.3 Authority

Authority atau wewenang, didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hal.1272).

Kebijakan Subsidi BOS memiliki struktur yang berjenjang mulai dari Walikota sebagai pengambil kebijakan sampai pada sekolah sebagai sasaran kebijakan. Setiap tingkatan birokrasi memiliki kewenangan sendiri-sendiri. Setelah kebijakan Subsidi BOS ditetapkan oleh Walikota Tangerang Selatan, selanjutnya dibentuk tim yang masing – masing terdiri dari asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dinas pendidikan dan inspektorat. Mereka memiliki kewenangan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam kaitannya dengan implementasi Subsidi BOS, lembaga ini memiliki kewenangan dalam hal realisasi pembayaran. Setelah mendapatkan validasi data dari dinas pendidikan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang menerima dana dan besarnya, maka asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat membuat surat perintah pembayaran (SPP) ditujukan kepada Bank-bank yang menyimpan giro dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya lembaga ini juga menerima laporan pertanggungjawaban yang telah divalidasi oleh dinas pendidikan. Demikian bergulir selanjutnya

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Lembaga ini memiliki kewenangan dalam melakukan sosialisasi, validasi data dan laporan, administrasi, dan pembinaan dalam pengelolaan Subsidi BOS. Setiap sekolah (negeri) calon penerima subsidi harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan. Pengajuan tersebut merupakan bagian dari tertib administrasi yang sebelumnya sudah disosialisasikan. Tugas lain adalah memvalidasi data. Berdasarkan ketentuan, besarnya subsidi yang diterima oleh sekolah didasarkan pada jumlah siswa pada sekolah tersebut. Dengan demikian validasi data tentang jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah menjadi

penting untuk menentukan besarnya dana yang akan digulirkan. Selain itu, dinas pendidikan juga mengadministrasikan segala data yang berhubungan dan diperlukan dalam rangka implementasi Subsidi BOS tersebut.

3. Inspektorat

Dalam kaitannya dengan implementasi Subsidi BOS, kewenangan lembaga ini adalah melakukan monitoring dan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap proses yang sedang berjalan, maupun laporan pertanggungjawaban pengelolaan subsidi BOS.

4.2.2.4 *Facilities* (fasilitas-fasilitas)

Sumberdaya lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Edward III (1980:53) mengemukakan bahwa sumber daya keuangan (finansial) merupakan faktor penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Apabila kebijakan yang dibuat adalah kebijakan publik, sudah tentu dukungan keuangan berasal dari Pemerintah. Semakin tinggi dukungan dana dari pemerintah, semakin baik implementasi kebijakan, demikian pula sebaliknya, semakin kecil dukungan financial bagi suatu kebijakan, akan dapat menjadi penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan.

Fattah (2006: 59-61) mengelompokkan biaya pendidikan di tingkat sekolah, yang diambil dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dalam enam kelompok yaitu : (1) Peningkatan Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) (2) Pemeliharaan dan Penggantian Sarana dan Prasarana Pendidikan, (3) Peningkatan pembinaan kegiatan siswa: Latihan dan Sarana, (4) Kesejahteraan, (5) Rumah Tangga Sekolah dan BP3/ Komite, (6) Biaya Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pelaporan.

Terkait dengan pembiayaan pendidikan gratis, sumber pendanaan pendidikan gratis di Kabupaten Tangerang berasal dari program bantuan dana operasional pemerintah pusat yaitu program BOS. Selain dipenuhi oleh pemerintah pusat, juga ditambahkan dari anggaran daerah melalui BOSDA.

Umumnya kepala sekolah menyatakan dana bantuan yang diberikan pemerintah masih jauh bisa memenuhi kebutuhan riil sekolah. Sehingga untuk menyiasati kurangnya dana tersebut, ada beberapa program sekolah yang harus dikurangi seperti keikutsertaan sekolah dalam lomba-lomba

4.2.3 Dispositions

Pelaksana kebijakan memiliki nilai-nilai anutan yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan nilai ini menimbulkan perbedaan kebijakan atau penilaian terhadap kebijakan yang ada. Jika perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan cukup besar dan cenderung berlawanan arah, maka pelaksana kebijakan akan berada pada tahap yang sulit. Keengganan, bahkan friksi, akan muncul menghambat pelaksanaan kebijakan.

Umumnya para kepala sekolah menyikapi kebijakan subsidi BOS tampaknya tidak sepenuh hati. Hal ini dikarenakan menurut mereka subsidi BOS akan mempersulit mereka untuk mengembangkan kreatifitas penggalangan dana, manakala telah terbelenggu oleh aturan-aturan yang menyertai kebijakan Subsidi BOS tersebut. Di sisi lain, kebutuhan untuk operasional dan peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dana yang cukup besar, sementara bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah relatif kecil, karena kurang dari 50% dari kebutuhan operasional. Apalagi jika tuntutananya harus memacu laju kualitas pendidikan, tentu hal ini masih sangat jauh.

Kecilnya subsidi baik BOS maupun subsidi BOS. Membuat para kepala sekolah gamang dalam melangkah ke depan. Dengan adanya subsidi BOS menambah kompleksitas pemahaman yang terjadi di masyarakat. Kompleksitas tersebut pada akhirnya membuat derap langkah para orang tua dalam partisipasinya terhadap peningkatan pembelajaran menjadi tidak lagi serempak. Mereka menyikapi bermacam-macam tentang subsidi BOS ini sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Dalam kondisi dilematis seperti ini, sangat sulit bagi sekolah untuk mengharapkan partisipasi orang tua siswa lebih meningkat.

4.2.4. *Bureaucratic structure (Struktur Birokrasi)*

Menurut Edwards III, hal terpenting yang harus dibahas ketika membicarakan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentation. Secara resmi (formal), penerapan kebijakan Subsidi BOS tidak memiliki SOP. Selama ini panduan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan Subsidi BOS adalah panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan adanya implementasi terhadap suatu kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktural formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran dalam sistem implementasi kebijakan.

Badan pelaksana yang mengimplementasikan Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan terdiri dari Dinas Pendidikan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Kota dan Sekolah (SMP-SMP penerima Subsidi BOS). Dinas Pendidikan memiliki tugas dalam lingkup verifikasi, sosialisasi, rekomendasi, pembinaan dan pendayagunaan serta penerimaan pelaporan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki kewenangan dalam membuat perintah pembayaran subsidi, dan Inspektorat Kota membidangi pengawasan penggunaan Subsidi BOS tersebut. Dengan demikian tanggungjawab implementasi tidak mutlak pada Dinas Pendidikan. Ketiga lembaga tersebut memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda, sehingga kadang-kadang perbedaan ini menjadi penghambat implementasi.

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja seperti SOP (*Standart Operating Procedures*). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi

keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan-peraturan. Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk implementasi dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada.

Akan tetapi SOP kadang-kadang memunculkan dampak yang kurang realistis. Penyusunan program pengelolaan Subsidi BOS ini terkesan seragam antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Tentunya setiap sekolah memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, akan tetapi karena peruntukan subsidi BOS telah dibatasi sedemikian rupa, sehingga sekolah-sekolah memaksakan penggunaan subsidi tersebut pada sektor yang sebenarnya kurang prioritas. Yang terpenting bagi sekolah, penyerapan subsidi tersebut mencapai 100%. Contoh konkret : sekolah sebenarnya membutuhkan dana untuk perbaikan atap gedung. Karena ketentuan penggunaan Subsidi BOS tidak mengatur sebagaimana keperluan tersebut, maka dengan terpaksa sekolah membelanjakan subsidi tersebut untuk pengadaan komputer dan perlengkapannya.

Organisasi yang paling dominan dalam implementasi Subsidi BOS adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas membawahi langsung Seksi Bina SMP, dimana Seksi inilah yang berkomunikasi langsung dengan sekolah-sekolah penerima subsidi. Persoalannya bukan terletak pada panjang pendeknya struktur, tetapi pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu kendala yang krusial dalam implementasi kebijakan, baik subsidi BOS maupun yang lain. Pada saat ini masalah tersebut dalam perhatian yang cukup serius untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dampak dari keterbatasan SDM tersebut adalah mempengaruhi kecenderungan pelaksana dalam implementasi Subsidi BOS. Kecenderungannya antara lain, belum terbentuknya pola evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang dapat menjamin kontinuitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Di samping cara-cara yang disesuaikan dengan ukuran dasar, pemakaian waktu dan pemborosan dapat menghambat implementasi. Setiap komponen dalam sistem yang harus menjelaskan program-program atau proyek-proyek menempatkan prioritas-prioritas bagi tindakan pada program-program tertentu. Sementara pada sisi yang lain, prioritas-prioritas untuk program-program biasa tidak sama besarnya dengan perhatian untuk program-program baru. Biasanya program-program baru mendapat prioritas yang lebih baik. Pemborosan akan terjadi bila cara-cara yang lazim ditujukan untuk satu tujuan dipertahankan selama waktu tertentu dan diterapkan dalam keadaan-keadaan dimana cara-cara tersebut tidak diperlukan sama sekali. Hal ini bahwa suatu cara tertentu yang berhasil untuk implementasi kebijakan belum tentu berhasil untuk implementasi kebijakan yang lain.

Subsidi BOS merupakan program baru. Banyak program lain yang telah berjalan cukup lama, misalnya penuntasan buta aksara, pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), peningkatan kualifikasi guru, sertifikasi guru dan lain-lain. Subsidi BOS merupakan program yang berkaitan langsung dengan pengucuran uang. Program ini berpotensi gagal jika dalam pengelolaannya sama dengan program-program lain yang tidak melibatkan pengucuran uang. Kegagalan yang dimaksud berupa ketidaktepatan penggunaan uang, pengawasan dan tindak lanjutnya. Pelaporan bisa dengan sangat mudah dibuat bahwa penyerapan mencapai 100% dengan alokasi penggunaan sesuai dengan petunjuk yang ada, tetapi efektifitas dan terpenuhinya kebutuhan yang prioritas bisa dipertanyakan.

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan (implementasi). Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Birokrasi-birokrasi dimana SOP tidak sangat melekat apakah karena badan yang baru atau tingkat pergantian personil yang tinggi, mungkin lebih tanggap terhadap kebutuhan bagi perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya. Namun demikian, disamping menghambat implementasi, kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Apakah SOP telah melekat pada birokrasi-birokrasi di Kota Tangerang Selatan, belum dapat dipastikan. Sebagai kota otonom baru tentu Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki dinamika yang cukup tinggi dalam mengejar ketertinggalannya dengan kota-kota atau daerah lain. Badan baru dan personil baru sangat mewarnai pemerintahan kota ini.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi pencapaian dalam implementasi, seperti diungkapkan oleh Meter dan Horn. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan mungkin menolak untuk berperanserta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu tingkah laku yang kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan seperti ini, Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi.

Apa yang dikawatirkan Meter dan Horn tampaknya tidak terjadi di sini. Pada dasarnya kebijakan Subsidi BOS merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meskipun berdampak pada penurunan kesejahteraan pada sebagian guru, tetapi tidak terjadi penolakan di SMP-SMP penerima. Implementasi Subsidi BOS relatif tidak ada kendala yang berarti. Yang perlu mendapat penajaman adalah agar pengelolaan subsidi BOS lebih besar

dimanfaatkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas.

Menurut Edward III, sementara perhatian utama untuk menitikberatkan kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana, perhatian menyangkut konflik, kecenderungan juga dapat diarahkan kepada empat komponen lain dari model yang secara langsung mempengaruhi faktor ini, yaitu: sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari organisasi atau yurisdiksi pelaksana. Hal ini berarti bahwa konflik kecenderungan yang mungkin terjadi meliputi semua variabel model implementasi.

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagai pelaksana program dituntut melakukan kerja efektif dengan banyaknya program pemerintah terhadap pendidikan. Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan serta merta menambah beban pelaksana program ini. Skala prioritas yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan program kebijakan pusat dan daerah menimbulkan masalah ketidaktepatan waktu penyelesaian pelaksanaan program.

Sifat struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggungjawab bagi suatu bidang sering tersebar diantara beberapa organisasi, sering pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan implementasi. Lembaga eksekutif mencantumkan banyak badan secara terpisah dalam undang-undang agar dapat mengamatinya lebih teliti dan dalam usaha menentukan perilaku mereka. Sementara itu, badan-badan yang ada bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Hal ini disebabkan oleh kecemasan akan kekurangan akses khusus yang mereka miliki terhadap pejabat-pejabat atau merubah secara besar prioritas-prioritas dari program-program yang ada. Selain itu, kelompok-kelompok kepentingan juga akan mempunyai pengaruh dalam mendorong fragmentasi. Sifat multidimensi dari banyak kebijakan juga ikut mendorong terjadinya fragmentasi. Konsekuensi yang paling buruk dari

fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda, mendorong para birokrat ini untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi yang baik. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. Implementasi subsidi BOS ini ditangani oleh tiga badan eksekutif, yaitu Dinas Pendidikan, Inspektorat dan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggungjawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. Disamping itu, karena masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting akan terdampar antara retak-retak struktur organisasi. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah, dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya. Horn mengatakan, konflik-konflik kecenderungan terjadi karena pejabat-pejabat bawahan (para pelaksana) menolak tujuan-tujuan dari pejabat-pejabat atasan mereka. Tujuan-tujuan dan saran-saran mungkin ditolak dengan beberapa alasan seperti : melanggar nilai-nilai pribadi para pelaksana atau kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran itu melanggar arti kepentingan diri para pelaksana, atau mengubah sifat-sifat organisasi dan prosedur-prosedurnya yang ingin dipertahankan oleh para pelaksana.

Secara internal fragmentasi di dalam struktur dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggara program dapat diminimalisir, akan tetapi fragmentasi dengan stakeholder implementasi terjadi akibat sosialisasi program yang tidak merata ke sekolah penerima program Subsidi BOS ini.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Edward III. Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada implementasi suatu kebijakan merupakan pusat perhatian yang besar. Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil implementasi suatu kebijakan. Sekalipun dampak dan faktor-faktor ini pada implementasi mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Edward III, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksanan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mempunyai sumber ekonomi yang terbatas, sehingga tidak bisa menggandeng tenaga lain di luar struktur organisasi untuk membantu implementasi Subsidi BOS ini, sehingga faktor ekonomi juga mempengaruhi kinerja dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mempunyai struktur organisasi yang sempit, hal ini juga mempengaruhi keleluasaan dalam menyelenggarakan program Subsidi BOS sesuai dengan sasaran dan waktu program yang ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

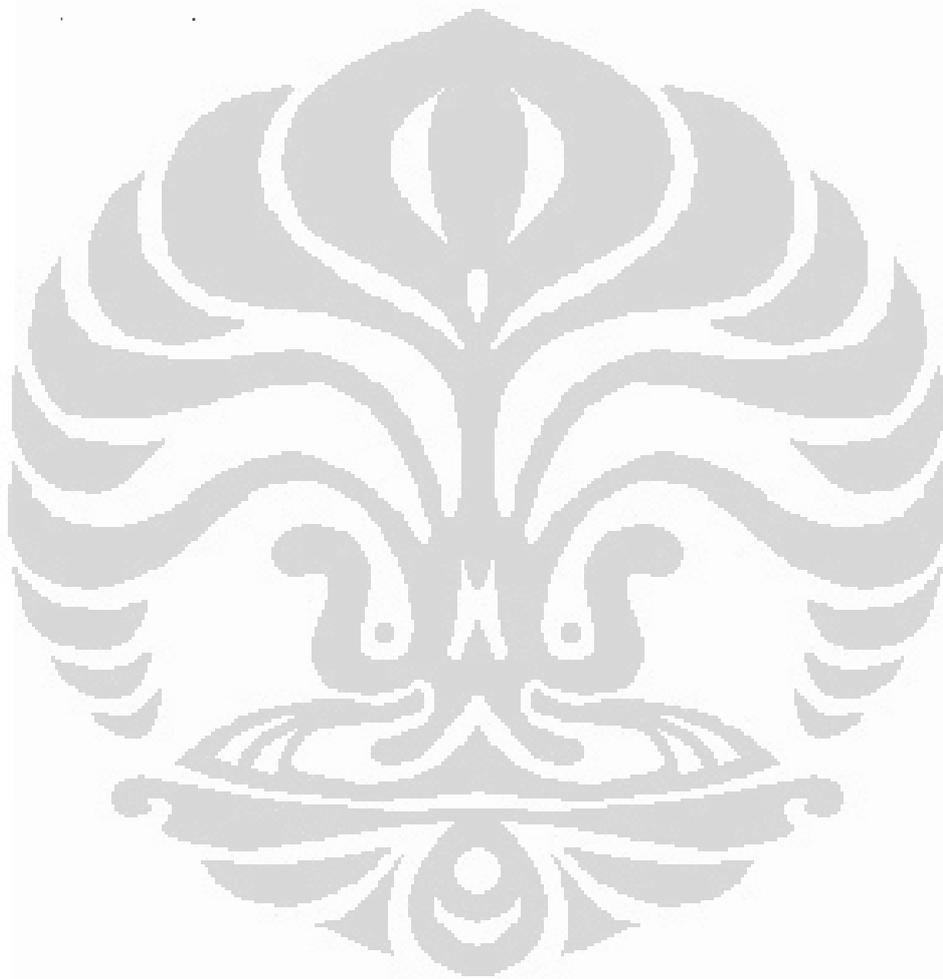
Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Subsidi BOS pada jenjang SMP dan implementasinya di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut : Kebijakan Subsidi BOS dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Kebijakan Subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan ditujukan untuk jenjang SD dan SMP, dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk subsidi, sebagai usaha menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan menuju Tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan. Implementasi Subsidi BOS baru bisa dilakukan terhadap SD dan SMP Negeri yang ada. Sementara sekolah swasta belum mendapatkan, karena keterbatasan dana yang ada. Setiap SD negeri menerima Subsidi BOS sebesar Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan pada jenjang SMP besarnya Subsidi BOS adalah Rp 17.650,00 per siswa per bulan. Jumlah SD Negeri yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah, sedangkan SMP yang menerima subsidi BOS adalah 17 sekolah.

Dilihat dari empat faktor/elemen seperti yang dikemukakan Edward III, secara umum implementasi subsidi BOS mekanismenya mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh karena lambatnya proses verifikasi dan demi efisiensi, mengingat jumlah tenaga pengawas yang belum memadai.

B. Saran

Pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mengcover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif

Implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya.



DAFTAR REFERENSI

- Abidin,Said Zaenal, 2004, *Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Pancur Siwah, Jakarta
- Anderson, James E. , 1979, *Public Policy Making*. Holt, New York : Rinehart and Winston
- Arcaro, 2006, *Manajemen Pendidikan Formal*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barnard, Chester, 1999, *Kebijakan Kinerja*, Prawirosentono
- Buce J Batjeran, 2005, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Budiharjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chamberlin J Gordon, 2008, *Education Fund*, Oxford University Press, Toronto
- Drucke, Peter, 2002, *Menuju SDM Berdaya*, Kisdarto
- Duncan, W.Jack, 1981, *Organizational Behavior*, Houghthon Mifflin, edisi 2 , Boston
- Dunn, William N, 1984, *Public Policy Analysis : An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey
- Dwijowijoto, Riant Nugroho,2006, *KebijakanPublik Untuk Negara-Negara Berkembang; Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta

- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc, USA
- Effendi, Sofian, dkk. , 2004, *Pendidikan Untuk Semua, Advokasi terhadap Kebijakan Pendidikan*, Komisi Hak Azasi Manusia
- Fattah Nanang, DR, 2004, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Freire, Paulo., 1999, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, READ dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gaffar, M. Fakry. , 2000, *Pembiayaan Pendidikan : Permasalahan dan Kebijaksanaan dalam Persepektif Reformasi Pendidikan Nasional*, IKIP Bandung, Bandung
- Hasbullah, 2006, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hornby, A.S 1995, *Public Policies : An Implementatiton Procces*. Harvard Univercity Press
- Howlet, Michael dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*, Oxford University Press, Toronto
- Kristiadi , J.B, 2007 , *Kebijakan-kebijakan Pembiayaan Pendidikan* , Grafindo, Jakarta

- Irawan, Prasetya, 2007, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta
- Lester, James P dan Josepgh Stewart, 2000, *Public Policy : An Evaluation Approach*, Belmenot, USA
- Liliawati.E. Mulyono,1998, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo, Jakarta
- Lindblom, Charles, 1968, *The Policy Making Process*, Englewood Clifft, NJ Pentice Hall
- Meter, Donald S. Van dan Horn, Carl E Van, 1975, *The Policy Implentation Process : A Conteptual Framework dalam Administration and Society*, Vol 6
- Melly G Tan, 1982, *Masalah Perencanaan Penelitian dalam Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat* , Gramedia, Jakarta
- Ministry of National Education Republic of Indonesia, 2007, *Nine-Year Basic Education In Indonesia: Progress Challenges and Future Plan*, Jakarta.
- Mubyarto, 1999, *Membangun Sistem Ekonomi*, Kanisius,Yogyakarta,Edisi Pertama,Desember
- Muhadjir, Noeng, 2004, *Kebijakan dan Evaluasi research, Kebijakan dan Perencanaan*, Rake Sarasin, Yogyakarta

- Nandika, Dodi, 2007, *Pendidikan di tengah Gelombang Perubahan*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Niron D, 1986, *Pembiayaan Pendidikan*, IKIP Yogyakarta , Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Osborne, David, Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan tahun 2005 dengan judul *Mewirusahaakan Birokrasi : Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, 2005, Penerbit PPM, Jakarta
- Price, Don K., 1964, *The Scientific Estate*, Crambridge Mass : Harvard University Press
- Rohiat, 2009, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* , Rosda Karya , Bandung
- Setyasih Ocih, 2005, *Pendekatan Belajar Aktif*, Dirjen Dikti, Jakarta
- Sudjud A, 1987, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, IKIP Yogyakarta, Yogyakarta
- Sudjana dan Ibrahim, 2001, *Ilmu Pendidikan* , UPI, Bandung
- Suhardi, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, STKIP Setia Budi, Banten
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik* , Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial, CV Alfabeta, Bandung
- Sumaryadi, I. Nyoman, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, CV Citra Utama , Jakarta

- Suparmoko.M, 2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, Edisi Pertama
- Suparmoko.M, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta
- Supriadi Dedi, Prof. Dr, 2004, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Riyanto, 1996, *Guru Profesional*, Kanisius, Yogyakarta
- Tika, 1996, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, IKIP Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Utomo, Warsito, 2004, *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wirakartakusumah, 1998, *Paradigma Baru Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta

DAFTAR REFERENSI DARI DEPDIKNAS :

- Depdiknas, 2003, *Wawasan Kependidikan*, Jakarta
- Depdiknas, 2006, *Petunjuk Teknis Subsidi Peningkatan Mutu melalui Dana APBNP 2006*, Jakarta
- Depdiknas, 2007, *Kebijakan Direktorat*, Jakarta
- Depdiknas, 2007, *Informasi Program Direktorat*, Jakarta

Depdiknas, 2007, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta

Depdiknas, 2007, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2007*, Jakarta

Depdiknas, 2008, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan SMP SSN*, Jakarta

Depdiknas, 2008, *Buku Panduan BOS Buku*, Jakarta

Depdagri dan Depdikbud, 1996, *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jakarta

Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2005, *Rencana Strategis*, Jakarta

DAFTAR REFERENSI DARI WEB SITE :

http://tangerangselatankota.go.id/compilation_geografis.php

<http://tangerangselatan.wordpress.com>

DAFTAR REFERENSI DARI PROPOSAL

SMP Negeri 1 Tangerang Selatan, 2009, *Proposal Permohonan BOP*, Tangerang Selatan

SMP Negeri 5 Tangerang Selatan, 2009, *Proposal Permohonan BOP*, Tangerang Selatan

*Lampiran 1***KODING DATA**

KODE	KATA KUNCI
1	Latar belakang dirumuskannya kebijakan Subsidi BOS
2	Kebijakan subsidi BOS merupakan prioritas dalam rencana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan
3	Proses dan mekanisme perumusan kebijakan subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan
4	Interaksi yang dilakukan eksekutif dengan DPRD maupun pihak lain dalam merumuskan kebijakan subsidi BOS
5	Pihak- pihak yang terlibat, atau setidaknya memberi masukan dalam perumusan kebijakan untuk memberikan Subsidi BOS (BOP) pada jenjang SMP
6	Peranan Dinas Pendidikan dalam mensukseskan pengelolaan Subsidi BOS agar berdaya guna dan berhasil guna
7	Ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk mendapatkan Subsidi BOS
8	Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka pengelolaan Subsidi BOS yang efektif dan efisien
9	Besarnya Subsidi BOS dan petunjuk penggunaannya
10	Sanksi yang diberikan terhadap penyelewengan pengelolaan Subsidi BOS
11	Proses dan mekanisme subsidi BOS bisa diterima oleh sekolah
12	Pengelolaan subsidi BOS oleh sekolah
13	Sosialisasi penggunaan subsidi BOS kepada orang tua murid
14	Sekolah masih menarik dana dari orang tua peserta didik dalam pembiayaan operasional sekolah setelah adanya subsidi BOS
15	Tingkat Partisipasi Orang Tua terhadap Kegiatan Sekolah.
16	Kegiatan siswa yang dibiayai Subsidi BOS
17	Kesejahteraan guru dengan adanya subsidi BOS
18	Mekanisme mendapatkan alokasi biaya dari subsidi BOS untuk kegiatan tertentu

19	Terdapat pembiayaan (dengan menggunakan subsidi BOS) yang diluar APBS
20	Pendapat sekolah dengan adanya Subsidi BOS
21	Merasa terbantu dengan Subsidi BOS
22	Pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi BOS
23	Dampak Subsidi BOS bagi kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan
24	Dampak subsidi BOS terhadap mutu pembelajaran
25	Tingkat partisipasi orang tua peserta didik setelah adanya subsidi BOS
26	Harapan sekolah terhadap subsidi BOS untuk selanjutnya
27	Mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana untuk kegiatan peserta didik
28	Komentar para kepala sekolah tentang implementasi Subsidi BOS untuk jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan
29	Tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan Subsidi BOS
30	Catatan khusus tentang kekurangan dan kelebihan implementasi Subsidi BOS
31	Pengaruh Subsidi BOS terhadap kegiatan ekstrakurikuler
32	Terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang ditiadakan karena tidak adanya biaya pendukung
33	Penggunaan subsidi BOS selalu melibatkan guru
34	Langkah-langkah jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan
35	Tugas Bendahara sekolah berkaitan dengan pengelolaan subsidi BOS
36	Penggunaan Subsidi BOS menurut bendahara
37	Mekanisme pencairan dana subsidi BOS untuk pembiayaan kegiatan sekolah
38	Semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan subsidi BOS dibukukan secara rapi

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA DAN KODING

INFORMAN	TRANSKRIP HASIL WAWANCARA dan KODING
Walikota	<p>(1) Untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan. Dana BOS yang diterima sekolah, menurut laporan dari Dinas Pendidikan, masih sangat jauh dari minimal biaya riil operasional sekolah. Disamping itu, ya tentu saja merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>(2) Oh ya. Mengingat angka partisipasi kasar (APK red) di wilayah ini belum maksimal. Jadi supaya masyarakat memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau.</p> <p>(3) Ada tim, mengumpulkan data dari dinas pendidikan, masukan dari masyarakat dan lain-lain, kita verifikasi, didiskusikan dengan berbagai pihak, baru diputuskan dan diimplementasikan.</p> <p>(4) Ya dilakukan diskusi, tukar pendapat begitu dengan DPRD kabupaten Tangerang. Kita kan belum punya DPRD sendiri, jadi ya ke DPRD sana (Kabupaten Tangerang, red). Mereka mendukung.</p> <p>(5) Banyak,...ada dinas (dinas pendidikan, red), LSM, tokoh masyarakat, biro-biro. Ya ada yang secara formal, dan ada pula yang tidak formal. Tetapi semua kan bagus, bisa dijadikan bahan pertimbangan.</p>

Dinas Pendidikan	<p>(6) Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang membidangi pendidikan tentu sangat relevan dengan kebijakan Subsidi BOS. Banyak hal peranannya, diantaranya, memberi masukan tentang permasalahan yang prioritas, memback up kebijakan, sosialisasi, administrasi, validasi, pembinaan dan lain-lain.</p> <p>(7) Ketentuannya tidak jauh dari ketentuan BOS. Tapi begini, sebenarnya itu adalah ketentuan dalam pengelolaan. Kalau ketentuan bagaimana sekolah itu seharusnya,...tidak ada. Justru semakin jelek sekolahnya semakin prioritas...ha, ha. Namun demikian, saat ini yang bisa direalisasikan baru pada sekolah negeri. Jadi ketentuan untuk saat ini, ya SD dan SMP Negeri. Kalau swasta belum.</p> <p>(8) Kita memang baru tahap pertama ini, untuk semester Juli-Desember 2009. Jadi perlu sosialisasi. Mereka kita undang, ada 85 SD Negeri dan 17 SMP Negeri serta 7 PKBM. Kita beri penjelasan yang menyangkut tata cara pengusulan, tata cara pengelolaan dan tata cara pelaporan. Setelah itu, mereka mengajukan proposal. Kita verifikasi, jika oke ya oke. Yang belum oke, silakan diperbaiki.</p> <p>(9) Untuk SD Rp 10.000,00 dan SMP Rp 17.650,00. Fungsinya kan sebagai subsidi (bantuan) untuk BOS, jadi penggunaannya ya seperti dana BOS.</p> <p>(10) Pasti ada. Ada sanksi ringan, ada sanksi berat. Tergantung tingkat kesalahannya.</p>
------------------	---

Kepala SMP 5 Kota Tangerang Selatan (a) dan	(11) a. (Kepala SMP 5) Pertama kita diberi pengarahan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini Tim Subsidi BOS (BOP). Setiap sekolah agar mengajukan proposal yang didalamnya berisi tentang jumlah murid, rencana penggunaan subsidi, profil sekolah, dan lain-lain. Setelah menerima bantuan diharapkan setiap sekolah mensosialisasikan - kepada orang tua siswa.
Kepala SMP 1 Kota Tangerang Selatan (b)	Setiap anak Rp 17.650. Jadi dihitung berdasarkan jumlah siswa. Kita punya 1065 siswa. Hitung saja. Sekitar Rp 18 juta sekian gitu, per bulan. Kalau per tahun sekitar Rp 112 juta lah.
	b. (Kepala SMP 1) Ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan, membuat proposal untuk periode Juli-Desember 2009. Kebetulan karena di sini juga merupakan induk dari SMP Terbuka, maka kita mengajukan untuk kedua lembaga tersebut. Setelah cair ada pemberitahuan, lalu kita ambil dananya di kantor pos. Begitu SPJ disampaikan, dana siap dicairkan, begitu seterusnya. Tapi untuk subsidi BOS, populemnya di sini BOP ini, kita baru terima satu periode saja. Satu smester, Juli-Desember.
	(12) a. (Kepala SMP 5) Pengelolaannya harus sesuai dengan proposal yang dibuat. Pada intinya BOP untuk membantu BOS. Namun karena BOS telah dialokasikan sesuai dengan APBS, maka penggunaan subsidi BOS ini untuk rencana belanja yang belum tercover olah BOS, yaitu sebagian alat tulis kantor (ATK), komputer dan belanja modal yang lain. Jadi seolah-olah subsidi ini datangya terlambat. Kita sudah jalan dengan APBS menggunakan BOS dan SPP. b. (Kepala SMP 1) Sudah ada petunjuknya. Jadi kita tidak boleh menyimpang dari petunjuknya. Dalam petunjuk itu

ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu antara lain belanja ATK, kegiatan kesiswaan, kurikulum, perawatan, daya dan jasa dan lain-lain.

- (13) a. (Kepala SMP 5) Kita undang para orang tua siswa untuk rapat bersama komite sekolah. Disamping itu setiap bulan harus kita pampang di papan pengumuman yang strategir tentang pengelolaan dana tersebut.
- b. (Kepala SMP 1) Kita sampaikan kepada orang tua siswa dalam rapat. Disamping itu juga kita pasang di pengumuman.
- (14) a. (Kepala SMP 5) Ya, masih. Selain BOS dan Subsidi BOS ini operasional pembiayaan kegiatan pendidikan masih harus menarik dana dari masyarakat, dalam hal ini orang tua murid. SPP per bulan bervariasi antara Rp 20.000 sampai Rp 50.000. Untuk bantuan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) diminta sekali pada saat penerimaan siswa baru, besarnya bervariasi juga antara Rp 800.000 sampai Rp 1.500.000. Tapi dana yang ini, kadang-kadang anak sampai lulus pun belum dilunasi. SPP masih dibutuhkan, karena dana BOS tidak cukup untuk operasional. Waktu belum ada BOS saja setiap siswa harus membayar lebih dari Rp 100.000. Sedangkan BOS jika dibagi per bulan hanya sekitar Rp 47.000. Maka masih ada juga DSP untuk perawatan dan kegiatan.
- b. (Kepala SMP 1) Masih-masih. Untuk SPP per bulan Rp 60.000, sedangkan DSP bagi siswa baru antara Rp 800.000 sampai Rp 2.000.000. Semua kita kembalikan untuk operasional. Kita sedang membangun landasan yang kuat untuk menuju SSN. SDM nya kita tingkatkan. Rasio guru – murid kita per kecil. Percuma kalau nanti SSN pondasinya

	<p>tidak kuat, akhirnya nggak bisa bertahan.</p> <p>(15) a. (Kepala SMP 5) Ya, biasalah Mbak. Maunya orang tua murid kan sekolah gratis. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lebih banyak, karena khawatir malah menimbulkan masalah. Sekolah harus mengantisipasi kegiatan melalui perencanaan yang baik agar pembiayaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika sekiranya tidak ada dana, ya lebih baik kegiatan ditiadakan. Misalnya perlombaan, upacara di tempat lain. Kelihatannya hanya perlombaan, kan itu memakan biaya yang besar, untuk transportasi, persiapan dan lain-lain.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Ya itu tadi. Ada kendala psikologis pada orang tua setelah ada bantuan BOS, BOP maupun bantuan yang lain. Padahal kadang-kadang belanja kami sebulan lebih dari Rp 200.000.000. Tapi bagi saya yang penting menyiapkan SDM guru dan siswa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segera menjadi SSN (Sekolah Setandar Nasional , red).</p> <p>(16) a. (Kepala SMP 5) Pada kegiatan ekstrakurikuler, penggunaannya untuk membeli alat-alat. Misalnya beli bola, pengecatan lapangan. Sedangkan pada pengayaan digunakan untuk penggandaan soal. Kalau honorarium atau kesejahteraan guru dianggarkan dari SPP. Jadi karena peralatan dibeli dari subsidi BOS, otomatis kesejahteraan pembina kegiatan akan lebih baik, karena anggaran belanja alat-alat sudah ada posnya, sedangkan SPP tidak dialokasikan ke sana. Maka dapat untuk meningkatkan honorarium.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Bagi yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tentunya bisa. Kan ada yang menganggarkan</p>
--	---

	<p>untuk belanja modal atau barang. Yang seperti itu tidak bisa dilihat langsung dampaknya terhadap pembelajaran. Kalau kita di sini sebagian untuk menopang kegiatan ekstrakurikuler. Maka banyak kejuaraan yang kami dapat, baik tingkat kota maupun provinsi Banten. Bahkan termasuk kejuaraan tunju itu untuk tingkat nasional.</p> <p>(17) a. (Kepala SMP 5) Setidaknya setelah diberlakukannya BOS. Tapi jika dibandingkan sebelum-sebelumnya, angka ini menurun. Pada waktu sebelum BOS kan SPP siswa lebih dari seratus (<i>seratus ribu rupiah, red</i>). Sedangkan sekarang jauh di bawah. Jadi limitnya setelah ada BOS.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Untuk guru internal sekolah ya, tidak. Para pembina ekstrakurikuler kan berasal dari luar. Jadi alokasinya untuk mereka.</p>
	<p>(18) a. (Kepala SMP 5) Kita membuat perencanaan anggaran untuk dimasukkan dalam APBS. Jika disetujui, ya setiap kegiatan kita mintakan anggarannya. Misalnya akan beli peralatan, ...dikeluarkan oleh bendahara untuk keperluan itu. Kewajiban pengguna anggaran adalah menyetorkan semua kwitansi atau nota transaksi kepada bendahara untuk bukti fisik laporan keuangan. Jadi misalnya saya membeli bola di toko, maka nota pembelian saya serahkan ke bendahara.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Sudah jelas pos-posnya di dalam APBS maupun APBS Perubahan. Kita tinggal mengajukan kepada bendahara untuk pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan.</p> <p>(19) a. (Kepala SMP 5) Semua akan dipertanggungjawabkan dengan APBS. Jadi semua akan diakomodir oleh APBS Perubahan. Maka yang diluar sama sekali ya tidak ada. Ada</p>

	<p>perubahan APBS kan karena ada subsidi BOS tadi, mau- nggak mau ya harus diadakan perubahan APBS agar semua pemasukan yang sifatnya rutin bisa terakomodir.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Ya seperti tadi, untuk lomba, upacara, perayaan-perayaan, kadang-kadang anggarannya di APBS <i>underestimate</i>.</p> <p>(20) a. (Kepala SMP 5) Kami berharap ada peningkatan baik BOS, Subsidi BOS maupun bantuan yang lain agar kegiatan sekolah dapat ditingkatkan. Kegiatan sekolah kan tidak hanya ekstrakurikuler saja. Masih banyak yang lain bisa diselenggarakan jika tersedia dananya.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Semuanya saya kira penginnya bantuan atau subsidi ini ditingkatkan. Mudah-mudah aja Mbak ya.</p> <p>(21) a. (Kepala SMP 5) Ya.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Ya</p> <p>(22) a. (Kepala SMP 5) Pengawasan terhadap kami dilakukan oleh Kepala Sekolah. Kami berada di bawah pembinaan dan pengawasan kepala sekolah secara langsung. Tanggungjawab pengella kegiatan melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pembiaayaannya melalui rapat dewan guru maupun langsung kepada kepala sekolah.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Pengawasan? Secara khusus tidak ada. Tetapi kita kan punya tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala sekolah. Jika ada yang ganjil, paling-paling dimarahi, he...he...</p> <p>(23) a. (Kepala SMP 5) Kalau dalam skope Tangerang Selatan, kita baru bisa berharap semoga kebijakan ini ditingkatkan</p>
--	--

	<p>baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga obsesi untuk menjadi kota pendidikan menjadi kenyataan. Kalau sekarang ya belum apa-apa.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Dampaknya untuk Kota ya, seperti yang yang dirasakan di sekolah-sekolah. Kita baru bisa menjalankan, belum pada evaluasi. Tetapi spiritnya untuk meningkatkan mutu dalam pembelajaran sudah ada. Memang masih kecil. Kalau mengacu hasil penelitian, kebutuhan SMP itu mencapai 2,4 juta per tahun per anak. Dan sekarang oleh pemerintah baru disediakan sekitar 65.000 per siswa per bulan atau 780.000 per tahun.</p> <p>(24) a. (Kepala SMP 5) Ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya, sekolah tidak repot menagih keuangan pada setiap siswa. Bisa konsentrasi pada proses pembelajaran, dan bisa membuat APBS sesuai dengan penerimaan. Negatifnya, BOS dan subsidi BOS ini terhitung kecil, sehingga kadang bingung juga untuk meningkatkan intensitas kegiatan ekstrakurikuler, membayar guru honorer, perawatan sarana dan prasarana, serta BOS dan BOP ini membuat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sekolah ini menurun.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Ya. Kebetulan SMP 1 ini lagi menggalakkan peningkatan SDM, baik siswa maupun guru untuk persiapan SSN. Jadi pembiayaan untuk pembinaan dan kegiatan ekstrakurikuler alokasinya cukup besar.</p> <p>(25) a. (Kepala SMP 5) Secara finansial sangat terasa. Kita semakin sulit mengharapkan partisipasi semacam itu. Ini lama-lama akan terbangun image, bahwa sekolah nanti akan gratis, dan orang tua tidak perlu membayar apa-apa lagi. Padahal jika sekalipun, kan tidak seutuhnya seperti itu.</p>
--	---

	<p>b. (Kepala SMP 1) Mungkin tidak hanya di SMP 1 yang merasa terjadi penurunan partisipasi orang tua ini. Kita masih lumayan, karena secara ekonomi para orang tua di sini juga rata-rata baik. Tapi terjadi penurunan itu pasti.</p> <p>(26) a. (Kepala SMP 5) Kami berharap ada peningkatan baik BOS, Subsidi BOS maupun bantuan yang lain agar kegiatan sekolah dapat ditingkatkan. Kegiatan sekolah kan tidak hanya ekstrakurikuler saja. Masih banyak yang lain bisa diselenggarakan jika tersedia dananya.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Semuanya saya kira penginnnya bantuan atau subsidi ini ditingkatkan. Mudah-mudah aja Mbak ya.</p> <p>(27) a. (Kepala SMP 5) Oleh inspektorat. Tapi belum ada peninjauan.</p> <p>b (Kepala SMP 1) Nanti oleh inspektorat. Biasanya ada pemberi tahanan, dikumpulkan, lalu presentasi dengan membawa laporan lengkap, tapi belum. Saya kira mengadopsi modep pengawasan BOS.</p> <p>(28) a. (Kepala SMP 5). Bagi sekolah yang penting pencairannya tepat waktu. Dan ini belum. Untuk periode Juli-Desember, cair pada bulan Oktober. Jadi harus nalangi dulu.</p> <p>b. (Kepala SMP 1) Disana-sini harus dibenahi. Misalnya waktu, pengawasan, penggunaan, aspek yang harus dibiayai harus fokus dan juga pelaporan.</p> <p>(29) a. (Kepala SMP 5) Saya kira ini masih <i>tryal by tryal</i>. Mudah-mudahan ke depan terus disempurnakan. Kita maklum saja, sebagai kota baru dan harus jalan mengejar ketinggalan.</p>
--	--

	<p>b. (Kepala SMP 1). Belum efektif. Jika dikaitkan dengan peningkatan mutu pembelajaran, masih harus dievaluasi. Tapi kita kan nggak boleh nunggu lama. Kegiatan harus jalan, harus ada biaya, maka ya mudah-mudahan sambil jalan diperbaiki.</p> <p>(30) a. (Kepala SMP 5) Ya itu tadi, implementasinya harus ditingkatkan pengorganisasiannya, pengawasannya, pelaporannya.</p> <p>b. (Kepala SMP 1). Lumayan sudah ada perhatian dari pemda. Tetapi jika mengacu pada peraturan perundangan, tanggung jawab Pemda kan tidak hanya sampai di situ. Menanggung seluruh pembiayaan pendidikan dasar. Ini yang segera diformulasikan, agar sekolah tidak berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi sudah mendapatkan bantuan meskipun belum cukup, di sisi lain orang tua menganggap sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah. Sehingga partisipasi para orang tua menjadi setengah hati, bahkan apatis.</p>
<p>Guru Pembina KegiatanKesiswaan SMP5 (a) Tangerang Selatan Dan Guru Pembina KegiatanKesiswaan SMP 1 (b)</p>	<p>(31) a. (SMP) Jadi ya, tentu saja akan membantu terselenggaranya kegiatan. Akan tetapi masih banyak kendala untuk meneliti, antara lain masalah waktu, dan belum teraturnya kegiatan</p> <p>b. (SMP 1) Ya tentu ada. Tetapi sejauh mana belum dapat diidentifikasi, karena subsidi BOS ini baru berlangsung satu semester. Bisa kita lihat jika sudah minimal 1 tahun</p> <p>(32) a. (SMP 5) Ada, tetapi bukan berkaitan dengan kecilnya subsidi BOS. Melainkan dari dulu ketika mulai ada BOS. Waktu itu ada semacam transisi sumber pembiayaan, sehingga beberapa ekstrakurikuler dihapuskan. Sekarang</p>

	<p>seolah-olah baru bisa menyesuaikan diri kembali, meskipun anggaran mengecil (<i>jika dibandingkan sebelum BOS, red</i>) tapi apa-apa harus maksimal.</p> <p>b. (SMP 1) Tidak ada. Bahkan ditambah dari yang sebelumnya. Misalnya KIS (Kegiatan Ilmiah Siswa).</p> <p>(33) a. (SMP 5) Oh ya. Guru kan stakeholder ya. Jadi penyusunan anggaran harus melibatkan guru, kepala sekolah dan komite sekolah.</p> <p>b. (SMP 1) Ya. Dalam rapat pembahasan RAPBS pasti kita diajak. Di sini transparansinya bagus, Mbak.</p> <p>(34) a. (SMP 5) Jika kekurangannya sedikit, tentu hal ini wajar, kita minta tambahan dari bendahara. Tetapi jika kurangnya banyak, kita diskusikan pemecahannya. Alaternatifnya bisa macam-macam, misalnya ditunda, tidak diadakan atau pinjam dulu dari pihak lain. Tapi tidak pernah minta tambahan dari orang tua .</p> <p>b. (SMP 1) Kita bicarakan, atas nama sekolah dengan komite. Jika nanti harus minta tambahan dari orang tua siswa, selalu mendapat dukungan dari komite sekolah. Tapi itu jarang terjadi. Kita biasanya menggunakan biaya tak terduga jika masih ada.</p>
Bendahara SMP 5 dan Bendahara SMP 1	<p>(35) a. (SMP 5) Untuk pengambilan subsidi harus ada tanda tangan bendahara dan kepala sekolah. Kemudian, kami mengadministrasikan semua pemasukan dan pengeluaran. Semua harus tertib. Setiap pengeluaran harus ada bukti fisik berupa kuitansi, bon, faktur dan lain-lain, karena semua itu untuk bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban.</p> <p>b. (SMP 1) Membantu Kepala Sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Mulai dari penerimaan,</p>

	<p>penyusunan anggaran, pembelanjaa dan pelaporannya.</p> <p>(36) a. (SMP 5) Pada dasarnya rambu-rambu penggunaannya itu sama dengan BOS. Tapi barangkali tiap-tiap sekolah akan berbeda-beda, tergantung pada kekurangannya dimana. Subsidi BOS ini kan sifatnya suplemen. Di sini kita ratakan untuk semua komponen pembiayaan yang diatur dalam BOS. Tetapi ada yang lebih dominan yaitu komputer dan ekstrakurikuler.</p> <p>b. (SMP 1) Untuk kegiatan ekstrakurikuler, daya dan jasa, belanja barang, ATK dan lain-lain yang sifatnya operasional.</p> <p>(37) a. (SMP 5) Pada tahap awal kita mengajukan proposal. Setelah proposal disetujui, ada pemberitahuan. Pencairan dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama bendahara, karena rekeningnya atas nama sekolah. Untuk periode selanjutnya, setelah SPJ disetujui dinas pendidikan, subsidi langsung bisa dicairkan. SPJ nya dibuat tiap bulan. Jadi dana itu sudah stand by, begitu SPJ beres, kapan saja dana bisa dicairkan. Jadi yang mengatur scedule sekolah.</p> <p>b. (SMP 1) Saya bersama kepala sekolah mencairkan di bank yang ditunjuk. Tentunya setelah syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya SPJ dan lain-lain.</p> <p>(38) a. (SMP 5) Oh iya, Mbak. Tadi sudah saya katakan, SPJ harus disertai bukti fisik berupa kuitansi, nota dll.</p> <p>b. (SMP 1) Ya. Untuk pelaporan.</p>
--	---

*Lampiran 3***LEMBAR PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH**

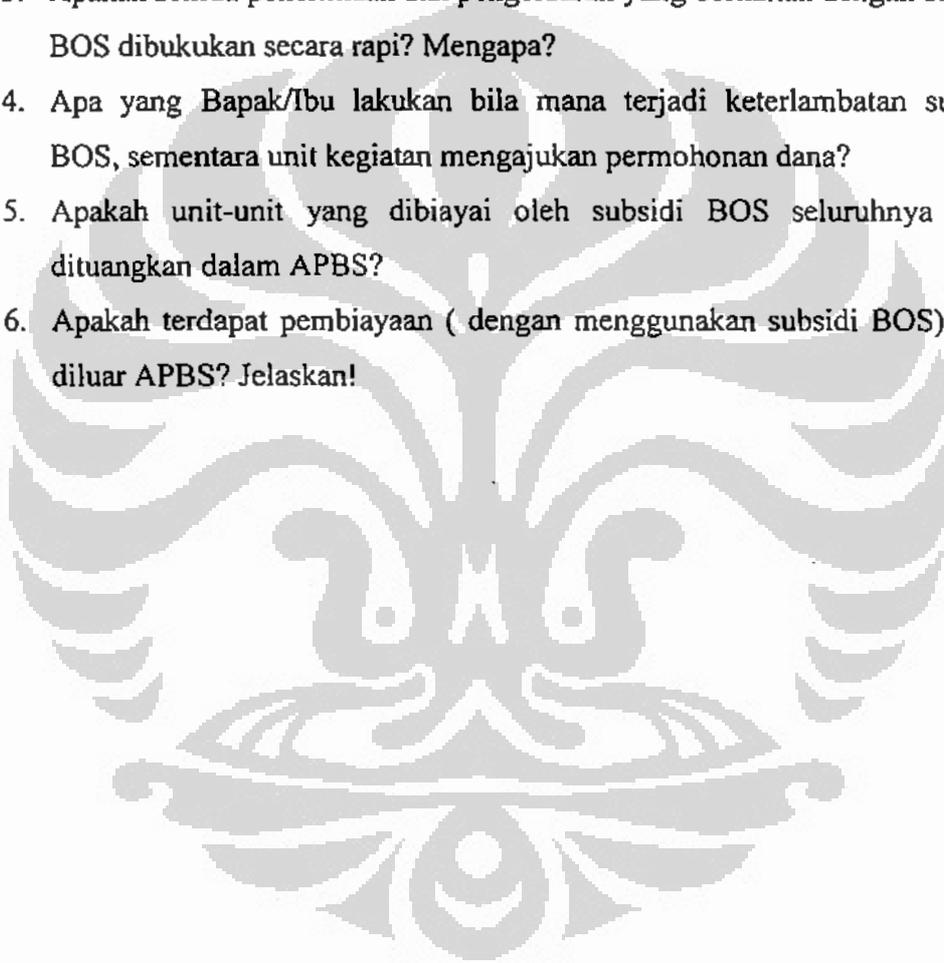
1. Bagaimana proses dan mekanisme subsidi BOS bisa diterima oleh sekolah?
2. Bagaimana pengelolaan subsidi BOS oleh sekolah?
3. Untuk keperluan apa saja subsidi BOS itu digunakan?
4. Bagaimana sosialisasi penggunaan subsidi BOS kepada orang tua murid?
5. Apakah subsidi BOS dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah?
6. Bagaimana tingkat partisipasi orang tua peserta didik setelah adanya subsidi BOS?
7. Apakah sekolah masih menarik dana dari orang tua peserta didik dalam pembiayaan operasional sekolah setelah adanya subsidi BOS? Mengapa?
8. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan subsidi BOS ini dilakukan?
9. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap subsidi BOS untuk selanjutnya?
10. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan subsidi BOS?

*Lampiran 4***LEMBAR PERTANYAAN UNTUK GURU**

1. Apa sajakah kegiatan siswa yang dibiayai oleh subsidi BOS?
2. Untuk apa saja biaya kegiatan itu digunakan?
3. Bagaimana mekanisme mendapatkan alokasi biaya dari subsidi BOS untuk kegiatan tertentu?
4. Apakah subsidi BOS dapat meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler?
5. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang ditiadakan karena tidak adanya biaya pendukung?
6. Apakah penggunaan subsidi BOS selalu melibatkan guru? Mengapa?
7. Jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan, apakah yang dilakukan oleh guru penanggung jawab kegiatan siswa?
8. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana untuk kegiatan peserta didik?
9. Apa harapan Bapak/Ibu berkaitan dengan subsidi BOS agar kegiatan sekolah lebih variatif dan berkualitas?
10. Bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi BOS dilakukan?

*Lampiran 5***LEMBAR PERTANYAAN UNTUK TU/BENDAHARA SEKOLAH**

1. Apa sajakah tugas Bapak/Ibu berkaitan dengan pengelolaan subsidi BOS?
2. Bagaimana mekanisme pencairan dana subsidi BOS untuk pembiayaan kegiatan sekolah?
3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan subsidi BOS dibukukan secara rapi? Mengapa?
4. Apa yang Bapak/Ibu lakukan bila mana terjadi keterlambatan subsidi BOS, sementara unit kegiatan mengajukan permohonan dana?
5. Apakah unit-unit yang dibiayai oleh subsidi BOS seluruhnya telah dituangkan dalam APBS?
6. Apakah terdapat pembiayaan (dengan menggunakan subsidi BOS) yang diluar APBS? Jelaskan!



Lampiran 6

**LEMBAR PERTANYAAN UNTUK WALI KOTA/ ANGGOTA
DPRD/PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN
PENGAMBILAN KEBIJAKAN**

1. Bagaimana proses dan mekanisme perumusan kebijakan subsidi BOS di Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana interaksi yang dilakukan eksekutif dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan subsidi BOS?
3. Apakah kebijakan subsidi BOS merupakan prioritas dalam rencana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan?
4. Bagaimana pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi BOS ini?
5. Apakah kebijakan ini membawa dampak bagi kemajuan pendidikan di Kota Tangerang Selatan?

Lampiran 7**Transkrip Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 5 Tangerang Selatan**

Hari/tanggal : **Rabu, 2 Desember 2009**
 Tempat : **SMP Negeri 5 Tangerang Selatan**
 Alamat Sekolah : **Jl. Prima Barat Nomor 59 Perum Pondok Kacang
 Prima
 Kota Tangerang Selatan**
 Nama Kepala Sekolah : **Drs. H. Antasa**

1. *Bagaimana proses dan mekanisme subsidi BOS bisa diterima oleh sekolah?*

Pertama kita diberi pengarahan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini Tim Subsidi BOS (BOP). Setiap sekolah agar mengajukan proposal yang didalamnya berisi tentang jumlah murid, rencana penggunaan subsidi, profil sekolah, dan lain-lain. Setelah menerima bantuan diharapkan setiap sekolah mensosialisasikan - kepada orang tua siswa.

2. *Berapa besarnya subsidi BOS Pak?*

Setiap anak Rp 17.650. Jadi dihitung berdasarkan jumlah siswa. Kita punya 1065 siswa. Hitung saja. Sekitar Rp 18 juta sekian gitu, per bulan. Kalau per tahun sekitar Rp 112 juta lah.

3. *Bagaimana pengelolaan subsidi BOS oleh sekolah?*

Pengelolaannya harus sesuai dengan proposal yang dibuat. Pada intinya BOP untuk membantu BOS. Namun karena BOS telah dialokasikan sesuai dengan APBS, maka penggunaan subsidi BOS ini untuk rencana belanja yang belum tercover oleh BOS, yaitu sebagian alat tulis kantor (ATK), komputer dan belanja modal yang lain. Jadi seolah-olah subsidi ini datangnya terlambat. Kita sudah jalan dengan APBS menggunakan BOS dan SPP.

4. ***Bagaimana sosialisasi penggunaan subsidi BOS kepada orang tua murid?***

Kita undang para orang tua siswa untuk rapat bersama komite sekolah. Disamping itu setiap bulan harus kita pampang di papan pengumuman yang strategir tentang pengelolaan dana tersebut.

5. ***Bolehkah kami foto copy proposal Subsidi BOS, Pak ?***

Oh. Silakan. Biar saja nanti staf memfotokopikan. Nanti baca-baca proposal itu, karena semua rencana penggunaan subsidi BOS telah tertuang didalamnya.

6. ***Apakah subsidi BOS dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah?***

Harapannya seperti itu. Tapi yang jelas untuk periode ini (Juli –Desember 2009) sekolah terbantu dengan pembelian alat-alat yang menggunakan dana subsidi BOS tersebut. Saya belum dapat mengambil kesimpulan jika diakaitkan dengan prestasi siswa, karena ini periode pertama dan pembelanjaannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya komplementer, tidak langsung kepada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

7. ***Bagaimana dampak subsidi BOS?***

Ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya, sekolah tidak repot menagih keuangan pada setiap siswa. Bisa konsentrasi pada proses pembelajaran, dan bisa membuat APBS sesuai dengan penerimaan. Negatifnya, BOS dan subsidi BOS ini terhitung kecil, sehingga kadang bingung juga untuk meningkatkan intensitas kegiatan ekstrakurikuler, membayar guru honorer, perawatan sarana dan prasarana, serta BOS dan BOP ini membuat antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sekolah ini menurun.

8. ***Bagaimana tingkat partisipasi orang tua peserta didik setelah adanya subsidi BOS?***

Ya, biasalah Mbak. Maunya orang tua murid kan sekolah gratis. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lebih banyak, karena khawatir malah menimbulkan masalah. Sekolah harus mengantisipasi kegiatan melalui perencanaan yang baik agar pembiayaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika sekiranya tidak ada dana, ya lebih baik kegiatan

ditiadakan. Misalnya perlombaan, upacara di tempat lain. Kelihatannya hanya perlombaan, kan itu memakan biaya yang besar, untuk transportasi, persiapan dan lain-lain.

9. Apakah sekolah masih menarik dana dari orang tua peserta didik dalam pembiayaan operasional sekolah setelah adanya subsidi BOS? Mengapa?

Ya, masih. Selain BOS dan Subsidi BOS ini operasional pembiayaan kegiatan pendidikan masih harus menarik dana dari masyarakat, dalam hal ini orang tua murid. SPP per bulan bervariasi antara Rp 20.000 sampai Rp 50.000. Untuk bantuan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) diminta sekali pada saat penerimaan siswa baru, besarnya bervariasi juga antara Rp 800.000 sampai Rp 1.500.000. Tapi dana yang ini, kadang-kadang anak sampai lulus pun belum dilunasi. SPP masih dibutuhkan, karena dana BOS tidak cukup untuk operasional. Waktu belum ada BOS saja setiap siswa harus membayar lebih dari Rp 100.000. Sedangkan BOS jika dibagi per bulan hanya sekitar Rp 47.000. Maka masih ada juga DSP untuk perawatan dan kegiatan.

10. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan subsidi BOS ini dilakukan?

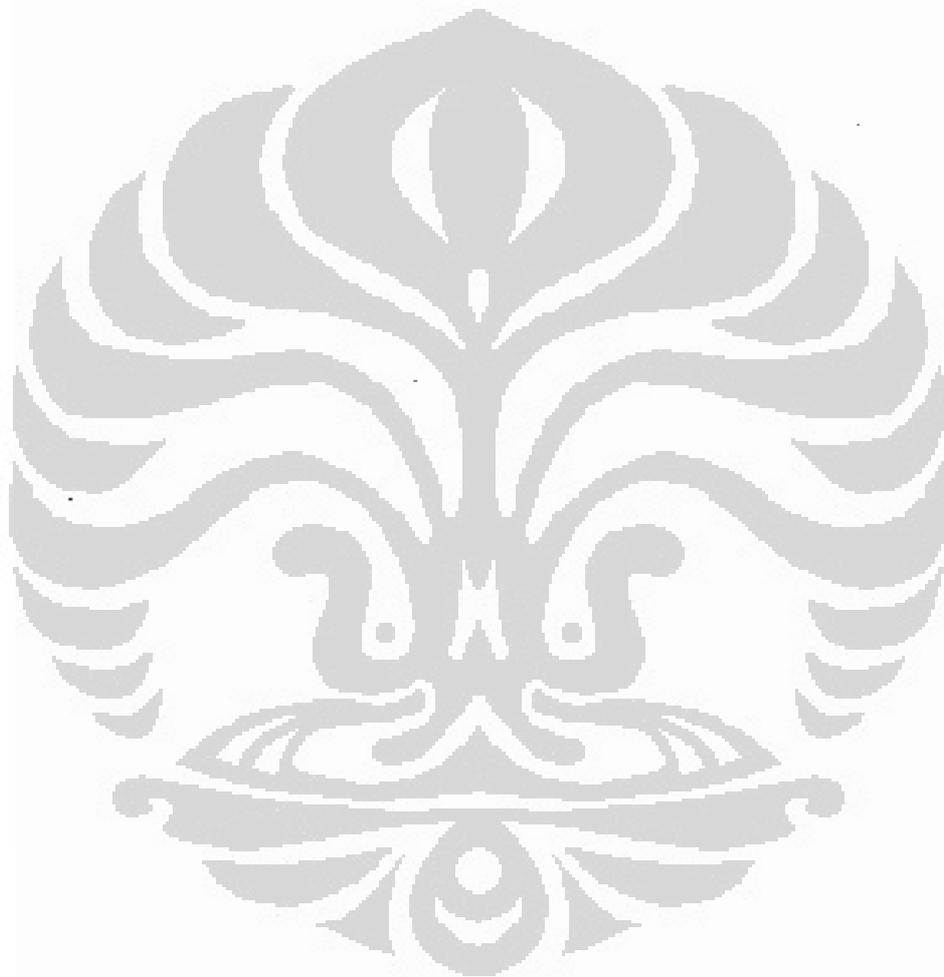
Pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Kota (Bawasko). Kita baru sekali diperiksa. Para kepala sekolah dikumpulkan bersama dengan bendahara sekolah, diteliti laporannya. Laporan harus menyertakan bukti fisik yang autentik. Setelah memberikan laporan kita bisa mencairkan dana.

11. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap subsidi BOS untuk selanjutnya?

Ya mudah-mudahan ditingkatkan lagi ya Mbak. Karena kalau tidak, perawatan gedung dan alat-alat kan kurang dananya.

12. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan subsidi BOS?

Kita membuat laporan langsung ke dinas pendidikan. Tidak perlu diverifikasi oleh pengawas.



Lampiran 8**Transkrip Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Tangerang Selatan**

Hari/tanggal : **Rabu, 2 Desember 2009**
 Tempat : **SMP Negeri 1 Tangerang Selatan**
 Alamat Sekolah : **Jl. Raya Serpong Tangerang Selatan Banten**
 Nama Kepala Sekolah : **Drs. R. Hermayandana.**

1. *Bagaimana proses dan mekanisme subsidi BOS bisa diterima oleh sekolah?*

Ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan, membuat proposal untuk periode Juli-Desember 2009. Kebetulan karena di sini juga merupakan induk dari SMP Terbuka, maka kita mengajukan untuk kedua lembaga tersebut. Setelah cair ada pemberitahuan, lalu kita ambil dananya di kantor pos. Begitu SPJ disampaikan, dana siap dicairkan, begitu seterusnya. Tapi untuk subsidi BOS, populemnya di sini BOP ini, kita baru terima satu periode saja. Satu smester, Juli-Desember.

2. *Berapa besarnya subsidi BOS ini Pak?*

Murid kita kelas VII ada 284 siswa kelas VIII ada 390 siswa kelas IX ada 396 siswa . Jumlahnya 1070 kali Rp 17.650 per bulan per siswa. Jadi per bulan Rp 18.850.200, atau per tahun Rp 113.101.200

3. *Bagaimana pengelolaan subsidi BOS oleh sekolah?*

Sudah ada petunjuknya. Jadi kita tidak boleh menyimpang dari petunjuknya. Dalam petunjuk itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu antara lain belanja ATK, kegiatan kesiswaan, kurikulum, perawatan, daya dan jasa dan lain-lain.

4. Bagaimana sosialisasi penggunaan subsidi BOS kepada orang tua murid?

Kita sampaikan kepada orang tua siswa dalam rapat. Disamping itu juga kita pasang di pengumuman.

5. Bolehkah kami foto copy proposal Subsidi BOS, Pak ?

Oh. Silakan. (Kepala sekolah kemudian memanggil bendahara untuk memfotocopi).

6. Apakah subsidi BOS dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah?

Bagi yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tentunya bisa. Kan ada yang menganggarkan untuk belanja modal atau barang. Yang seperti itu tidak bisa dilihat langsung dampaknya terhadap pembelajaran. Kalau kita di sini sebagian untuk menopang kegiatan ekstrakurikuler. Maka banyak kejuaraan yang kami dapat, baik tingkat kota maupun provinsi Banten. Bahkan termasuk kejuaraan tunju itu untuk tingkat nasional.

7. Bagaimana dampak subsidi BOS?

Menurut saya cukup positif. Tapi kadang-kadang susah meyakinkan orang tua yang pengennya sekolah gratis. Sehingga positifnya lebih banyak pada teknis dari pada psikologis.

8. Bagaimana tingkat partisipasi orang tua peserta didik setelah adanya subsidi BOS?

Ya itu tadi. Ada kendala psikologis pada orang tua setelah ada bantuan BOS, BOP maupun bantuan yang lain. Padahal kadang-kadang belanja kami sebulan lebih dari Rp 200.000.000. Tapi bagi saya yang penting menyiapkan SDM guru dan siswa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan segera menjadi SSN (Sekolah Setandar Nasional , red).

9. Apakah sekolah masih menarik dana dari orang tua peserta didik dalam pembiayaan operasional sekolah setelah adanya subsidi BOS? Mengapa?

Masih-masih. Untuk SPP per bulan Rp 60.000, sedangkan DSP bagi siswa baru antara Rp 800.000 sampai Rp 2.000.000. Semua kita kembalikan untuk operasional. Kita sedang membangun landasan yang kuat untuk menuju SSN. SDM nya kita tingkatkan. Rasio guru –murid kita per kecil. Percuma kalau nanti SSN pondasinya tidak kuat, akhirnya nggak bisa bertahan.

10. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan subsidi BOS ini dilakukan?

Saya kira sementara ini baru lewat laporan saja. Ini kan baru pertama kali. Yang penting penggunaan kita nggak menyimpang dari ketentuan, saya kira tidak ada masalah. Jadi laporan kita diverifikasi oleh dinas, nggak ada masalah, cairkan lagi periode berikutnya.

11. Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap subsidi BOS untuk selanjutnya?

Tentu saja saya berharap berbagaimacam bantuan ini ditingkatkan. Syukur bisa menyelenggarakan sekolah gratis, yang benar-benar gratis.

12. Bagaimana mekanisme pelaporan penggunaan subsidi BOS?

Kita buat laporan ke dinas. Kalau detail laporannya ada di bendahar

Lampiran 9

Transkrip Wawancara dengan Guru Pembina Kegiatan Kesiswaan SMP Neg 5 Tangerang Selatan Banten

Hari/tanggal : **Rabu, 2 Desember 2009**
 Tempat : **SMP Negeri 5 Tangerang Selatan**
 Alamat Sekolah : **Jl. Prima Barat Nomor 59 Perum Pondok Kacang
Prima
Kota Tangerang Selatan**
 Nama Guru : **Budi Saranta, S.Pd**

1. Apa sajakah kegiatan siswa yang dibiayai oleh subsidi BOS?

Untuk semester ini (*Juli Desember 2009, red*) sebenarnya lebih banyak berasal dari BOS dan SPP siswa, karena subsidi BOS ini datangnya terlambat. APBS sudah selesai dibuat, baru ada subsidi BOS. Namun demikian dana tersebut fungsinya membantu, antara lain untuk kegiatan Footsal, basket, pengayaan kelas IX dan lain-lain.

2. Untuk apa saja biaya kegiatan itu digunakan?

Pada kegiatan ekstrakurikuler, penggunaannya untuk membeli alat-alat. Misalnya beli bola, pengecatan lapangan. Sedangkan pada pengayaan digunakan untuk penggandaan soal. Kalau honorarium atau kesejahteraan guru dianggarkan dari SPP. Jadi karena peralatan dibeli dari subsidi BOS, otomatis kesejahteraan pembina kegiatan akan lebih baik, karena anggaran belanja alat-alat sudah ada posnya, sedangkan SPP tidak dialokasikan ke sana. Maka dapat untuk meningkatkan honorarium.

3. Jadi kesejahteraan guru meningkat dengan adanya subsidi BOS ini, Pak?

Setidaknya setelah diberlakukannya BOS. Tapi jika dibandingkan sebelum-sebelumnya, angka ini menurun. Pada waktu sebelum BOS kan

SPP siswa lebih dari seratus (*seratus ribu rupiah, red*). Sedangkan sekarang jauh di bawah. Jadi limitnya setelah ada BOS.

4. *Bagaimana mekanisme mendapatkan alokasi biaya dari subsidi BOS untuk kegiatan tertentu?*

Kita membuat perencanaan anggaran untuk dimasukkan dalam APBS. Jika disetujui, ya setiap kegiatan kita mintakan anggarannya. Misalnya akan beli peralatan, ...dikeluarkan oleh bendahara untuk keperluan itu. Kewajiban pengguna anggaran adalah menyetorkan semua kwitansi atau nota transaksi kepada bendahara untuk bukti fisik laporan keuangan. Jadi misalnya saya membeli bola di toko, maka nota pembelian saya serahkan ke bendahara.

5. *Apakah subsidi BOS dapat meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler?*

Kita membeli alat-alat untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ya, tentu saja akan membantu terselenggaranya kegiatan tersebut. Akan tetapi masih banyak kendala berkaitan dengan anggaran ini, misalnya untuk mengikuti lomba, mengirim kontingen. Itu ternyata biayanya tidak sedikit. Jadi kalau besar biayanya, belum bisa diprioritaskan.

6. *Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang ditiadakan karena tidak adanya biaya pendukung?*

Ada, tetapi bukan berkaitan dengan kecilnya subsidi BOS. Melainkan dari dulu ketika mulai ada BOS. Waktu itu ada semacam transisi sumber pembiayaan, sehingga beberapa ekstrakurikuler dihapuskan. Sekarang seolah-olah baru bisa menyesuaikan diri kembali, meskipun anggaran mengecil (*jika dibandingkan sebelum BOS, red*) tapi apa-apa harus maksimal.

7. *Apakah penggunaan subsidi BOS selalu melibatkan guru? Mengapa?*

Oh ya. Guru kan stakeholder ya. Jadi penyusunan anggaran harus melibatkan guru, kepala sekolah dan komite sekolah.

8. Jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan, apakah yang dilakukan oleh guru penanggung jawab kegiatan siswa?

Jika kekurangannya sedikit, tentu hal ini wajar, kita minta tambahan dari bendahara. Tetapi jika kurangnya banyak, kita diskusikan pemecahannya. Alternatifnya bisa macam-macam, misalnya ditunda, tidak diadakan atau pinjam dulu dari pihak lain. Tapi tidak pernah minta tambahan dari orang tua .

9. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana untuk kegiatan peserta didik?

Pengawasan terhadap kami dilakukan oleh Kepala Sekolah. Kami berada di bawah pembinaan dan pengawasan kepala sekolah secara langsung. Tanggungjawab pengelola kegiatan melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pembiaayaannya melalui rapat dewan guru maupun langsung kepada kepala sekolah.

10. Apa harapan Bapak/Ibu berkaitan dengan subsidi BOS agar kegiatan sekolah lebih variatif dan berkualitas?

Kami berharap ada peningkatan baik BOS, Subsidi BOS maupun bantuan yang lain agar kegiatan sekolah dapat ditingkatkan. Kegiatan sekolah kan tidak hanya ekstrakurikuler saja. Masih banyak yang lain bisa diselenggarakan jika tersedia dananya.

*Lampiran 10***Transkrip Wawancara dengan Guru Pembina Kegiatan Kesiswaan SMP Negeri 1 Tangerang Selatan Banten**

Hari/tanggal : Rabu, 2 Desember 2009
Tempat : SMP Negeri 1 Tangerang Selatan
Alamat Sekolah : Jl. Raya Serpong Tangerang Banten.
Nama Guru : Ermina A, S.Pd

1. *Apa sajakah kegiatan siswa yang dibiayai oleh subsidi BOS?*

Banyak ya, Mbak. Ada ekstrakurikuler dan belanja barang seperti alat kebersihan, komputer dan pembayaran daya dan jasa. Ekstrakurikulernya banyak juga ada futsal, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, silat, karate, tenis lapangan, tunju dan lain-lain.

2. *Untuk apa saja biaya kegiatan itu digunakan?*

Untuk honorarium pembina ekasta kurikuler. Kebetulan hampir semua kegiatan ekstrakurikuler di sini pembinanya berasal dari luar. Semua itu demi kualitas pembinaan. Contohnya tinju putra, putri kita juara nasional lho. Yang juara tingkat kota dan provinsi banyak. Misalnya Futsal tingkat Jabodetabek, sepak bola, tenis meja tingkat kabupaten Tangerang dan lain-lain.

3. *Jadi kesejahteraan guru meningkat dengan adanya subsidi BOS ini, Pak?*

Untuk guru internal sekolah ya, tidak. Para pembina ekstrakurikuler kan berasal dari luar. Jadi alokasinya untuk mereka.

4. Bagaimana mekanisme mendapatkan alokasi biaya dari subsidi BOS untuk kegiatan tertentu?

Sudah jelas pos-posnya di dalam APBS maupun APBS Perubahan. Kita tinggal mengajukan kepada bendahara untuk pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan.

5. Apakah subsidi BOS dapat meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler?

Ya. Kebetulan SMP 1 ini lagi menggalakkan peningkatan SDM, baik siswa maupun guru untuk persiapan SSN. Jadi pembiayaan untuk pembinaan dan kegiatan ekstrakurikuler alokasinya cukup besar.

6. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang ditiadakan karena tidak adanya biaya pendukung?

Tidak ada. Bahkan ditambah dari yang sebelumnya. Misalnya KIS (Kegiatan Ilmiah Siswa).

7. Apakah penggunaan subsidi BOS selalu melibatkan guru? Mengapa?

Ya. Dalam rapat pembahasan RAPBS pasti kita diajak. Di sini transparansinya bagus, Mbak.

8. Jika terdapat kekurangan dana untuk pembiayaan kegiatan, apakah yang dilakukan oleh guru penanggung jawab kegiatan siswa?

Kita bicarakan, atas nama sekolah dengan komite. Jika nanti harus minta tambahan dari orang tua siswa, selalu mendapat dukungan dari komite sekolah. Tapi itu jarang terjadi. Kita biasanya menggunakan biaya tak terduga jika masih ada.

9. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap operasional penggunaan dana untuk kegiatan peserta didik?

Pengawasan? Secara khusus tidak ada. Tetapi kita kan punya tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala sekolah. Jika ada yang ganjil, paling-paling dimarahi, he...he...

10. Apa harapan Bapak/Ibu berkaitan dengan subsidi BOS agar kegiatan sekolah lebih variatif dan berkualitas?

Semuanya saya kira penginnya bantuan atau subsidi ini ditingkatkan. Mudah-mudah aja Mbak ya.



*Lampiran 11***Transkrip Wawancara Bendahara SMP Negeri 5 Tangerang Selatan**

Hari/tanggal : **Rabu, 2 Desember 2009**
 Tempat : **SMP Negeri 5 Tangerang Selatan**
 Alamat Sekolah : **Jl. Prima Barat Nomor 59 Perum Pondok Kacang
 Prima
 Kota Tangerang Selatan**
 Nama Bendahara : **Suyati**

1. Apa sajakah tugas Ibu berkaitan dengan pengelolaan subsidi BOS?

Untuk pengambilan subsidi harus ada tanda tangan bendahara dan kepala sekolah. Kemudian, kami mengadministrasikan semua pemasukan dan pengeluaran. Semua harus tertib. Setiap pengeluaran harus ada bukti fisik berupa kuitansi, bon, faktur dan lain-lain, karena semua itu untuk bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban.

2. Bagaimana mekanisme pencairan dana subsidi BOS untuk pembiayaan kegiatan sekolah?

Pada tahap awal kita mengajukan proposal. Setelah proposal disetujui, ada pemberitahuan. Pencairan dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama bendahara, karena rekeningnya atas nama sekolah. Untuk periode selanjutnya, setelah SPJ disetujui dinas pendidikan, subsidi langsung bisa dicairkan. SPJ nya dibuat tiap bulan. Jadi dana itu sudah stand by, begitu SPJ beres, kapan saja dana bisa dicairkan. Jadi yang mengatur scedule sekolah.

3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan subsidi BOS dibukukan secara rapi? Mengapa?

Oh iya, Mbak. Tadi sudah saya katakan, SPJ harus disertai bukti fisik berupa kuitansi, nota dll.

4. Untuk apa saja penggunaan Subsidi BOS tersebut Bu?

Pada dasarnya rambu-rambu penggunaannya itu sama dengan BOS. Tapi barangkali tiap-tiap sekolah akan berbeda-beda, tergantung pada kekurangannya dimana. Subsidi BOS ini kan sifatnya suplemen. Di sini kita ratakan untuk semua komponen pembiayaan yang diatur dalam BOS. Tetapi ada yang lebih dominan yaitu komputer dan ekstrakurikuler.

5. Apakah unit-unit yang dibiayai oleh subsidi BOS seluruhnya telah dituangkan dalam APBS?

Ya. Tapi subsidi BOS ini kan belakangan. Jadi ada semacam revisi di APBS begitu. Mana-mana yang kurang kita tambahi.

6. Apakah terdapat pembiayaan (dengan menggunakan subsidi BOS) yang diluar APBS? Jelaskan!

Semua akan dipertanggungjawabkan dengan APBS. Jadi semua akan diakomodir oleh APBS Perubahan. Maka yang diluar sama sekali ya tidak ada. Ada perubahan APBS kan karena ada subsidi BOS tadi, mau-nggak mau ya harus diadakan perubahan APBS agar semua pemasukan yang sifatnya rutin bisa terakomodir.

*Lampiran 12***Transkrip Wawancara Bendahara SMP Negeri 1 Tangerang Selatan**

Hari/tanggal : **Rabu, 2 Desember 2009**
 Tempat : **SMP Negeri 1 Tangerang Selatan**
 Alamat Sekolah : **Jl. Raya Serpong Tangerang Banten**
 Nama Bendahara : **Iis Dadi Lusini**

1. *Apa sajakah tugas Ibu berkaitan dengan pengelolaan subsidi BOS?*

Membantu Kepala Sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Mulai dari penerimaan, penyusunan anggaran, pembelanjaan dan pelaporannya.

2. *Bagaimana mekanisme pencairan dana subsidi BOS untuk pembiayaan kegiatan sekolah?*

Saya bersama kepala sekolah mencairkan di bank yang ditunjuk. Tentunya setelah syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya SPJ dan lain-lain.

3. *Apakah semua penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan subsidi BOS dibukukan secara rapi? Mengapa?*

Ya. Untuk pelaporan.

4. *Untuk apa saja penggunaan Subsidi BOS tersebut Bu?*

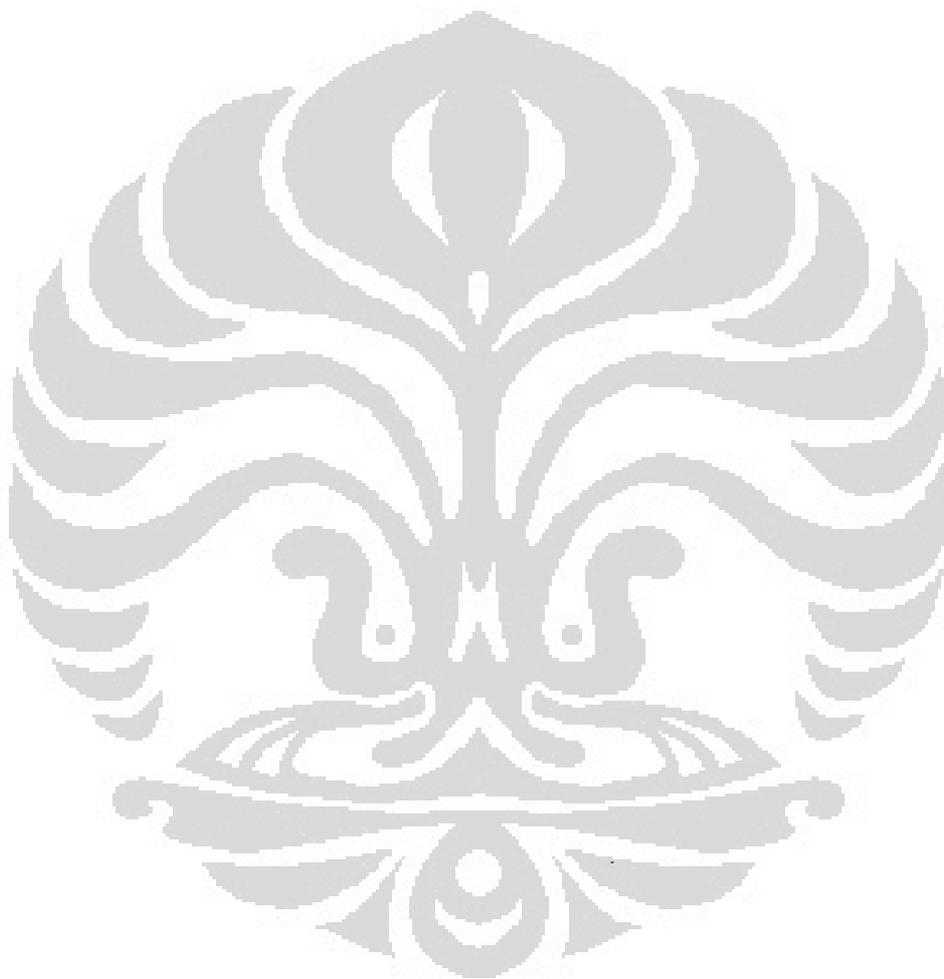
Untuk kegiatan ekstrakurikuler, daya dan jasa, belanja barang, ATK dan lain-lain yang sifatnya operasional.

5. *Apakah unit-unit yang dibiayai oleh subsidi BOS seluruhnya telah dituangkan dalam APBS?*

Kadang-kadang ada juga yang tidak. Misalnya kegiatan lomba, persiapan dan transportasi kan perlu biaya. Kadang-kadang lombanya mendadak sekali, sedangkan di APBS alokasi ini sudah habis.

6. *Apakah terdapat pembiayaan (dengan menggunakan subsidi BOS) yang diluar APBS? Jelaskan!*

Ya seperti tadi, untuk lomba, upacara, perayaan-perayaan, kadang-kadang anggarannya di APBS *underestimate*.



Lampiran 13

Kutipan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 466/Kep/127 Huk/2009

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 466/KEP/127 HUK/ 2009 TAHUN 2009
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menuntaspak program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dibutuhkan dana yang memadai untuk memperluas akses masyarakat tidak mampu dalam memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

- Mengingat** :
1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.
 2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
 3. UU No.17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
 4. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998.
11. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 56 Tahun 1998.
12. PP No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
13. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
14. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional.
15. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.
16. Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.95 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Bantuan Operasional Pendidikan.
5. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan
6. Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan maupun Sekolah Pertama di Wilayah Kota Tangerang Selatan.

BAB II

ORGANISASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 1

Organisasi Pelaksanaan

Organisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Tangerang Selatan meliputi:

1. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Kota Tangerang Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan , terdiri atas:

- a. Pembina : Walikota Tangerang Selatan
- b. Pengarah :
 1. Sekda Kota Tangerang Selatan
 2. ASDA IV Kota Tangerang Selatan
 3. Kepala Bapeda Kota Tangerang Selatan
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan
- d. Tim Pelaksana :
 1. Satu orang manajer
 2. Sekurang-kurangnya satu orang wakil manajer
 3. Satu orang pejabat penanggungjawab teknis kegiatan selaku bendahara
 4. Seorang sekretaris
 5. Sekurang-kurangnya satu orang petugas pendataan untuk masing-masing jenjang
 6. Sekurang-kurangnya tiga orang petugas monitoring dan evaluasi
 7. Sekurang-kurangnya tiga orang petugas penyelesaian masalah

2. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Tangerang Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga , terdiri atas:
 - a. Kepala sekolah selaku Penanggung Jawab
 - b. Seorang bendahara selaku pemegang kas
 - c. Sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang terdiri atas:

- 1) Satu orang unsur komite sekolah
- 2) Satu orang unsur guru
- 3) Satu orang unsur orangtua di luar komite sekolah

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

Tim Manajemen Subsidi Bantuan Operasional Sekolah

1. Tingkat Kota

- a. Mengusulkan alokasi dana untuk setiap sekolah
- b. Melakukan pendataan sekolah penerima bantuan
- c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima bantuan
- d. Menetapkan alokasi dana setiap sekolah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
- e. Menyalurkan dana melalui rekening sekolah penerima bantuan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi
- g. Melayani pengaduan masyarakat
- h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penyalur bantuan (Bank/ Kantor POS)

2. Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterimalebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen Kota Tangerang Selatan
- b. Mengelola dana bantuan secara bertanggungjawab dan transparan
- c. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana bantuan serta penggunaan dana bantuan tersebut di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.

- d. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah
- e. Membuat laporan pengeluaran dana bantuan dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah
- f. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana bantuan dan barang-barang yang dibeli sekolah tersebut di atas di papan pengumuman setiap tiga bulan
- g. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana bantuan di sekolah
- h. Memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- i. Melaporkan penggunaan dana bantuan secara berkala (3 bulan)

Pasal 3

Syarat dan mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah

1. Syarat penyaluran bantuan:

- a. Kepala sekolah membuka rekening bank atas nama sekolah bukan nama pribadi.
- b. Kepala sekolah mengirimkan photocopy rekening bank kepada Tim Pelaksana Tingkat Kota Tangerang Selatan.
- c. Kepala sekolah mengirimkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang sudah ditandatangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite sekolah di atas materai Rp 6.000,-
- d. Kepala sekolah mengirimkan rencana penggunaan dana BOP pada tiap awal triwulan kepada Tim Manajemen Tingkat Kota Tangerang Selatan.

2. Mekanisme penyaluran bantuan

- a. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, pada setiap awal Triwulan pencairan anggaran, kecuali awal tahun

anggaran.

- b. Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kota Tangerang Selatan kepada sekolah penerima melalui transfer langsung ke rekening masing-masing sekolah.
- c. Penyaluran bantuan dilakukan kepada sekolah penerima yang sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- d. Penyaluran bantuan triwulan 2 dan selanjutnya dilakukan apabila sekolah penerima bantuan sudah dapat menunjukkan bukti-bukti penggunaan sebelumnya secara lengkap dan syah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku

BAB III

ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

Pasal 4

Alokasi Bantuan

1. Alokasi bantuan untuk periode Juli-Desember 2009 sebagai berikut:
 - a. SD/MI Negeri sebesar Rp 10.000/siswa/bulan
 - b. SMP/MTs Negeri sebesar Rp 17.650.000/siswa/bulan
2. Alokasi bantuan selanjutnya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Tangerang Selatan , namun sekurang-kurangnya sama dengan alokasi tersebut di atas pada butir 1.

Pasal 5

Penggunaan Bantuan

Dana bantuan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesiswaan dan kegiatan lain

yang yang terkait dengan manajemen sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

a. Honorarium

- 1). Honorarium Panitia Kegiatan di sekolah
- 2). Uang saku peserta kegiatan
- 3). Honorarium kelebihan jam mengajar
- 4). Honorarium tugas tambahan di sekolah
- 5). Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pembina
- 6). Uang lembur tenaga non edukatif.

2. Belanja Barang dan Jasa

a. Belanja Bahan Habis Pakai

- 1). Belanja alat tulis kantor
- 2). Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
- 3). Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
- 4). Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- 5). Belanja bahan bakar minyak dan gas
- 6). Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
- 7). Belanja atribut penghargaan/ piagam/ piala/ cendra mata
- 8). Belanja KIT pelatihan
- 9). Belanja dekorasi dan desain interior

b. Belanja Bahan/ Material

- 1). Belanja bahan baku bangunan
- 2). Belanja bahan/ bibit ternak
- 3). Belanja bahan obat-obatan
- 4). Belanja bahan kimia
- 5). Belanja material dokumentasi/ film/ kaset/ VCD /DVD

c. Belanja Jasa Kantor

- 1). Belanja telephone, internet, air dan listrik
- 2). Belanja surat kabar/ majalah

- 3). Belanja paket/ pengiriman
 - 4). Belanja sertifikasi
 - 5). Belanja jasa dokumentasi
 - 6). Belanja jasa publikasi
 - 7). Belanja jasa dekorasi ruangan/ gedung kantor
 - 8). Belanja jasa pengolahan data perkantoran
 - 9). Belanja jasa pengarsipan
 - 10). Belanja jasa kesehatan
 - 11). Belanja pajak kendaraan/ inventaris sekolah dan PBB sekolah
- d. Belanja Cetak dan Pengadaan
 - 1). Belanja cetak
 - 2). Belanja pengadaan
 - e. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
 - 1). Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan
 - f. Belanja Sewa Sarana Mobilitasi
 - 1). Belanja sewa sarana mobilitas darat
 - 2). Belanja sewa sarana mobilitas air
 - 3). Belanja sewa sarana mobilitas udara
 - g. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - 1). Belanja sewa meja, kursi
 - 2). Belanja sewa computer dan printer
 - 3). Belanja sewa proyektor
 - 4). Belanja sewa generator
 - 5). Belanja sewa tenda
 - 6). Belanja sewa peralatan/ perlengkapan teknologi tepat guna
 - 7). Belanja sewa soundsystem
 - 8). Belanja sewa peralatan out bound
 - 9). Belanja peralatan praktek
 - h. Belanja Makanan dan Minuman
 - 1). Belanja makanan dan minuman harian pegawai
 - 2). Belanja makanan dan minuman

- 3). Belanja makanan dan minuman rapat
- 4). Belanja makanan dan minuman tamu
- 5). Belanja makanan dan minuman peserta kegiatan
- 6). Belanja makanan dan minuman lembur
- 7). Belanja makanan dan minuman atlet
- i. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
 - 1). Belanja pakaian adat daerah
 - 2). Belanja pakaian batik tradisional
 - 3). Belanja pakaian olah raga
- j. Belanja Perjalanan Dinas
 - 1). Belanja perjalanan dinas daerah
 - 2). Belanja perjalanan dinas luar daerah
- k. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi pembimbingan teknis PNS
 - 1). Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
 - 2). Belanja sosialisasi
 - 3). Belanja bimbingan teknis
- l. Belanja Pemeliharaan
 - 4). Belanja pemeliharaan gedung/ kantor (kategori ringan)
 - 5). Belanja pemeliharaan listrik, air dan telephone
 - 6). Belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor
- m. Belanja Jasa Konsultasi
 - 1). Belanja jasa konsultasi pembelajaran
 - 2). Belanja jasa konsultasi pengembangan SDM
 - 3). Belanja jasa konsultasi sytem informasi manajemen
- n. Belanja Stimulan/ Hadiah Lomba
 - 1). Belanja stimulant/ hadiah dalam bentuk uang
 - 2). Belanja stimulant/ hadiah dalam bentuk barang
- o. Belanja Jasa Travel/ Even Organizer
 - 1). Belanja jasa travel
 - 2). Belanja jasa even organizer

3. Belanja Modal

a. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

- 1). Belanja modal pengadaan mesin tik
- 2). Belanja modal pengadaan mesin hitung
- 3). Belanja modal pengadaan mesin stensil
- 4). Belanja modal pengadaan mesin photo copy
- 5). Belanja modal pengadaan mesin cetak
- 6). Belanja modal pengadaan mesin potong kertas
- 7). Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
- 8). Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik
- 9). Belanja modal pengadaan papan visual elektronik
- 10). Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
- 11). Belanja modal televise/ radio
- 12). Belanja modal pengadaan mesin potong rumput
- 13). Belanja modal pengadaan peralatan pengolahan limbah
- 14). Belanja modal pengadaan pengadaan pompa air

b. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

- 1) Belanja modal pengadaan brankas
- 2) Belanja modal pengadaan filling cabinet
- 3) Belanja modal pengadaan white board
- 4) Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
- 5) Belanja modal pengadaan kipas angin
- 6) Belanja modal pengadaan AC split
- 7) Belanja modal pengadaan gorden dan perlengkapannya
- 8) Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan
- 9) Belanja modal pengadaan papan nama
- 10) Belanja modal pengadaan water heater

c. Belanja Modal Pengadaan Komputer

- 1). Belanja modal pengadaan mainframe/ server
- 2). Belanja modal pengadaan computer/ PC
- 3). Belanja modal pengadaan computer notebook
- 4). Belanja modal pengadaan printer

- 5). Belanja modal pengadaan scanet
 - 6). Belanja modal pengadaan monitor/ display
 - 7). Belanja modal pengadaan CPU
 - 8). Belanja modal pengadaan UPS/ stabilizer
 - 9). Belanja modal pengadaan kelengkapan computer (flashdisk, mouse, keyboard, harddisk, speaker)
 - 10). Belanja modal pengadaan jaringan computer
- d. Belanja Modal Pengadaan Mebeuler
- 1). Belanja modal pengadaan meja kerja
 - 2). Belanja modal pengadaan meja rapat
 - 3). Belanja modal pengadaan meja makan
 - 4). Belanja modal pengadaan kursi kerja
 - 5). Belanja modal pengadaan kursi rapat
 - 6). Belanja modal pengadaan kursi makan
 - 7). Belanja modal pengadaan tempat tidur
 - 8). Belanja modal pengadaan sofa
 - 9). Belanja modal pengadaan rak buku/ TV/ kembang
 - 10). Belanja modal pengadaan mebeuler siswa
 - 11). Belanja modal pengadaan kursi tunggu
- e. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
- 1). Belanja modal pengadaan tabung gas
 - 2). Belanja modal pengadaan kompor gas
 - 3). Belanja modal pengadaan lemari makan
 - 4). Belanja modal pengadaan dispenser
 - 5). Belanja modal pengadaan kulkas
 - 6). Belanja modal pengadaan rak piring
 - 7). Belanja modal pengadaan piring/ gelas/ mangkok/ cangkir/ sendok/ garpu/ pisau
 - 8). Belanja modal pengadaan pengadaan mesin cuci
 - 9). Belanja modal pengadaan setrika
- f. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
- 1). Belanja modal pengadaan lampu hias

- 2). Belanja modal pengadaan jam dinding/ meja
 - 3). Belanja modal pengadaan gordena
 - 4). Belanja modal pengadaan karpet
 - 5). Belanja modal pengadaan ruangan
- g. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
- 1). Belanja modal pengadaan kamera
 - 2). Belanja modal pengadaan handycam
 - 3). Belanja modal pengadaan proyektor
 - 4). Belanja modal pengadaan soundsystem
- h. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
- 1). Belanja modal pengadaan telephone
 - 2). Belanja modal pengadaan faksimili
 - 3). Belanja modal pengadaan radio SSB
 - 4). Belanja modal pengadaan radio VHF
 - 5). Belanja modal pengadaan radio UHF
 - 6). Belanja modal pengadaan alat sandi
 - 7). Belanja modal pengadaan microphone
 - 8). Belanja modal pengadaan antenna
- i. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
- 1). Belanja modal pengadaan timbangan
 - 2). Belanja modal pengadaan teodolite
 - 3). Belanja modal pengadaan alat GPS
 - 4). Belanja modal pengadaan bejana ukur
 - 5). Belanja modal pengadaan barometer
- j. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
- 1). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Biologi
 - 2). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Fisika/ Geologi/ Geodesi
 - 3). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Kimia
 - 4). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Pertanian
 - 5). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Peternakan
 - 6). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium

- 7). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Perikanan
- 8). Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Bahasa
- 9). Belanja modal pengadaan alat-alat praga/ praktik sekolah
- k. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota
 - 1). Belanja modal pengadaan lampu hias taman
- l. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telephone
 - 2). Belanja modal pengadaan instalasi listrik
 - 3). Belanja modal pengadaan instalasi telephone
- m. Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
 - 1). Belanja modal pengadaan buku matematika
 - 2). Belanja modal pengadaan buku fisika
 - 3). Belanja modal pengadaan buku biologi
 - 4). Belanja modal pengadaan buku biografi
 - 5). Belanja modal pengadaan buku geografi
 - 6). Belanja modal pengadaan buku arkeologi
 - 7). Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
 - 8). Belanja modal pengadaan buku keagamaan
 - 9). Belanja modal pengadaan buku sejarah
 - 10). Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
 - 11). Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
 - 12). Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
 - 13). Belanja modal pengadaan buku politik
 - 14). Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
 - 15). Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
 - 16). Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
 - 17). Belanja modal pengadaan buku industry dan perdagangan
 - 18). Belanja modal pengadaan buku peraturan dan UU
 - 19). Belanja modal pengadaan buku naskah
 - 20). Belanja modal pengadaan buku terbitan berkala
 - 21). Belanja modal pengadaan buku microfilm
 - 22). Belanja modal pengadaan buku peta/ atlas/ globe

- n. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
- 1). Belanja modal pengadaan lukisan/ photo
 - 2). Belanja modal pengadaan alat musik

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
 Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang
 Selatan

Pada tanggal : 20 Mei 2009

PEJABAT WALIKOTA

TANGERANG SELATAN

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal :

M. SHALEH

PEJABAT WALIKOTA

TANGERANG SELATAN

M. SHALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009

NOMOR :

Lampiran 14

Perlu dijelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri (Permen) maupun peraturan yang lain. Hal ini tidak seperti BOS Buku dimana implementasinya diatur dengan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Nomor : 46 tahun 2007, Nomor 2 tahun 2008, Nomor 12 tahun 2008, Nomor 28 tahun 2008, Nomor 34 tahun 2008 dan Nomor 078 tahun 2008.

Yang menjadi dasar pengelolaan dana BOS adalah Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah yang diterbitkan setiap tahun mulai dari tahun 2005. Panduan tersebut dibuat berdasarkan notulensi atas audiensi antara Departemen Pendidikan Nasional dengan DPR RI akhir tahun 2004.

KUTIPAN :
PANDUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2009
DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN YANG
BERMUTU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa

program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS kedepan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Peningkatan Biaya Satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS Tahun 2009.

B. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu.

Secara Khusus Program BOS bertujuan untuk :

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

3. Meringankan beban operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

C. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran Program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar Biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. SD/SDLB di Kota | : Rp 400.000,-/siswa/tahun |
| 2. SD/SDLB di kabupaten | : Rp 397.000,-/siswa/tahun |
| 3. SMP/SMPLB/SMPT di kota | : Rp 575.000,-/siswa/tahun |
| 4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten | : Rp 570.000,-/siswa/tahun |

D. Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2009, dana BOS akan diberikan selama 12 Bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 dan semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di Bulan pertama setiap Triwulan.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan Program BOS tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang bendaharawan wajib memungut pajak penghasilan.
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
9. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
11. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
13. Peraturan pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
14. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
15. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
16. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberantasan Buta Aksara.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah.

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional.
21. Peraturan Mendiknas nomor 46 tahun 2007 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2008 tentang buku
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 13 tahun 2008 tentang harga eceran tertinggi buku teks pelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional.
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 34 tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran (SD: PKN,IPA,IPS,MTK,Bahasa Indonesia dan SMP: IPA,IPS,MTK,Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran
27. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia nomor SE-02/PJ./2006 tentang pedoman pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh bendaharawan atau penanggung jawab pengelolaan penggunaan Dana BOS di masing-masing unit penerima BOS.

BAB II

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Untuk menyamakan persepsi tentang pendanaan pendidikan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah, instansi dan masyarakat serta program BOS itu sendiri, dalam Bab II ini akan diuraikan menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut .

A. Jenis Biaya Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
 - a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia. Dan modal kerja tetap.
 - b. Biaya Operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
 - c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

- d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya.

C. Kebijakan Program BOS Depdiknas Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 naik secara signifikan menjadi : SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.
2. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI
3. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
4. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan bos tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.
5. pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi

D. Sekolah Penerima BOS

1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orangtua atau wali peserta didik.
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS
3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut
4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemda harus ikut dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah, serta menggratiskan siswa miskin.

E. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasa 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait Pendidikan Dasar 9 Tahun, setiap pengelola program harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. Bos tidak menghalangi peserta didik, orangtua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

F. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dalam program BOS, dana sditerima sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (Otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.

G. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
2. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, selain dari pemerintah dan pemerintah daerah, pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, atau sumber lain yang sah.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

H. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali peserta didik bertanggung jawab atas :

1. Biaya Pribadi peserta didik, misalnya uang saku/ uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya.
2. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkat pusat dikelola oleh masing-masing dikektorat. Direktorat pembinaan TK/SD bertanggungjawab terhadap program BOS untuk SD/SLB, sedangkan Direktorat Pembinaan SMP bertanggungjawab terhadap program BOS SMP/SMPLB/SMPT. Pengelolaan program BOS di tingkat provinsi dan kabupaten /kota dikelola oleh satu tim.

A. Tim Pengarah

1. Tingkat Nasional

- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- Ketua Bapenas
- Menteri Pendidikan Nasional
- Menteri Agama
- Menteri Keuangan
- Menteri Dalam Negeri

2. Tingkat Provinsi

- Gubernur
- Ketua Bappeda Provinsi

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- Bupati/Walikota
- Ketua Bappeda Kabupaten

B. Tim Manajemen BOS Pusat

1. Penanggungjawab Umum

- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Penanggungjawab BOS SD/SLB

- Direktur Pembinaan TK/SD

3. Penanggungjawab BOS SMP/SMPLB/SMPT

- Direktur Pembinaan SMP

4. Tim Pelaksana BOS SD/SDLB

- Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- Sekretaris

- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
- Unit Data
- Unit Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- Unit Publikas/Humas

5. Tim Pelaksana BOS SMP/SMPLB/SMPT

- Ketua Tim/Pejabat Pembuat Komitmen
- Sekretaris
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
- Unit Data
- Unit Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- Unit Publikas/Humas

6. Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS Pusat

- a. Menyusun rancangan program
- b. Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap provinsi
- c. Mrencanakan dan melakukan sosialisasi program
- d. Mempersiapkan dan melatih Tim Manajemen BOS
- e. Melakukan penyusunan , penggandaan dan pnyebaran buku panduan dan pelaksanaan program
- f. Menyusun data base sekolah tingkat nasional
- g. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- h. Memmberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- i. Memonitor perkembangan penyelesaian pengaduan
- j. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan terhadap instansi terkait
- k. Menyusun laporan pencairan dan penyaluran dana BOS

C. Tim Manajemen BOS Provinsi

1. Penanggungjawab

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi

2. Tim Pelaksana BOS

- Ketua Tim

- Sekretaris
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
- Unit Data
- Unit Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah
- Unit Publikas/Humas

3. Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi

- Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap kabupaten/kota
- Mempersiapkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)
- Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi
- Mempersiapkan dan melatih tim manajemen BOS Kabupaten/Kota
- Melakukan pendataan penerima bantuan
- Menyalurkan dana ke sekolah sesuai dengan haknya
- Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan tim manajemen BOS Kabupaten/kota
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- Memmberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- Memonitor perkembangan penyelesaian pengaduan
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan terhadap instansi terkait
- Menyusun laporan pencairan dan penyaluran dana BOS
- Mengumumkan daftar sekolah penerima dana BOS
- Mengupayakan tambahan dana dari sumber APBD
- Jika ada segera melakukan relokasi dana BOS dari sekolah yang kelebihan
- Mengembalikan sisa dana
- Menampung kelebihan dana

D. Tim Manajemen Tingkat Kabupaten/Kota

1. Penanggungjawab
2. Tim Pelaksana BOS

3. Tugas dan tanggung jawab tim manajemen BOS
Kabupaten/Kota

E. Tingkat Sekolah

1. Penanggungjawab

- Kepala Sekolah

2. Anggota

- Bendahara
- Satu unsur dari orang tua siswa di luar komite

3. Tugas dan tanggungjawab sekolah

- Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah
- Membuat laporan bulanan
- Mengumumkan laporan bulanan
- Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
- Melaporkan penggunaan dan BOS pada tim manajemen kabupaten/kota.

Lampiran 15

Tabel 12

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas wilayah (ha)	Persentase terhadap luas kota
1	Serpong	2.404 ha	16,33 %
2	Serpong Utara	1.784 ha	12,12 %
3	Ciputat	1.838 ha	12,49%
4	Ciputat Timur	1.543 ha	10,48%
5	Pamulang	2.682 ha	18,22%
6	Pondok Aren	2.988 ha	20,30%
7	Setu	1.480 ha	10,06%
	Kota Tangsel	14.719 ha	100%

Sumber : Hasil Olah Potensi Desa tahun 2006 dalam kompilasi data untuk penyusunan RT dan RW Kota Tangerang Selatan

Tabel 13

Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas (ha)
1	Serpong	1. Buaran	334
		2. Ciater	376
		3. Rawa Mekar Jaya	235
		4. Rawa Buntu	328
		5. Serpong	139
		6. Cilenggang	143
		7. Lengkong Gudang	361
		8. Lengkong Gng Timur	262
		9. Lengkong Wetan	226
2	Serpong Utara	1.Lengkong Karya	210
		2.Jelupang	126
		3.Pondok Jagung	209

		4. Pondok Jagung Timur	225
		5. Pakulonan	279
		6. Paku Alam	281
		7. Paku Jaya	454
3	Ciputat	1. Sarua	368
		2. Jombang	345
		3. Sawah Baru	274
		4. Sarua Indah	193
		5. Sawah	249
		6. Ciputat	172
		7. Cipayung	237
4	Ciputat Timur	1. Pisangan	391
		2. Cirendeui	308
		3. Cempaka Putih	227
		4. Pondok Ranji	246
		5. Rengas	165
		6. Rempoa	206
5	Pamulang	1. Pondok Benda	386
		2. Pamulang Barat	416
		3. Pamulang Timur	259
		4. Pondok Cabe Udik	483
		5. Pondok Cabe Ilir	396
		6. Kedaung	256
		7. Bambu Apus	220
		8. Benda Baru	266
6	Pondok Aren	1. Perigi Baru	310
		2. Pondok Kacang Barat	252
		3. Pondok Kacang Tmr	252
		4. Perigi Lama	389
			362

		5. Pondok Pocung	233
		6. Pondok Jaya	217
		7. Pondok Aren	253
		8. Jurang Mangu Barat	258
		9. Jurang Mangu Timur	271
		10. Pondok Karya	191
		11. Pondok Betung	
7	Setu	1. Kranggan	205
		2. Muncul	361
		3. Setu	364
		4. Babakan	170
		5. Bakti jaya	174
		6. Kademangan	206
	Kota Tangerang Selatan		14.719

Lampiran 16

Tabel 14

SEKOLAH JENJANG SMP DI KOTA TANGERANG SELATAN

A. SMP NEGERI

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU
1	SMP Negeri 1 Serpong	SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan
2	SMP Negeri 1 Ciputat	SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan
3	SMP Negeri 2 Ciputat	SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan
4	SMP Negeri 1 Pamulang	SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan
5	SMP Negeri 1 Pondok Aren	SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan
6	SMP Negeri 3 Ciputat	SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan
7	SMP Negeri 2 Serpong	SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan
8	SMP Negeri 2 Cisauk	SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan
9	SMP Negeri 2 Pamulang	SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan
10	SMP Negeri 4 Ciputat	SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan
11	SMP Negeri 3 Serpong	SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan
12	SMP Negeri 2 Pondok Aren	SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan
13	SMP Negeri 5 Ciputat	SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan
14	SMP Negeri 3 Pondok Aren	SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan
15	SMP Negeri 4 Serpong	SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan
16	SMP Negeri 5 Serpong	SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan
17	SMP Negeri 3 Pamulang	SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan

B. SMP SWASTA

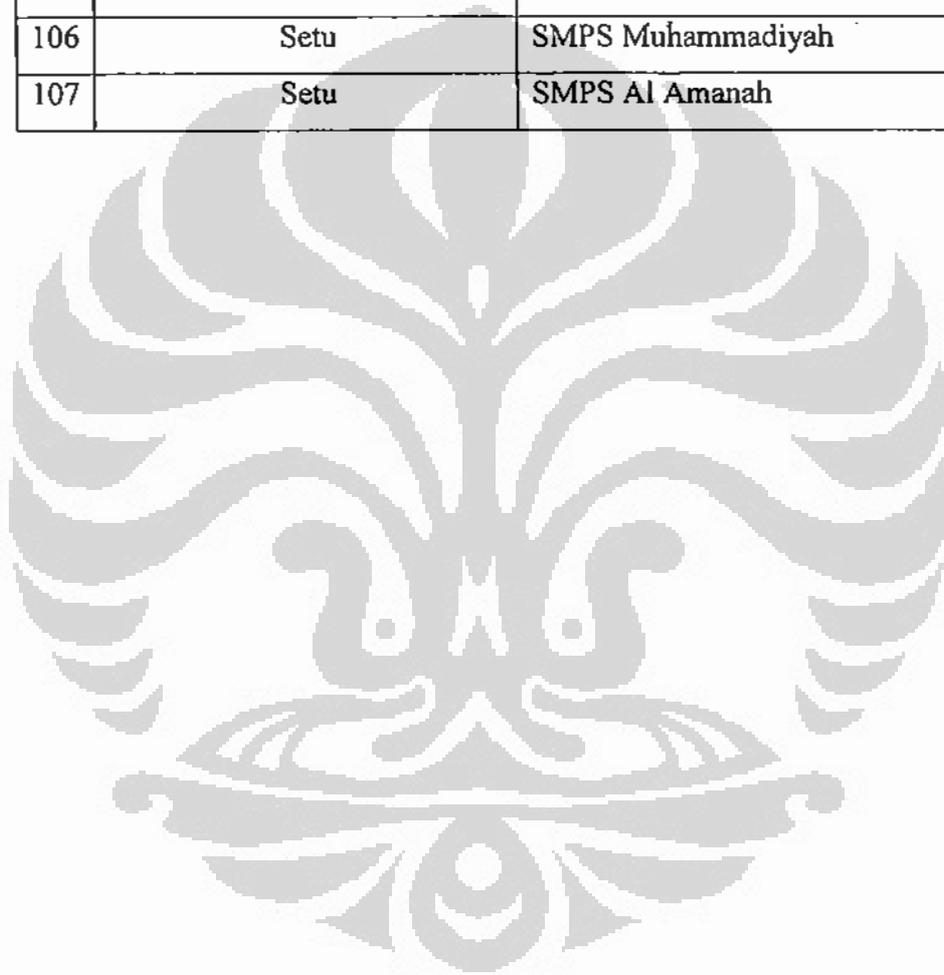
NO	KECAMATAN	SEKOLAH
1	Pondok aren	SMPS Al-Azhar 3
2	Pondok aren	SMPS Al-Mubarak
3	Pondok aren	SMPS An-Najiyah
4	Pondok aren	SMPS Budi Bhakti
5	Pondok aren	SMPS Cendrawasih II

6	Pondok aren	SMPS Dahlia
7	Pondok aren	SMPS Parigi
8	Pondok aren	SMPS Pembangunan Jaya
9	Pondok aren	SMPS PGRI 336
10	Pondok aren	SMPS PGRI 371
11	Pondok aren	SMPS Yapia
12	Pondok aren	SMPS Utama
13	Pondok aren	SMPS Wijaya Kusuma
14	Pondok aren	SMPS Yadika 6
15	Pondok aren	SMPS Global Jaya
16	Pondok aren	SMPS Katolik Ricci II
17	Pondok aren	SMPS Kebangsaan
18	Pondok aren	SMPS An-Nisaa
19	Pondok aren	SMPS Tunas Bangsa
20	Pondok aren	SMPS Kristen Penabur Bintaro
21	Pondok aren	SMPS Bina Tunas Bangsa
22	Pondok aren	SMPS Islam Terpadu Auliya
23	Pondok aren	SMPS Plus Al-Islamiyah
24	Pondok aren	SMPS IT Al Qur'aniyyah
25	Pondok aren	SMPS Islam Plus Baitul Maal
26	Pondok aren	SMPS Citra Indonesia
27	Pondok aren	SMPS Tunas Indonesia
28	Ciputat	SMPS Darussalam
29	Ciputat	SMPS Dwi Putra
30	Ciputat	SMPS Islam Al Khasyiun
31	Ciputat	SMPS Islam Al Syukro
32	Ciputat	SMPS Islamiyah
33	Ciputat	SMPS Paramarta
34	Ciputat	SMPS PGRI 1 Ciputat
35	Ciputat	SMPS PGRI 2 Ciputat
36	Ciputat	SMPS PGRI Jombang

37	Ciputat	SMPS Puspita Bangsa
38	Ciputat	SMPS Yapia
39	Ciputat	SMPS YMJ
40	Ciputat	SMPS Bintang Kejora
41	Ciputat	SMPS Al Matiin
42	Ciputat	SMPS Tirta Buaran
43	Ciputat	SMPS Nusa Indah
44	Ciputat	SMPS Al Fath
45	Ciputat Timur	SMPS Nusantara Plus
46	Ciputat Timur	SMPS Islam Ruhama
47	Ciputat Timur	SMPS Moh. Husni Thamrin
48	Ciputat Timur	SMPS Muhammadiyah 17
49	Ciputat Timur	SMPS Mabad Rempoa
50	Ciputat Timur	SMPS Syekh Abdurrauf
51	Ciputat Timur	SMPS Dua Mei
52	Pamulang	SMP 1926
53	Pamulang	SMPS Al Badar
54	Pamulang	SMPS Anugrah Abadi
55	Pamulang	SMPS Arraisiyah
56	Pamulang	SMPS Bakti Prima
57	Pamulang	SMPS Darma Karya UT
58	Pamulang	SMPS Djojorejo
59	Pamulang	SMPS Islam Alfajar
60	Pamulang	SMPS Materdai
61	Pamulang	SMPS Muhammadiyah 22
62	Pamulang	SMPS Muhammadiyah 44
63	Pamulang	SMPS Nurul Ikhlas
64	Pamulang	SMPS Pamulang
65	Pamulang	SMPS Seruni Putih
66	Pamulang	SMPS Waskito
67	Pamulang	SMPS Islam Raudatul Hikmah

68	Pamulang	SMPS Pelita Bangsa
69	Pamulang	SMPS Ora Et Labora
70	Pamulang	SMPS Muhammadiyah Parakan
71	Pamulang	SMPS Taruna Mandiri
72	Pamulang	SMPS Kharisma Bangsa
73	Pamulang	SMPS Al Hikmah
74	Pamulang	SMPS Al-Zahra Indonesia
75	Pamulang	SMPS Tamadun
76	Pamulang	SMPS Assalam
77	Pamulang	SMPS Putra Pertiwi
78	Serpong	SMP Terbuka
79	Serpong	SMPS Cikal Harapan
80	Serpong	SMPS Jihadul Mukhlisin
81	Serpong	SMPS Era Informatika
82	Serpong	SMPS Ora Et Labora
83	Serpong	SMPS PGRI Pakulonan
84	Serpong	SMPS PGRI Serpong
85	Serpong	SMPS Plus BLM
86	Serpong	SMPS Santa Ursula
87	Serpong	SMPS Stella Maris
88	Serpong	SMPS Saint Jhon
89	Serpong	SMPS Falatehan
90	Serpong	SMPS Mutiara Cendikia
91	Serpong	SMPS Bina Ishlah
92	Serpong	SMPS Anderson
93	Serpong	SMPS Intergal Al Firdaus
94	Serpong	SMPS Al Khaeriah
95	Serpong	SMPS Inovasi
96	Serpong	SMPS Islam Insan Mulia
97	Serpong Utara	SMPS Etafa
98	Serpong Utara	SMPS Al Hasaniyah

99	Serpong Utara	SMPS Athalia
100	Serpong Utara	SMPS IT. Insan Harapan
101	Serpong Utara	SMPS Yapipa
102	Serpong Utara	SMPS Yaspita
103	Serpong Utara	SMPS Al Azhar
104	Serpong Utara	SMPS Santa Laurensia
105	Serpong Utara	SMPS Athalia
106	Setu	SMPS Muhammadiyah
107	Setu	SMPS Al Amanah



Tabel 15
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
2008

NO	Pendidikan	Serpong	Serpong Utara	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Pondok Aren	Setu	Kota Tangsel
1	Sarjana	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,60%	7,06%	8,63%
2	Sarjana Muda	21,02%	21,02%	21,02%	21,02%	21,02%	20,97%	8,06%	20,42%
3	SLTA	29,03%	29,09%	29,03%	29,03%	29,03%	29,08%	32,85%	29,22%
4	SLTP	25,03%	25,03%	25,02%	25,03%	25,02%	25,43%	14,42%	24,64%
5	SD	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	5,23%	5,23%	23,08%	6,02%
6	TK	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	10,59%	3,06%	10,55%
7	Drop Out SD	0	0	0	0	0	0	8,35%	0,38%
8	Buta Huruf	0	0	0	0	0	0	3,13%	0,14%
	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 16
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas Dan Ruang Kelas Rusak
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2008

No	Uraian	Tangsel		Serpong		Serpong Utr		Pamulang		Ciputat		Ciputat Tmr		Pondok Aren		Setu	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	Jml SD	198	100	24	17	17	12	42	21	41	11	21	1	47	24	12	12
	Jml Ruang Kls SD	1100	1000	130	122	122	144	242	111	170	170	121	42	212	200	96	84
	Jml ruang yg rsk	212	21	-	13	13	-	48	11	30	1	11	1	1	-	-	-
2	Jml MI	2	31	12	-	-	3	-	11	2	1	-	1	21	-	1	6
	Jml Ruang Kls MI	12	190	90	-	-	1	-	1	-	-	-	11	132	-	7	46
	Jml ruang yg rsk	4	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
3	Jml SMP	17	107	3	15	2	12	3	13	3	18	2	12	3	20	1	17
	Jml Ruang KlsSMP	430	1232	80	180	50	120	70	150	80	210	52	122	70	230	24	310

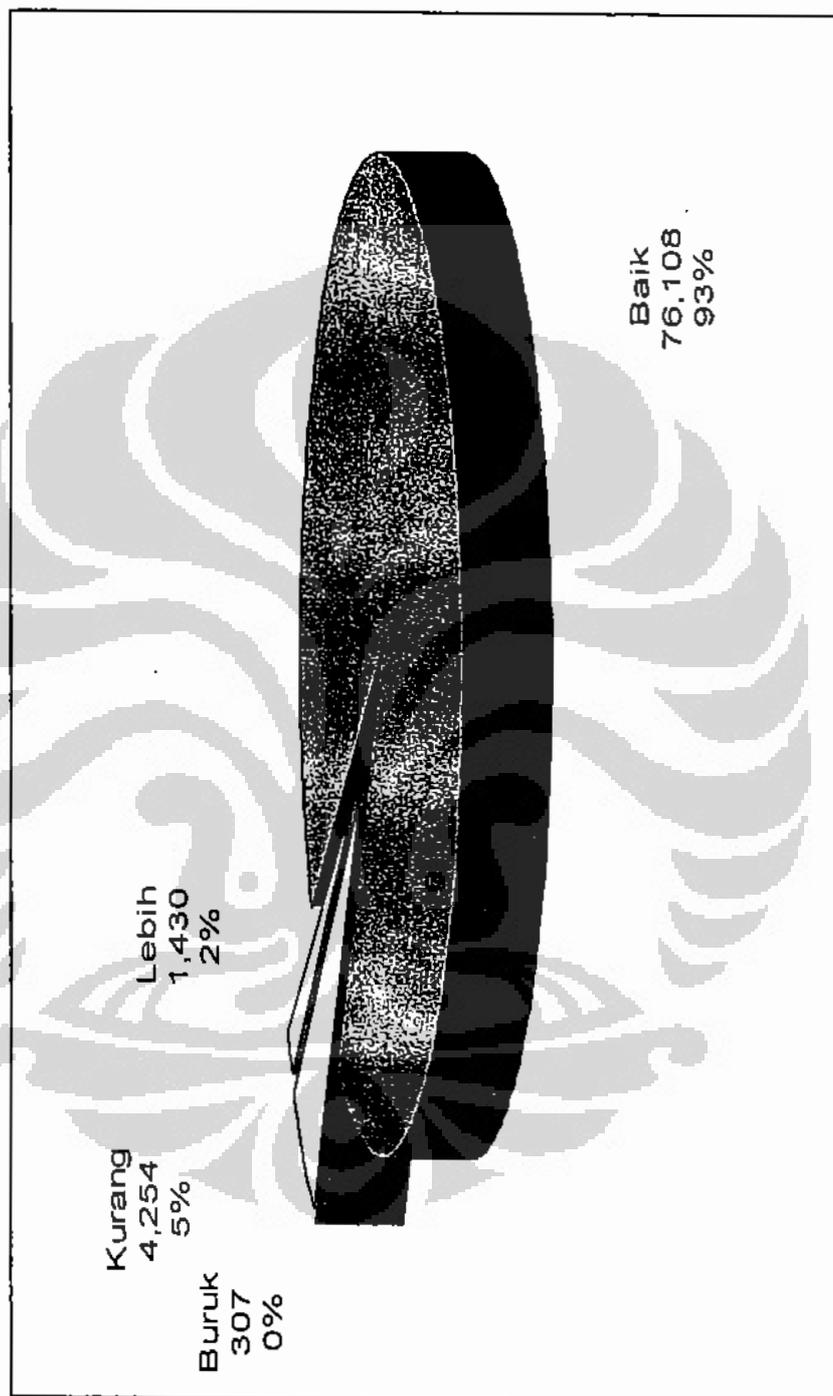
Tabel 17
Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
2008

No	Kecamatan	SD		SMP		SMA		SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	Serpong	118,4	98,59	120,83	83,62	38,17	29,94	41,84	32,85
2	Pamulang	80,17	66,92	58,96	36,46	18,97	13,22	43,43	36,92
3	Ciputat	109,45	91,21	109,42	82,47	39,32	27,9	40,43	26,11
4	Pondok Aren	71,62	59,17	52,72	36,41	20,52	14,46	10,73	7,75
5	Serpong Utara	88,51	71,09	80,31	70,17	24,96	20,43	35,6	29,48
6	Ciputat Timur	58,44	49,01	60,69	58,84	35,47	25,48	44,18	36,42
7	Setu	85,85	71,13	60,17	59,05	33,24	23,16	20,76	17,91
	Jumlah Rata-rata	87,49	72,45	77,59	61,00	30,09	21,94	33,85	26,78

Tabel 18
Jumlah dan Presentase Keadaan Gizi Balita Yang
Ditimbang Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2007

No	Kecamatan	Jumlah Balita	Keadaan Gizi (Orang)			Jumlah Balita	Keadaan Gizi (%)			
			Baik	Buruk	Kurang		Lebih	Baik	Buruk	Kurang
1	Serpong	7,319	6,785	24	454	56	100.00%	0.35%	6.69%	0.83%
2	Serpong Utara	6,304	5,746	34	357	167	100.00%	0.59%	6.21%	2.91%
3	Setu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pamulang	21,201	19,393	71	1,368	369	100.00%	0.37%	7.05%	1.90%
5	Ciputat	29,454	28,030	130	1,003	291	100.00%	0.45%	3.58%	1.04%
6	Ciputat Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pondok Aren	17,821	16,154	48	1,072	547	100.00%	0.30%	6.64%	3.39%
Kota Tangerang Selatan		82,099	76,108	307	4,254	1,430	100.00%	0.40%	5.59%	1.88%

Gambar 4
Persentase keadaan gizi Balita yang ditimbang pada tahun 2007



Tabel 19
Data Terkait Kesehatan Ibu Pada 10 (Sepuluh) Puskesmas
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009

No	Puskesmas	Ibu				Neomatus 0 - 28 Hari	Sasaran WUS (Wanita Usia Subur)	Sasaran Pus (Pasangan Usia Subur)	Dukun Bayi	
		Hamil	Bersalin	Nifas	Maneteki				Terlaktih	Tidak Terlatih
1	Serpong	2.487	2.374	2.171	2.171	2.261	59.261	18.197	15	1
2	Pondok Jagung	1.918	1.831	1.83	1.831	1.744	28.117	15.651	7	-
3	Pamulang	6.152	5.872	5.872	5.872	5.592	53.15	46.313	16	-
4	Ciputat	836	798	798	798	760	8.269	6.926	4	-
5	Kampung Sawah	722	690	690	690	657	19.927	13.3	6	-
6	Jombang	2.45	2.339	1.339	2.339	2.227	9.629	6.53	9	-
7	Ciputat Timur	3.976	3.796	1.795	3.795	3.614	22.244	15.798	-	-
8	Pondok Aren	2.982	2.847	2.847	2.847	2.711	27.739	23.928	3	-
9	Jurang Mangu Timur	3.137	2.994	2.994	2.994	2.851	12.403	10.571	-	-
10	Setu	1.218	1.163	1.163	1.163	1.308	13.53	9.48	8	-
		25.878	24.703	24.703	24.703	23.525	254.271	166.894	68	1

Tabel 20
Data Terkait Kesehatan Keluarga Miskin 10 (Sepuluh) Puskesmas
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009

No	Puskesmas	Rumah Tangga Rawan Gakia (RT)	Jiwa Peserta Jamkesmas (Orang)	Anak Umur 0 - 11 Bulan Gakin (Oran)	Anak Umur 11-59 Bulan Gakin (Orang)	Bumil Gakin (Orang)
1	Serpong	2.911	9.311	34	186	54
2	Pondok Jagung	23872	6.485	17	NA	39
3	Pamulang	7.877	22.047	116	NA	189
4	Ciputat	5.42	4.817	20	51	53
5	Kampung Sawah	1.693	6.57	67	NA	117
6	Jombang	1.678	5.391	26	280	13
7	Ciputat Timur	NA	12.551	79	325	96
8	Pondok Aren	4.246	12.431	55	NA	100
9	Jurang Mangu Timur	4.846	11.407	31	486	49
10	Setu	NA	13.548	29	-	21
Kota Tangerang Selatan		31.543	104.558	475	1.328	731

Tabel 21
Jumlah Lansia Sasaran di Wilayah Puskesmas dan Panti
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009

No	Puskesmas	Sasaran Lansia di Wilayah Puskesmas & Panti			Jumlah
		45 - 59 Thn	60 - 69 Thn	> 70 Thn	
1	Serpong	11.119	5.026	664	16.809
2	Pondok Jagung	8.576	3.876	418	12.87
3	Pamulang	27.500	12.43	1.800	41.730
4	Ciputat	3.736	1.689	540	5.965
5	Kampung Sawah	3.230	1.46	360	5.060
6	Jombang	10.953	4.951	890	16.794
7	Ciputat Timur	17.772	8.033	1.420	22.225
8	Pondok Aren	13.331	6.026	899	20.256
9	Jurang Mangu Timur	14.022	6.339	922	21.282
10	Setu	5.447	2.462	987	8.896
	Kota Tangerang Selatan	115.686	52.291	8.900	176.877

Tabel 22
Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kota Tangerang Selatan
Tabun 2009

No	Jenis	Kecamatan										Kota Tangerang Selatan	
		Serpong	Serpong Utara	Pamulang	Ciputat	Ciputat Timur	Pondok Aren	Setu					
1	Puskesmas	1	1	1	3	2	2	1	10				
2	Puskemas Pembantu	1	1	1	3	-	1	1	5				
3	Tempat Perawatan	-	-	14	-	-	-	-	14				
4	Balai Pengobatan Swasta	30	22	24	14	32	24	11	176				
5	Praktek Dokter Umum Swasta	113	133	267	32	23	65	20	660				
6	Praktek Dokter Gigi Swasta	12	45	52	25	56	25	6	267				
7	Praktek Dokter Spesialis	6	25	11	11	50	5	-	112				
8	Praktek Bidan Swasta	40	23	50	45	42	22	16	276				
9	Laboratorium Klinik Swasta	1	3	7	2	5	6	1	50				
10	Optik	1	-	2	5	11	2	1	42				
11	Apotik	2	5	10	2	25	18	1	75				
12	Toko oBat	2	-	-	-	2	-	1	6				
13	Industri Kecil Obat Tradisional	5	-	17	15	-	7	-	48				
14	Rumah Bersalin Swasta	2	6	4	5	3	10	1	33				
15	Pengobatan Tradisional	2	2	4	5	2	7	1	31				
16	Puskesmas Keliling	2	2	2	1	2	2	1	20				

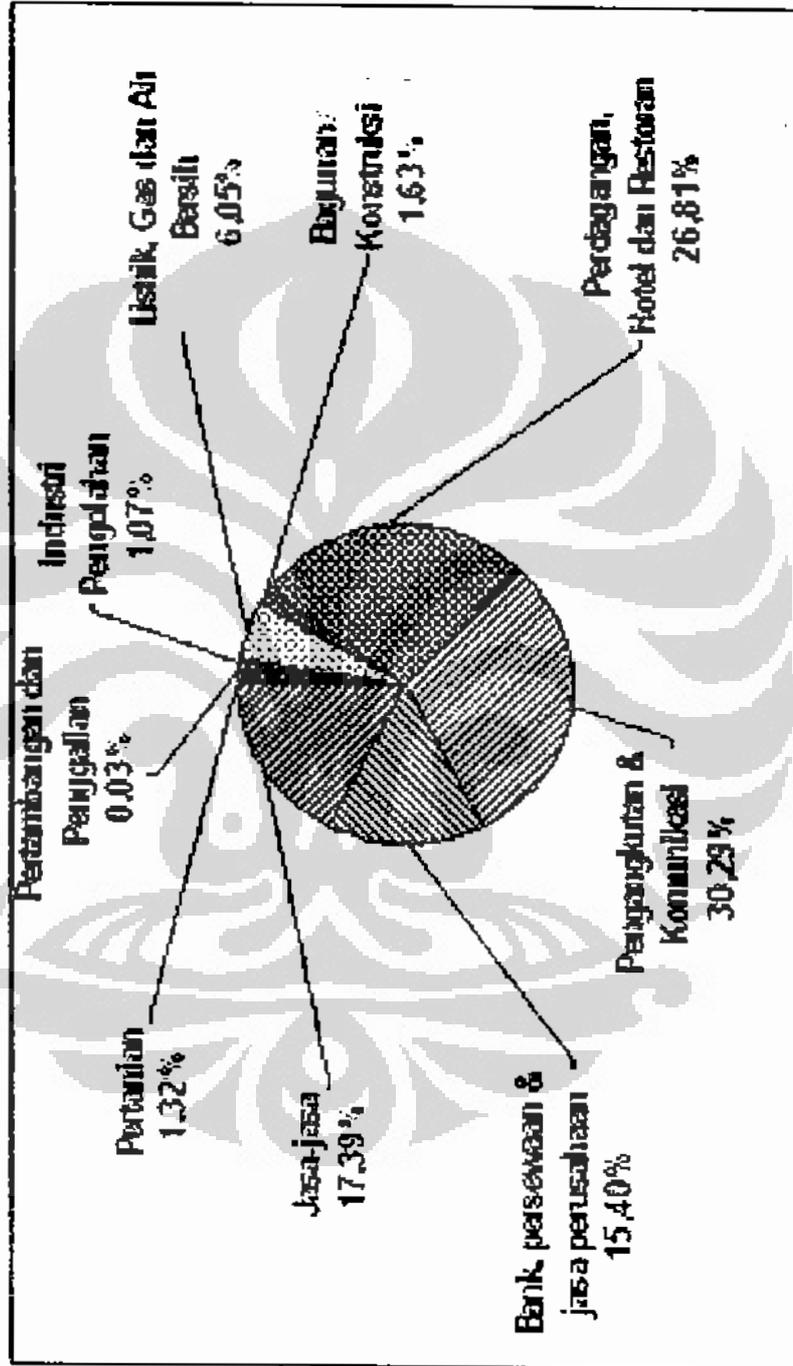
Tabel 23
 Jumlah Tenaga Kesehatan Pada 10 (Sepuluh) Puskesmas
 Kota Tangerang Selatan Tahun 2009

No	Puskesmas	Tenaga Kesehatan										Jumlah
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Ahli Gizi	Ahli Sanitasi	Ahli Kesehatan Masyarakat				
1	Serpong	3	1	13	1	1	1	0	0	0	0	30
2	Pondok Jagung	2	3	10	7	1	1	0	0	0	0	24
3	Pamulang	3	4	9	6	1	1	0	0	0	0	24
4	Cigugur	2	3	4	4	1	0	0	0	0	0	14
5	Kampung Sawah	2	3	7	5	1	1	0	0	0	0	19
6	Jombang	2	2	8	5	1	1	0	0	0	0	18
7	Cigugur Timur	1	1	9	3	1	1	0	0	0	0	15
8	Pondok Aren	2	2	9	7	1	1	0	0	0	0	22
9	Purang Mangrove Timur	2	2	6	2	0	1	0	0	0	0	13
10	Satu	3	1	12	5	0	0	0	0	0	0	23
Kota Tangerang Selatan		22	23	87	45	8	6	0	0	0	0	192

Tabel 24
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
Di Wilayah 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009

No	Puskesmas	Posyandu						Posbindu	Kader			
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah	Posyandu		Darmawisma	Posbindu		
							Total			Akut	Total	Aktif
1	Serpong	10	12	42	10	74	19	420	420	1.258	72	72
2	Pondok Jagung	17	22	24	5	68	7	351	351	351	21	21
3	Pamulang	32	46	38	16	131	24	820	820	970	42	42
4	Ciputat	9	22	3	1	35	5	216	226	216	25	25
5	Kampung Sawah	1	29	47	2	79	9	404	404	404	42	42
6	Jombang	5	32	12	2	51	9	300	300	300	51	51
7	Ciputat Timur	5	69	16	10	118	11	708	708	708	55	55
8	Pondok Aren	16	41	18	7	82	10	366	365	700	80	80
9	Jurang Mangu Timur	10	23	60	.	93	6	469	375	575	77	77
10	Setu	-	40	-	-	40	8	167	167	167	36	36
Kota Tangerang Selatan		104	336	278	53	771	108	4.221	4.127	5.549	501	501

Gambar 5
Struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2007



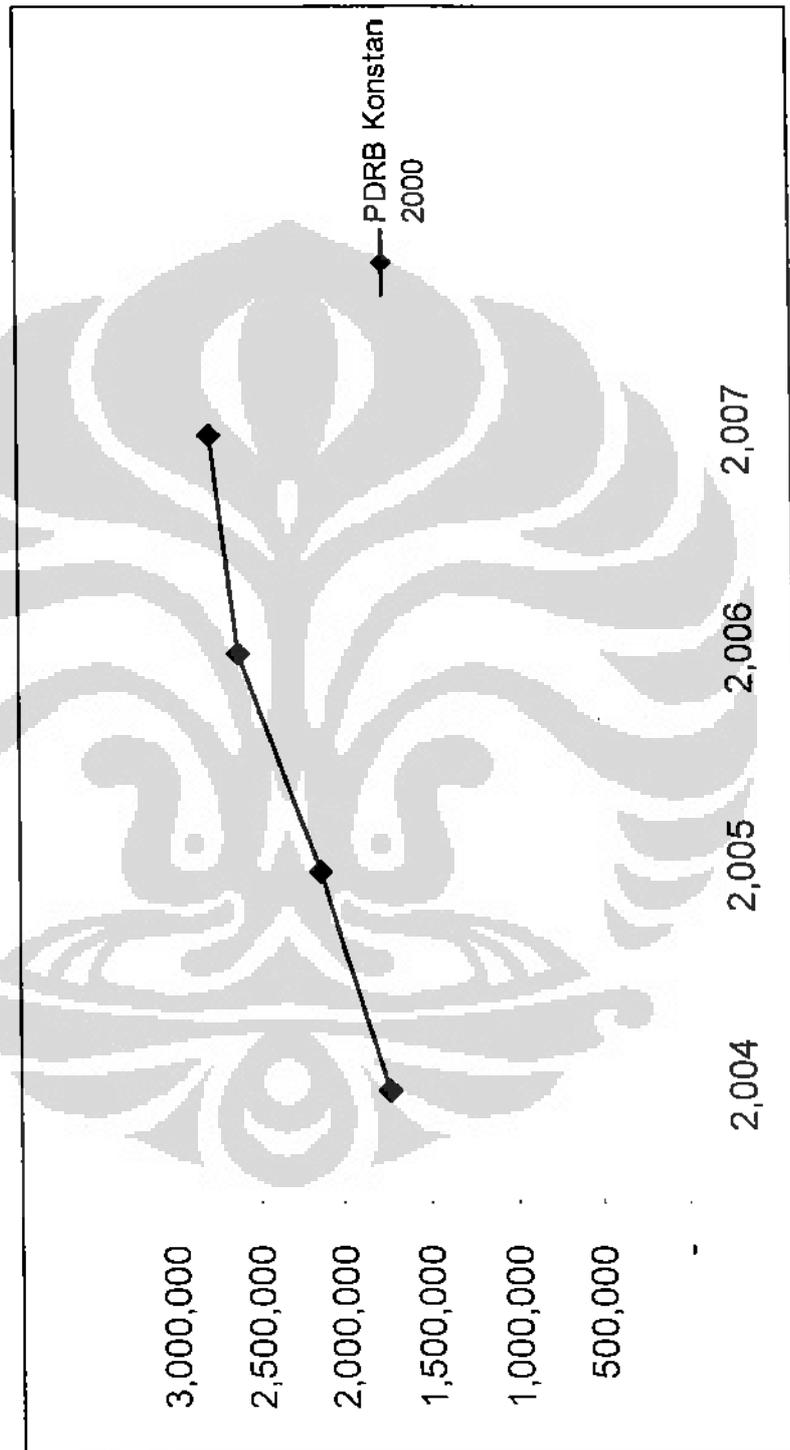
Tabel 25
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H Berlaku Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha
Tahun 2007 (Juta Rupiah)

No	Kecamatan	Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan/ Konstruksi	Perdagangan Hotel & Restoran	Jasa
1	Serpong	0.13 %	0.01 %	0.10 %	1.12 %	0.01 %	2.14 %	12.14 %
2	Serpong Utara	0.01 %	0.00 %	0.25 %	1.00 %	1.12 %	2.76 %	0.04 %
3	Setu	0.02 %	0.02 %	0.21 %	0.11 %	0.00 %	2.22 %	0.01 %
4	Pamulang	0.23 %	0.00 %	0.20 %	0.11 %	0.00 %	2.21 %	0.2 %
5	Ciputat	0.33 %	0.00 %	0.00 %	2.43 %	0.00 %	0.03 %	0.03 %
6	Ciputat Timur	0.01 %	0.00 %	0.17 %	2.03 %	0.00 %	1.33 %	2.15 %
7	Pondok Aren	0.37 %	0.03 %	0.22 %	1.22 %	0.30 %	0.04 %	0.40 %
8	Kota Tangerang Selatan	1.1 %	0.06 %	1.15 %	8.02 %	1.43 %	10.73 %	14.97 %

Tabel 26
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H Konstan 2000 Menurut Kecamatan
Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah)

Kecamatan	Tahun			
	2004	2005	2006	2007
Serpong	179,550	443,493	541,774	578,021
Serpong Utara	303,232	326,762	330,612	267,523
Setu	22,559	25,220	35,702	34,958
Pamulang	189,287	299,994	301,838	333,208
Ciputat	216,106	234,788	277,804	290,068
Ciputat Timur	542,445	514,289	739,030	890,351
Pondok Aren	277,010	283,591	372,839	374,653
Kota Tangerang Selatan	1,730,191	7,028,142	2,599,601	2,768,787

Gambar 6
Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000, Tahun 2004 – 2007



Tabel 27
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
A.D.H Berlaku Menurut Kecamatan
Tahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah)

Kecamatan	2004	2005	2006	2007
Serpong	1,837,879	4,078,794	5,598,389	5,807,789
Serpong Utara	4,103,319	3,896,564	4,429,638	3,486,543
Setu	443,426	524,144	659,014	623,004
Pamulang	838,781	874,163	1,262,322	1,353,687
Ciputat	1,461,871	1,723,390	1,779,766	1,808,530
Ciputat Timur	3,699,655	3,963,323	4,773,653	5,596,957
Pondok Aren	1,232,346	1,209,874	1,566,654	1,530,268
Kota Tangerang Selatan	1,792,030	2,091,224	2,564,752	2,655,447
Total PDKB (Juta Rupiah)	1,730,192	2,028,185	2,599,601	2,768,787
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	965,493	969,951	1,013,588	1,042,682

Tabel 28
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2003 - 2007 (Juta Rupiah)

Tahun	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan/ Konstruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Pengangkutan & Komunikasi	Bank, Persewaan & Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Jumlah
2004	39,450.90	1,089.45	30,995.41	153,417.00	192,511.20	573,339.49	183,030.95	156,523.72	399,717.35	1,730,075.47
2005	40,369.99	984.80	35,050.15	163,642.23	201,258.65	624,538.45	206,817.85	319,312.74	437,212.27	2,029,187.13
2006	51,976.34	991.82	40,129.74	154,800.35	147,782.00	754,909.75	609,051.77	370,585.32	459,374.53	2,589,601.62
2007	44,001.04	1,089.89	38,136.52	139,905.41	61,302.55	873,068.00	698,586.37	409,639.33	409,639.33	2,675,368.44

Tabel 29
Perkembangan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H Berliku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2003 - 2007 (Juta Rupiah)

Tahun	Pertanian	Pertambangan & Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas & Air Bersih	Bangunan/ Konstruksi	Perdagangan, Hotel & Restoran	Pengangkutan & Komunikasi	Bank, Persewaan & Jasa Perusahaan	Jasa-jasa	Jumlah
2003	2.03%	0.05%	1.55%	7.34%	8.93%	28.56%	24.58%	16.33%	10.63%	100.00%
2004	2.28%	0.06%	1.79%	8.87%	11.13%	33.14%	10.58%	9.05%	23.10%	100.00%
2005	1.99%	0.05%	1.73%	8.07%	9.92%	30.80%	10.15%	15.74%	21.55%	100.00%
2006	2.00%	0.04%	1.54%	5.95%	5.68%	29.04%	23.43%	14.26%	18.06%	100.00%
2007	1.59%	0.04%	1.38%	5.05%	2.21%	31.50%	25.23%	14.79%	18.21%	100.00%

Lampiran 35

Selamat Datang
Kota Tangerang Selatan



Fly over di Pasar Ciputat memperlancar akses jalan di kecamatan Ciputat, kota Tangerang selatan, Banten, yang menuju arah Pondok Aren, Pamulang, Bogor,



Sejumlah tokoh masyarakat berharap, di Ciputat nantinya bisa ada gedung Islamic Center seperti halnya di kota-kota lain yang sudah maju.